



**UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA**

**STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA DI PBB  
DALAM RANGKA MENCEGAH LEPASNYA PAPUA DARI NKRI**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Magister Pertahanan

**JOKO YOCHANAN S.E., M.A.**

**120120104069**

**SEKOLAH STRATEGI PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI STRATEGI DAN KAMPANYE MILITER**

**JAKARTA**

**JANUARI 2014**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **JOKO YOCHANAN S.E., M.A.**  
NPM : **120120104069**  
Program Studi : **STRATEGI DAN KAMPANYE MILITER**  
Judul Tesis : **STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA DI PBB DALAM  
RANGKA MENCEGAH LEPASNYA PAPUA DARI NKRI**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains Bidang Pertahanan pada Program Studi Strategi dan Kampanye Militer, Sekolah Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Dadang Gunawan ( )

Pembimbing : Kol Pnb Amrizal Mansur M.Si (Han) ( )

Penguji : ( )

Penguji : ( )

Penguji : ( )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2014

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Jakarta, Januari 2014

JOKO YOCHANAN S.E., M.A.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO YOCHANAN S.E., M.A.

NPM : 120120104069

Program Studi : STRATEGI DAN KAMPANYE MILITER

Jenis karya : TESIS

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**STRETEGI DIPLOMASI INDONESIA DI PBB  
DALAM RANGKA MENCEGAH LEPASNYA PAPUA DARI NKRI**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Januari 2014

Yang menyatakan

( JOKO YOCHANAN S.E., M.A.)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karuniaNya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister Sains Terapan Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia.

Dalam penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah banyak memberikan dorongan, bantuan serta masukan sehingga dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dadang Gunawan selaku dosen pembimbing 1 yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.

2. Kol. Pnb. Amrizal Mansur M.Si (Han) selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing secara seksama proses penyusunan tesis ini hingga selesai.

3. Dosen, pembimbing, staf pengajar dan staf administrasi Universitas Pertahanan Indonesia, yang sangat membantu dalam proses penyelesaian tesis ini.

4. Bp. Fikry Cassidy, Laksma TNI Yos Toto, Kol Chb Sonny Iroth, Bp. Andi Rahmiyanto, Bp. Tumpal Simanjuntak, Brigjen TNI Hafil dan Kol Pnb Timbang Sembiring yang telah membantu memberikan respon terhadap pertanyaan penelitian.

5. Anellia Praptiana Sasty, Tandhika Excellentio Yochanan dan Olla Varalintya Yochanan, isteri dan anak-anak saya yang secara selalu menyemangati dalam proses penyusunan tesis.

Akhir kata, saya berharap Tuhan YME berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Jakarta, Januari 2014  
Yang menyatakan

( JOKO YOCHANAN S.E., M.A.)

## ABSTRAK

Nama : **JOKO YOCHANAN S.E., M.A.**  
Program Studi : **STRATEGI DAN KAMPANYE MILITER**  
Judul :

### **STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA DI PBB DALAM RANGKA MENCEGAH LEPASNYA PAPUA DARI NKRI**

Aspirasi memisahkan diri dari NKRI yang dilakukan aktivis pro “M” Papua dan didukung oleh *support groups* dan *solidarity groups* terus mengemuka. Selama lebih dari 50 tahun, proses integrasi tanah Papua ke dalam NKRI melalui *Act of Free Choise* (Pepera) yang difasilitasi PBB, tidak membuat orang asli Papua merasa aman dan sejahtera. Anggapan marginalisasi dan diskriminasi politik, ekonomi, maupun sosial-budayaterhadap orang asli Papua; kasus pelanggaran HAM dan kekerasan negara yang dinilai tidak diselesaikan secara adil; adanya anggapan *incomplete transfer of authority* Papua dari Belanda kepada Indonesia ; serta orang asli Papua menganggap kegagalan pembangunan berkaitan dengan implementasi UU Otsus Papua, terus disuarakan dalam berbagai bentuk manifestasi seperti rapat gelap, seminar, ibadah, peluncuran buku, unjuk rasa, *press release*, hingga bentuk kekerasan bersenjata. Pendirian kantor-kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris dan di Den Haag, Belanda, secara konsisten dilakukan aktivis pro “M untuk memperoleh simpati internasional atas perjuangan segelintir orang asli Papua, yang tidak puas dengan hasil pembangunan. Internasionalisasi isu Papua ke dunia internasional merupakan aksi dan strategi diplomasi Gerakan Separatis Papua untuk lebih menguatnya dukungan dunia, diyakini *second track* perjuangan ini akan bermuara di PBB, sebagai organisasi multilateral yang paling kredible dan memungkinkan proses peninjauan kembali Pepera dilakukan melalui referendum.

Menyikapi tuntutan ini, Pemerintah melalui PTRI New York sebagai perwakilan diplomasi Indonesia di PBB memainkan strategi untuk mencegah masuknya agenda Papua ke badan-badan utama (*main body*) maupun badan turunan (*subsidiary body*) PBB. Isu prioritas diplomasi Indonesia adalah mempertahankan integritas NKRI dan mencegah separatisme. Isu ini sangat terkait dengan upaya untuk mencegah

pembahasan mengenai Papua dan isu residual HAM di tingkat PBB. Prioritas isu juga mencerminkan tekad Pemerintah di tingkat multilateral untuk menjaga batas dan luas wilayah RI sesuai hukum internasional. Untuk mewujudkan dukungan dari negara-negara pihak (*states party*) di PBB, maka diplomasi Indonesia juga memainkan kerjasama *capacity building* dan kerjasama multilateral di bidang politik, perdamaian dan perlucutan senjata, demokrasi, pemberantasan korupsi, *good governance*, *counter terrorism* serta pemajuan perlindungan HAM serta menindaklanjuti peluang kerjasama di bidang pertahanan, militer, *peacekeeping operations*, *peace building* dan *civilian capacity* di fora internasional. Melalui peran aktif diplomasi Indonesia dalam setiap persidangan maupun konferensi yang diselenggarakan PBB, diharapkan mampu mencegah masuknya isu Papua ke dalam agenda PBB.

Strategi diplomasi Indonesia di forum multilateral ini tidaklah cukup tanpa dibarengi langkah konkrit Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang didukung seluruh Kementrian/Lembaga termasuk TNI/Polri, pihak swasta, akademisi dan masyarakat untuk rakyat Papua. Kebutuhan mendasar yang langsung dirasakan orang Papua adalah ketersediaan sandang, pangan, papan yang murah, tersedianya lapangan pekerjaan, pendidikan murah, pelayanan kesehatan yang memadai, pelayanan publik yang berpihak pada rakyat, pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan, dan adanya rasa aman bagi seluruh masyarakat yang tinggal di tanah Papua. Pemenuhan kebutuhan dasar ini tidaklah berlebihan mengingat tanah Papua memiliki sumber daya alam berlimpah, dari hasil hutan, hasil tambang, hasil laut dan lain-lain, sehingga diyakini mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Dengan strategi terpadu ini maka diyakini tanah Papua tetap dalam bingkai NKRI untuk selamanya.

## ABSTRACT

Name : **JOKO YOCHANAN S.E., M.A.**  
Study Program : **STRATEGI DAN KAMPANYE MILITER**  
Title :

### **INDONESIAN DIPLOMACY STRATEGY IN THE UN ON PREVENTING THE DISINTEGRATION OF PAPUA FROM NKRI**

Aspiration separates itself from NKRI that was done by the pro “M” Papua activists and supported by support groups and solidarity groups keeps rising. For over 50 years, the process of integrating Papua into NKRI through Act of Free Choice that is facilitated by the UN, did not make the natives of Papua feel comfortable and prosperous. Thoughts of marginalizing and discrimination of politics, economics or social-culture for the Papua natives; cases of violating human rights and the nation’s violence is considered to be ended in an unfair way; thoughts about Papua’s incomplete transfer of authority from the Dutch to Indonesia is present; and the Papua natives considers the failure of construction connects to the implementation of UU Otsus Papua, then is voted in a variety of manifestations like illegal meetings, seminars, worship services, book launching, protests, press release and even in the form of armed violence. The consistency of establishing offices for the vice OPM in Oxford, England and in Den Haag, the Netherlands was done by the pro “M” activists in order to gain international sympathy for the struggle of some Papua natives that are not pleased with the result of the construction. The internationalization of the Papua case to the international world is an action and a strategy of the Free Papua Movement diplomacy for strengthening the support from the world, it is made sure that the second track of this battle will end in the UN, as a multilateral organization as the most credible and makes the reviewing process of Act of Free Choice is done through the referendum.

Observing this demand, the government, through PTRI New York, will act as a presentation of Indonesian diplomacy in the UN, performing strategies that prevents the availability of Papua’s agenda to the main body and or the subsidiary body of the UN. The issue that is prioritized by the Indonesian diplomacy is maintaining NKRI’s integrity and preventing separatism. This issue is strongly related

to the effort of preventing discussions about Papua and residual human rights issue in the UN context. The issue priority also shows the will of the government in the multilateral level to prevent borders and the total area of the Indonesian Republic based on the international law. To put the support of the states party in the UN into realization, the Indonesian diplomacy performs a cooperation with the capacity building and the multilateral in politics, peace and disarmament, democracy, eradication of corruption, good governance, counter terrorism and also the advancement of human rights and continuing the chance of cooperation in defense, military, peacekeeping operations, peace building and civilian capacity in international forum. Through the active performance of Indonesian diplomacy in every trial or conference that is held by the UN is hoped to be able to prevent the availability of Papua's issue to the UN's agenda.

Indonesian diplomacy's strategy in the multilateral forum is not complete without the presence of a concrete step done by the government, the government of the province of Papua and west Papua that is supported by the entire ministry/institution including TNI/Polri, private parties, academy and the community for the people of Papua. The basic needs that the people of Papua will experience is the available stock of clothing, food, affordable housing, jobs, cheap education, adequate health care, public services for the people, the continuance of road infrastructure development, and the presence of the safety feeling for the entire community that lives in Papua. The fulfilment of these basic needs is not over exaggerating now that Papua has a rich source of natural resources from the forest products, mining, marine products, etc. thus it is believed to be able to provide the needs for its people. With this integrated strategy, it is sure that Papua will be considered in NKRI forever.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
1. BAB 1 - PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Penelitian .....	1
1.1.1 Diplomasi Indonesia di PBB .....	3
1.1.2 Menguatnya Tuntutan Mereka Aktivis Pro “M” .....	5
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian .....	14
2. BAB 2 - TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	16
2.1 Tinjauan Pustaka .....	16
2.1.1 Kerangka Teoritis .....	16
2.1.2 Penelitian Terdahulu .....	21
2.2 Kerangka Pemikiran .....	23
2.2.1 Peningkatan Diplomasi Indonesia di PBB .....	25
2.2.2 Mencegah Masuknya isu Papua ke dalam agenda PBB .....	26
2.2.3 Kemungkinan entry point masuknya isu Papua ke dalam Agenda PBB .....	27
3. BAB 3 METODE PENELITIAN .....	29
3.1 Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian .....	29
3.1.1 Subjek Penelitian .....	29
3.1.1 Objek Penelitian .....	29
3.2 Desain Penelitian .....	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	30

3.3.1 Wawancara .....	31
3.3.2 Studi Kepustakaan .....	31
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
3.4.1 Lokasi Penelitian .....	31
3.4.2 Waktu Penelitian .....	31
<b>4. BAB 4 STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA DI PBB</b>	
<b>DALAM RANGKA MENCEGAH LEPASNYA PAPUA DARI NKRI</b>	<b>33</b>
4.1 Umum .....	33
4.2 Perkembangan Situasi Terkini Papua .....	33
4.2.1 Tuntutan Merdeka Gerakan Separatis Papua .....	33
4.2.2 Kegiatan GSPP di Dalam Negeri .....	36
4.2.3 Aksi Gerakan Separatis Bersenjata Papua .....	55
4.2.4 Kegiatan Aktivis pro “M” di Luar Negeri .....	69
4.2.5 Kisruh Pemilukada sebagai Proses Politik .....	73
4.2.6 Disparitas Ekonomi Sosial Budaya .....	74
4.2.7 Persoalan PT.Freeport Indonesia .....	76
4.3 Upaya Mengagendakan Isu Papua di PBB .....	81
4.3.1 Melalui Negara-negara Anggota PBB .....	81
4.3.2 Melalui NGO/LSM .....	83
4.4 Strategi Diplomasi Indonesia di PBB .....	85
4.4.1 Isu Prioritas Diplomasi Indonesia .....	85
4.4.2 Rencana Strategis Diplomasi Indonesia .....	86
4.4.3 Partisipasi Diplomasi Indonesia pada Sidang/ Konferensi Internasional .....	87
4.4.4 Strategi Diplomasi Indonesia pada Sidang UNPFII	90
4.4.5 Strategi Diplomasi Indonesia Menggalang Penolakan Konsep Self Determination sebagai Konsep Independence Atau Merdeka .....	93
4.4.6 Strategi Intermestik Menggabungkan Konsep Interna sional dan kondisi Domestik Mrngurang Penggunaan Alasan Penghisapan Ekonomi Sebagai Alasan Permintaan Merdeka .....	95

4.4.7 Strategi Diplomasi Mencegah Pepera Model Baru .....	99
4.5 Strategi Nasional Smart Approach dalam Penyelesaian Papua	106
4.5.1 Format Dialog Jakarta – Papua yang Tepat .....	109
4.5.2 Orang Asli Papua Sebagai Objek Sekaligus Subjek Pembangunan .....	110
4.5.3 Pembangunan Infrastruktur Dasar Sebagai Sarana Penghubung .....	111
4.5.4 Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah .....	112
4.5.5 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rakyat .....	116
4.5.6 Keberpihakan pada Pertumbuhan Ekonomi Orang Asli Papua .....	117
4.5.7 Mencegah Pelanggaran HAM Berat .....	119
5. BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN .....	121
5.1 Simpulan .....	121
5.2 Saran .....	123

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Peneliti mencermati bahwa diplomasi politik luar negeri Indonesia pada forum multilateral PBB melalui perwakilannya Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York sangatlah kompleks, sehingga tidak seluruh kepentingan nasional dapat tertangani secara optimal. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang dihadapi bangsa-bangsa di PBB, mulai dari isu perdamaian dan keamanan internasional (*international peace and security*); ekonomi, pembangunan dan lingkungan (*economy, development and environmental*); masalah sosial dan kemanusiaan (*social and humanitarian affairs*); hak asasi manusia dan dekolonisasi (*human rights and decolonization*) dan anggaran dan administrasi (*budgetary and administrative issues*). PTRI New York sebagai *front liner* diplomasi multilateral Indonesia dituntut harus mampu memperjuangkan prioritas kepentingan nasional seperti penanganan *sustainable development, Millenium Development Goals (MDGs), peacekeeping operations*, separatisme, residual isu Timor Leste, demokratisasi, perubahan iklim, bantuan kemanusiaan, ataupun isu lain yang menjadi *concern* Indonesia seperti *disarmament*, reformasi PBB, isu Palestina, *interfaith dialogue* dan lainnya.

Peneliti menilai banyak negara anggota PBB tengah menghadapi masalah internal bangsa khususnya separatisme yang telah menjadi isu internasional seperti China (Taiwan dan Tibet), Inggris (Irlandia Utara), Rusia (Chechnya), India (Kashmir), Philippina (Moro), Spanyol (kelompok ETA), Turki (suku Kurdi), Malaysia (Kesultanan Sulu – Serawak) dan masih banyak lainnya. Tidak terlepas dengan Indonesia yang memiliki permasalahan separatisme yakni Aceh, Papua dan Maluku Selatan. Dari ketiga wilayah yang berkeinginan memisahkan diri dari NKRI, peneliti menganggap bahwa masalah separatis Papua perlu mendapat perhatian ekstra dari seluruh pemangku kepentingan, baik oleh Pemerintah Pusat (seperti

Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Mabes TNI, Mabes Polri, Kemendiknas, Kemenkes, Kemen PU, Kementan dan lain-lain), Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat, BIN, BPN, UP4B, pihak swasta, akademisi, NGO/LSM, sampai dengan seluruh Kantor Perwakilan RI di seluruh dunia termasuk PTRI New York, guna mencegah keinginan sekelompok Gerakan Separatis Papua yang menghendaki masuknya agenda isu Papua ke dalam badan-badan utama PBB. Proses lepasnya Timor Leste dari NKRI, proses *unilateral declaration of independence* Kosovo dari Serbia dan proses pisahnya South Sudan dari Sudan ikut memicu kekhawatiran ini (Stevan Vukoti, *The Problem of Defining a State in International Law : A Comparasion of Unilateral Declarations of Independence of Kosovo, Abkhazia and South Ossetia*, VDM Verlag Dr. Muller Press, New York - USA, 2011, hal 23-24). *Trend* pemisahan wilayah dimanfaatkan oleh kelompok anti integrasi Papua yang didukung oleh NGO asing, entitas ataupun individu tertentu sebagai strategi diplomasi paling ampuh.

Sebagaimana diketahui aktivis Papua Merdeka telah membuat strategi internasionalisasi isu Papua melalui komunitas MSG (*Melanesian Spearhead Group*), pembentukan kantor perwakilan di Oxford - Inggris, dan di Den Haag - Belanda. Diyakini bahwa *second track diplomacy* oleh para aktivis Papua Merdeka beserta *support groups* dan *solidarity groups*-nya pada fora regional, internasional dan multilateral semakin meluas dan menguat. Untuk itu perlu mendapatkan penanganan strategis Pemerintah karena beberapa dari langkah *second track diplomacy* aktivis-aktivis Papua Merdeka telah bermuara pada fora multilateral PBB; yakni melalui saluran DK PBB, MU PBB, Sekretariat, Dewan HAM dan ECOSOC dalam hal ini *United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII)* ataupun badan-badan lainnya. Selain itu perlu dipahami dengan seksama prinsip yg sekarang menjadi pedoman para aktivis Papua Merdeka dan simpatisannya di luar negeri bahwa perjuangan *right to self determination* bagi indigenous Papua pasca Pepera 1969 tidak lagi difokuskan kepada upaya membawa permasalahannya kepada saluran hukum resmi, melainkan melalui mobilisasi dukungan dan solidaritas masyarakat internasional dalam rangka *Winning in the 'Court of Public*

*Opinion'* (memenangkan Pengadilan Opini Publik). Upaya *self determination struggle* para aktivis Papua pada berbagai fora regional, internasional dan multilateral PBB dan Non PBB telah membawa hasil tertentu yang perlu mendapatkan perhatian serius dan penanganan Pemerintah.

Untuk menghadapinya perlu solusi cerdas yang terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan melalui penguatan strategi diplomasi di PBB sekaligus berjalan paralel dengan pendekatan kesejahteraan yang humanis yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat Papua. Strategi yang terintegrasi di forum multilateral PBB dengan mengoptimalkan potensi nasional yang dimiliki. Perlunya upaya maksimal seluruh elemen bangsa yang ingin mempertahankan NKRI Harga Mati melalui dukungan untuk menjadikan diplomasi multilateral di markas PBB, sebagai senjata terdepan menghadapi rongrongan separatisme. Sehingga "NKRI Harga Mati" menjadi sebuah realita, bukan sebuah slogan usang semata.

### **1.1.1 Diplomasi Indonesia di PBB**

Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950, melalui Resolusi MU PBB nomor : A/RES/491 (V) tentang Penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa Bangsa (Wikipedia, *Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa*, diakses tanggal 12 Mei 2013, pukul 20.45, lihat pada [http://id.wikipedia.org/wiki/indonesia\\_dan\\_perserikatan\\_bangsa-bangsa](http://id.wikipedia.org/wiki/indonesia_dan_perserikatan_bangsa-bangsa)). Tarik ulur dalam proses diplomasi di ruang sidang PBB yang membawa kepentingan masing-masing negaranya, membuat proses kesepakatan dalam sebuah resolusi atau perjanjian sangatlah rumit. Kepiawaian para diplomat yang ditempatkan di PTRI New York, merupakan diplomat terpilih dan terbaik dari Kementerian Luar Negeri maupun Mabes TNI yang menempatkan Penasehat Militer beserta stafnya. Para diplomat Kementerian Luar Negeri menangani seluruh isu yang ada di PBB, sedangkan Penasehat Militer beserta staf menangani isu yang terkait dengan kepentingan TNI, khususnya pengembangan pasukan pemelihara perdamaian, isu separatisme, hukum laut internasional, hukum udara internasional dan lain-lain. Garis kebijakan luar negeri Indonesia harus dapat mencerminkan

transformasi demokratis di dalam negeri sehingga perlu dukungan dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi efektivitas politik luar negeri Indonesia dalam memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan internasional. Penguatan internasional terhadap posisi Indonesia merupakan modal kuat dalam mengimplementasikan politik luar negeri Indonesia pada periode mendatang. Dalam konteks intermestik (*internasional – domestik*), kinerja diplomasi Indonesia terus diupayakan menuju penguatan, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral. Upaya-upaya diplomasi multilateral dan regional yang akan dilakukan oleh Indonesia selanjutnya harus tetap diperkuat dengan diplomasi bilateral yang tangguh.

Kebijakan luar negeri secara aktif akan berupaya meningkatkan hubungan dengan negara-negara di kawasan ke tataran yang lebih tinggi dan ditujukan pada pencapaian kepentingan nasional (Kemenlu RI, *Landasan, Visi dan Misi Polugri*, diakses tanggal 18 Mei 2013 pukul 10.35, lihat <http://www.deplu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=1&l=id>). Sedangkan untuk kebijakan multilateral sasaran yang hendak dicapai dalam pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional dalam bidang multilateral adalah meningkatnya peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan HAM, kerjasama kemanusiaan serta meningkatnya pembangunan ekonomi, sosial budaya, keuangan, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, investasi, komoditi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual melalui penguatan kerjasama multilateral (Kemenlu RI, *Kerjasama Multilateral*, diakses tanggal 18 Mei 2013, pukul 10.50, lihat <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFP.aspx?P=Multilateral&l=id>). Adanya keinginan Gerakan Separatis Papua yang mencoba kembali meninjau proses *transfer of authority* Papua dari Pemerintah Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Indonesia, membuat seluruh diplomat yang ditugaskan di PBB harus lebih menaruh konsentrasi terhadap masalah ini. Untuk itu perlunya strategi diplomasi yang terintegrasi menangani seluruh masalah bangsa yang dibahas di forum multilateral PBB, khususnya isu disintegrasi yakni masalah internasionalisasi isu Papua.

### **1.1.2 Menguatnya Tuntutan Merdeka Aktivistis Pro “M”**

Ada 4 (empat) masalah lokal yang menyebabkan Aktivistis Pro “Merdeka” atau yang lebih dikenal dengan Pro “M” terus menyuarakan tuntutan mereka untuk lepas dari NKRI (Adriana Elisabeth, Papua Road Map : Bagian Perjalanan Damai Papua, diakses tanggal 12 September 2013, lihat <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/kolom-papua/568-papua-road-map-bagian-perjalanan-damai-papua.html>), yaitu :

#### **1. Anggapan marginalisasi dan diskriminasi politik, ekonomi, maupun sosial-budaya terhadap Orang Asli Papua.**

Anggapan ini dialami Aktivistis Pro “M” ataupun sebagian Orang Asli Papua (OAP) selama bergabung dengan NKRI, yakni sejak tahun 1969 tidak banyak orang Papua yang menduduki jabatan politik yang strategis di Pemerintah Pusat contohnya jabatan sebagai Menteri di Kabinet ataupun Pimpinan Lembaga non Departemen. Seandainya pun ada, para Menteri asal Papua tidak menduduki jabatan kunci (reff: penentu kebijakan politik), seperti Manuel Kasiepo (Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pada Kabinet Gotong Royong), Freddy Numberi (Menteri Perikanan dan Kelautan dilanjutkan Menteri Perhubungan), dan saat ini Balthasar Kambuaya (Menteri Lingkungan Hidup). Orang Papua menganggap jabatan yang diberikan sebagai strategi “barter politik” Pemerintah Pusat, agar Menteri yang berasal dari orang asli Papua mampu meredakan gejolak tuntutan merdeka dan isu lainnya.

Kemampuan ekonomi orang asli Papua selalu kalah apabila dibanding para pendatang termasuk para transmigran yang menjadi program Pemerintah. Realitas roda ekonomi provinsi Papua masih dikuasai oleh para pendatang yang berasal dari Jawa, Sulawesi, Sumatera dan etnis China, hal ini nampak di kota-kota besar seperti Jayapura, Manokwari, Timika, Sorong, Merauke, Nabire dan lainnya dimana pertokoan, mall, kios kelontong dimiliki para pendatang. Peran orang asli dalam roda ekonomi hanya terbatas sebagai pedagang kecil di pasar-pasar tradisional bahkan kebanyakan hanya berdagang di kaki lima dan emper toko,

dengan menjual hasil bumi apa adanya. Kondisi ini sangat timpang, sehingga tuntutan untuk menyetarakan strata ekonomi antara pendatang dengan orang asli harus diwujudkan, meskipun hal ini tidak terlepas dari etos kerja dan semangat yang dimiliki sangat berbeda.

Sosial budaya para pendatang hingga saat ini dinilai masih lebih baik ketimbang orang asli Papua, sebagai contoh peradaban pendatang lebih maju dari mulai dari cara berpakaian, cara bersosialisasi, tingkat pendidikan, ataupun pemahaman terhadap aturan hukum. Memerlukan waktu yang panjang untuk dapat menyetarakan peradaban sosial budaya setara dengan para pendatang. Namun demikian di lain pihak dalam kehidupan beragama orang asli Papua yang mayoritas Kristen dan Khatolik lebih taat dan patuh terhadap ajaran agamanya, hal ini tidak terlepas dari peran para misionaris asing yang sudah melakukan program penginjilan di seluruh pelosok Papua sejak awal tahun 60'an.

## **2. Kasus pelanggaran HAM dan kekerasan negara yang dinilai tidak diselesaikan secara adil.**

Adanya pemikiran sempit dari sebagian kalangan aktivis Pro "M" yang menilai bahwa sejak Papua menjadi bagian integral NKRI telah terjadi *genocide* yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua dalam menegakkan kebijakan. Aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri dinilai secara sistemik telah melakukan pelanggaran HAM terhadap OAP. Menghadapi tuduhan ini, berdasarkan Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, Pemerintah mendirikan Komnas HAM sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia, termasuk permasalahan HAM di Papua yang menjadi sorotan internasional (Komnas HAM, diakses tanggal 16 Agustus 2013, lihat : <http://www.komnasham.go.id/informasi/images-portfolio-6/2013-03-18-05-44-20/nasional/356-keputusan-presiden-republik-indonesia-nomor-50-tahun-1993-tentang-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-presiden-republik-indonesia>).

Menyikapi masalah HAM yang semakin berkembang Pemerintah bersama DPR mengesahkan UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, sekaligus meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* menjadi UU 11/2005 tentang Kovenan Internasional Tentang Hal-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* menjadi UU 12/2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Aktivis Pro “M” dan pegiat HAM Papua selalu mengungkit dan mengedepankan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri pada masa lalu hingga saat ini. Secara skeptis, mereka menilai aparat keamanan sengaja melakukan kekerasan yang berujung pada penahanan sewenang-wenang dan pembunuhan dengan beberapa anggapan atau penilaian seperti :

- a. Menjustifikasi kelompok sipil yang berbeda pandangan sebagai OPM separatis, jadi secara syah harus dibunuh.
- b. Apabila ada kegiatan demonstrasi/unjuk rasa maka pihak berwajib tidak akan mengeluarkan ijin keramaian, sehingga ada alasan untuk dibubarkan paksa.
- c. Aparat intelijen ditengarai terus melakukan teror dan spionasi kepada orang asli Papua yang dicurigai dengan pembentukan opini negatif.
- d. Menutup akses kunjungan internasional termasuk utusan PBB yang akan berkunjung ke Papua, dengan alasan keamanan dan daerah rawan.

Dari sudut pandang penyelesaian HAM, maka dari sekian banyak pelanggaran HAM yang mereka anggap dilakukan TNI/Polri, tidak ada peradilan yang *accountable*, dimana oknum ataupun institusinya dihukum sesuai aturan yang berlaku. Sehingga merekapun membalasnya dengan aksi kekerasan yang juga melanggar HAM guna mendapat perhatian dan pengakuan nasional maupun dunia internasional.

### 3. Adanya anggapan *incomplete transfer of authority* Papua

Aktivis Pro “M” yang mendapat simpatisan dari *support groups* dan *solidarity groups* selalu menyerukan bahwa proses *transfer of authority* wilayah Papua dari Belanda kepada Indonesia tidak beres. Sedangkan PBB melalui situs resmi PBB mencatat sejarah penyerahan kekuasaan Papua sudah tuntas memiliki *legal aspect* yang syah sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, dengan kronologis sebagai berikut :

Wilayah *West New Guinea* (West Irian) atau yang sekarang dikenal Papua Barat diklaim menjadi milik Hindia Belanda sejak 1828, namun ketika Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, status Papua Barat masih belum terpecahkan. Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada November 1949 disepakati *the Charter of Transfer of Sovereignty* dari Pemerintah Belanda kepada Indonesia, namun terkait Papua, Belanda menyatakan “*status quo*” menunggu kesiapan Indonesia, sehingga kendalinya akan tetap di bawah administratif pemerintah Hindia Belanda. Akibat “*status quo*” yang tidak ada penyelesaian, menjadi persengketaan kedua negara semakin meruncing.

Akhirnya pada tahun 1954 Indonesia membawa kasus ini ke PBB, Indonesia mengklaim wilayah Papua sepenuhnya menjadi milik Indonesia, dan harus terbebas dari kolonial Hindia Belanda. Di lain pihak pemerintah Belanda menyatakan bahwa penetapan status Papua Barat akan ditentukan kemudian ketika segala sesuatunya siap. Sengketa Papua Barat dibahas pada sidang umum *General Assembly* (Majelis Umum) sejak tahun 1954 – 1957 dan dilanjutkan pada tahun 1961, namun tanpa sebuah resolusi yang dihasilkan (John Saltford, *The United Nations and Indonesia Takeover of West Papua, 1962 – 1969 : The Anatomy Betrayal*, Routledge Press, New York – USA, 2006, hal 40-41).

Pada Desember 1961, ketika kebencian bangsa Indonesia terhadap Belanda semakin meningkat maka prospek dan negosiasi semakin memburuk, Sekjen PBB U Thant yang ditunjuk sebagai *acting* Sekjen PBB, (*reff : menyusul tewasnya*

*Sekjen PBB Dag Hammarskjöld, akibat kecelakaan pesawat*) mengambil alih sengketa status Papua Barat. U Thant mengusulkan masing-masing *Permanent Representatives (Ambassador to UN)* melakukan pembicaraan yang difasilitasi oleh mantan *US Permanent Representatives*, Ellsworth Bunker. Kedua belah pihak setuju, dan pembicaraan mulai berjalan kembali (Manuel Froehlich, *Political Ethics and The United Nations : Dag Hammarskjöld as Secretary General (The Cass Series on Peacekeeping)*, Routledge Press, New York – USA, 2008, hal 98-99).

Meningkatnya ketegangan antara Indonesia – Belanda terjadi, ketika Indonesia menerjunkan pasukannya di Papua pada tahun 1962 dalam operasi Dwikora. Belanda melakukan protes keras dan menyatakan ini merupakan pelanggaran, namun Indonesia menolak tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa “*Indonesia telah memasuki wilayah Indonesia sendiri, yang saat ini masih diduduki oleh Hindia Belanda yang pada masa lalu diambil dengan kekuatan bersenjata*”. Belanda mengusulkan kepada PBB untuk mengirimkan *UN Observer* ke Papua Barat.

Proses diplomasi yang disponsori *Acting* Sekjen PBB membuahkan hasil, pada tanggal 31 Juli 1962 di UN HQ, New York mengumumkan bahwa sebuah *preliminary agreement* telah disepakati. Pada tanggal 15 Agustus 1962 dibawah *Acting* Sekjen PBB sebagai Ketua dan mediator Ellsworth Bunker, maka *New York Agreement* ditandatangani oleh pemerintah Indonesia – Belanda. Kedua belah pihak meratifikasi instrument perjanjian pada tanggal 20 September 1962, dan pada hari berikutnya tanggal 21 September 1962, *General Assembly* mencatat perjanjian dalam Resolusi MU PBB 1752 (XVII) yang memberi kewenangan kepada Sekjen PBB melanjutkan proses damai, yang selanjutnya dikenal dengan *New York Agreement*.

Perjanjian ini menyatakan bahwa administratif Papua Barat atau *West New Guinea (West Irian)* diserahkan oleh Belanda kepada *United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA)*, yang akan dipimpin oleh *UN Administrator* yang ditunjuk oleh Sekjen PBB dan disetujui kedua pihak bersengketa (Vaughan Lowe,

Adam Robert, Jennifer Welsh and Dominik Zaum, *The United Nations Security Council and War : The Evolution of Thought and Practice since 1945*, Oxford University Press Inc, New York – USA, 2010, 116-117). Di bawah kuasa hukum Sekjen PBB, UNTEA mulai memiliki otoritas sejak 1 Oktober 1962 – 1 Mei 1963, guna penegakan hukum, melindungi hak masyarakat, hingga administratif diserahkan kepada Indonesia. *New York Agreement* juga menyebutkan bahwa Sekjen PBB akan menyiapkan *United Nations Security Force (UNSF)* guna membantu UNTEA untuk mengawasi gencatan senjata lebih efektif. *Act of Free Choice* atau yang lebih dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau kepastian dari suatu pengharapan rakyat Papua, enam tahun setelah administrasi secara formal dan sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah RI yang berdaulat. Sesuai Perjanjian New York, pengalihan pemerintahan di Irian Barat (Papua) dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia melalui UNTEA.

Indonesia tidak hanya melakukan konsultasi dengan PBB dalam pelaksanaan Pepera, tetapi juga selalu menyampaikan perkembangan pelaksanaan Pepera berdasarkan isi Perjanjian New York kepada Belanda. Dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda tanggal 20 – 21 Mei 1969 di Roma, kedua belah pihak mengeluarkan pernyataan bersama yang menggambarkan isi pembicaraan dan kesepakatan yang dicapai antara kedua negara. Pada tanggal 29 Maret 1968, Sekjen PBB menunjuk Dubes Bolivia untuk PBB, Fernando Ortiz Sanz sebagai wakil Sekjen PBB dalam penyelenggaraan Pepera. Pepera dilaksanakan tanggal 14 Juli- 2 Agustus 1969. Dubes Fernando Ortiz-Zans beserta tiga orang stafnya, serta Menteri Luar Negeri RI Adam Malik bersama Dubes Belanda, Australia dan Thailand (Ketua Korps Diplomatik di Jakarta) menghadiri secara langsung Pepera di Merauke. Sebanyak 1.028 orang anggota perwakilan, sepakat memilih Irian Barat (Papua) bersatu kembali dengan Republik Indonesia (Timo Kivimaki, *Initiating Peace Process in Papua : Actors, Issues, Process, and the Role of International Community*, East West Center Washington Press, Washington – USA, 2006, hal 41-42). Pelaksanaan Pepera ini disaksikan oleh Misi PBB yang diwakili oleh Dubes

Fernando Ortiz-Zans beserta tiga orang stafnya, sedangkan Menteri Luar Negeri RI Adam Malik bersama Dubes Belanda, Australia dan Thailand (Ketua Korps Diplomatik di Jakarta) menghadiri secara langsung Pepera di Merauke. Seluruh 1.028 orang anggota perwakilan, sepakat memilih Irian Barat (Papua) bersatu kembali dengan Republik Indonesia.

Walaupun fakta sejarah mengatakan demikian, namun bagi sebagian masyarakat Papua saat ini menilai bahwa Pepera tidak *one man one vote*, sebagaimana layaknya sebuah *self of determination*, mereka menilai *transfer of authority* tidak demokratis karena melalui sistem perwakilan yang suaranya dapat dimanipulasi (Paskalis Kossay, *Konflik Papua ; Akar Masalah dan Solusi*, PT. Gramedia, Jakarta – Indonesia, 2011, hal 41-42).

#### **4. Orang Asli Papua menganggap implementasi UU Otsus gagal.**

Pembangunan di Papua adalah upaya mencari strategi pembangunan yang dapat mengatasi masalah bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan serta infrastruktur. Aspek pembangunan tersebut menuntut adanya kehadiran negara di dalam meletakkan dasar bagi kesejahteraan masyarakat Papua secara umum, khususnya orang asli Papua. Peningkatan dana Otsus Papua yang dialokasikan Pemerintah Pusat dalam APBN ternyata tidak berkorelasi dengan penurunan jumlah dan presentase penduduk miskin di Papua. Sejak pelaksanaan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pemerintah Pusat secara keseluruhan telah menggelontorkan Rp 33,7 triliun untuk Papua. Akan tetapi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, jumlah dan presentase penduduk miskin masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. Sementara alokasi dana otsus terus mengalami peningkatan dari Rp 4,51 triliun (2011), Rp 5,476 triliun (2012) dan Rp 6,222 triliun (2013) (Mohamad Iqbal, Dana Otsus Papua Meningkat, Penduduk Miskin Masih Tinggi, diakses tanggal 23 Agustus 2013, lihat : [http : // www . republika .co .id /berita /nasional /umum /13 /07 /06 /mpivmv-80-persen-dana-otsus-akan-langsung-ke-kabupatenkota](http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/06/mpivmv-80-persen-dana-otsus-akan-langsung-ke-kabupatenkota)).

UP4B dibentuk Pemerintah agar bisa mendorong Otsus untuk lebih tajam dalam mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat, menjadi solusi kebijakan terhadap penanganan Papua secara komprehensif. Program Kementerian/Lembaga (K/L) yang dikembangkan di Papua sudah menyentuh kebutuhan masyarakat dengan mengembangkan pelayanan bagi masyarakat yang berada di gunung, lembah, rawa-rawa, pinggiran sungai dan pantai. Ini sebagai bukti bahwa negara hadir. Secara aktif, petugas Pemangku Kabupaten/Kota dari UP4B telah melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan berbagai kegiatan K/L yang didanai APBN. Pola ini terus ditingkatkan dengan lebih aktif mendatangi dan membangun hubungan dengan daerah. Pemangku langsung berdialog dengan Bupati/Walikota, kemudian turun ke distrik/kampung. Mereka melakukan monitoring dan evaluasi bersama pemerintah daerah bahkan dengan pemerintah pusat. Ketika UP4B keberadaannya untuk mendorong percepatan di segala sektor strategis. Makna percepatan adalah pemihakan kepada orang asli Papua agar tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah lain di luar Papua.

Pada akhir April 2013, Gubernur Papua Lukas Enembe bersama pimpinan MRP dan DPRP bertemu Presiden RI di Jakarta. Salah satu agendanya adalah menyampaikan konsep baru tentang Otsus Plus kepada Presiden. Otsus Plus adalah Otsus yang diperluas kewenangan bagi *stake holder* di Papua yang ditujukan untuk kepentingan OAP. Kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat juga didistribusikan ke Pemerintah Daerah, baik di bidang pembangunan fisik/non fisik maupun pembagian keuangan yang adil. Pelaksanaan evaluasi Otsus ini adalah salah satu bentuk perhatian Pemerintah untuk menata Papua lebih baik lagi. Terobosan untuk mempercepat kemajuan sudah banyak dibuat, namun masih banyak pula yang belum mencapai target.

Pembangunan Papua yang dinilai kurang berhasil dan belum setara dengan provinsi lainnya dinilai bukan hanya kesalahan kebijakan Pemerintah Pusat, sebagai yang ditudingkan aktivis pro "M", namun juga diakibatkan oleh para pejabat orang asli Papua yang duduk sebagai Gubernur, Bupati dan aparat pemerintah

yang secara sistemik melakukan tindakan korupsi. Selain itu hambatan alam dalam pembangunan infrastruktur dan ketidaksiapan orang asli Papua sendiri untuk menerima perubahan. Tuntutan merdeka tidak membuat rakyat sejahtera bahkan sebaliknya, potensi konflik tidak akan pernah selesai, namun pembangunan yang konkrit para koridor negara kesatuan akan mempercepat pembangunan fisik dan non fisik bagi rakyat Papua secara menyeluruh.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang dijabarkan tersebut di atas serta untuk memudahkan menganalisa permasalahan, peneliti merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana strategi diplomasi Indonesia di PBB dalam rangka mencegah masuknya pembahasan agenda Papua ke dalam badan-badan utama (*main body*) dan badan turunan (*subsidiary body*) PBB ?

2. Bagaimana strategi nasional bagi masyarakat Papua dengan mengedepankan *smart approach*, guna mencegah internasionalisasi isu Papua yang dilakukan oleh aktivis pro "M" dengan didukung oleh *support groups* dan *solidarity groups* ?

## 1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi diplomasi Indonesia di forum multilateral PBB, yang dilakukan oleh para diplomat dari Kementerian Luar Negeri dan diplomat TNI yang ditempatkan di PTRI New York, serta instansi lain dalam berbagai macam delegasi dalam menangani isu-isu krusial bangsa khususnya isu prioritas yakni mencegah masuknya agenda Papua dalam badan-badan utama (*main body*) dan badan turunan (*subsidiary body*) PBB. Selain itu sejalan strategi diplomasi juga untuk meneliti strategi nasional apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat bersama seluruh *stakeholder* agar Papua tetap dalam bingkai NKRI.

Signifikansi penelitian agar Pemerintah Indonesia melalui PTRI New York selaku perwakilannya di PBB dapat menjalankan strategi yang tepat untuk mencegah isu Papua masuk dalam agenda badan-badan PBB. Bersamaan dengan hal tersebut diharapkan adanya kebijakan yang komprehensif sebagai kebijakan *smart approach* yang diterapkan Pemerintah bersama pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat Papua, sehingga terwujud masyarakat Papua yang sejahtera dan dapat hidup damai di Tanah Papua.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat praktis.**

Memberikan masukan mengenai strategi diplomasi Indonesia di PBB yang harus diprioritaskan untuk mencegah masuknya isu Papua ke dalam badan-badan utama (*main body*) dan badan turunan (*subsidiary body*) PBB yang pada muaranya akan menjadi agenda bahasan pada setiap persidangan serta memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam mengimplementasikan kebijakan *smart approach* untuk lebih mengedepankan kesejahteraan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat Papua.

### **1.4.2 Manfaat akademis**

Memberikan kontribusi pada studi di Universitas Pertahanan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan isu Papua serta memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya, terutama dalam mengembangkan strategi diplomasi Indonesia pada forum multilateral lainnya dan strategi mencegah internasionalisasi isu Papua yang dilakukan oleh aktivis pro “M”.

## **1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian**

Ruang Lingkup penelitian dibatasi pada langkah langkah strategi diplomasi Indonesia yang dilakukan oleh PTRI New York sebagai garis depan diplomasi Indonesia di Markas PBB New York untuk mencegah masuknya agenda Papua ke dalam salah satu badan-badan utama (*main body*) dan badan turunan (*subsidiary*

*body*) PBB. Selain itu akan menjelaskan bagaimana upaya konkrit Pemerintah yang didukung oleh pemangku kepentingan di dalam negeri untuk mencegah upaya-upaya internasionalisasi isu Papua ke forum internasional melalui pendekatan “memanusiakan orang Papua”.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Diplomasi mencakup satu set kedudukan yang saling berkaitan antara hukum dan politik, kebijakan domestik dan luar negeri, agen yang menjalankan dan struktur yang mendukungnya. Ini adalah sebuah praktek sosial untuk membentuk kebutuhan-kebutuhan atau pilihan-pilihan ke dalam bahasa hukum (Ian Hurd “*Law and The Practice of Diplomacy*”, *International Journal*, Summer, 2011:591). Diplomasi adalah dunia yang dibentuk oleh praktek-praktek yang memberikan arti kepada tindakan internasional, yang membuat interaksi strategis dan keamanan dimungkinkan terjadi, diciptakan kembali, dirubah, dan didorong ke arah yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Selain itu merupakan bagian inheren dalam aktivitas negara dan publik dengan menggunakan sumberdaya sosial dari dunia politik, mulai dari maksud yang dikandung, konsep-konsep dan sejarahnya.

##### 2.1.1 Kerangka Teoritis

1. Sebagaimana tercantum dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations* tahun 1961 pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa fungsi-fungsi dari diplomasi adalah :

a. Sebagai perwakilan negara yang ditempatkan pada negara lain (*representing the sending State in the receiving State*)

b. Memberikan perlindungan bagi warga negaranya sesuai dengan hukum internasional (*protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by internasional law*)

c. Melakukan negosiasi dengan pemerintah negara akreditasi (*negotiating with the Government of the receiving State*)

d. Mempelajari dengan mematuhi hukum negara setempat terkait perkembangan di negara akreditasi dan melaporkan kepada pemerintahnya (*ascertaining by all lawfull means conditions and developments in the receiving State, and reporting there on the Government of the sending State*)

e. Mempromosikan persahabatan antar kedua negara dan mengembangkan kerjasama ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan (*promoting friendly relations between the sending State and receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations*)

Wujud diplomasi multilateral telah mengambil porsi yang besar dalam diplomasi abad 21, hal paling nyata adalah perubahan luar biasa yang diciptakan melalui perjanjian dan kesepakatan yang dibuat. Negosiasi multilateral atau pelibatan banyak pihak tujuannya untuk membentuk perjanjian internasional yang mengikat pihak-pihak yang terlibat. Dengan beragam isu yang dinegosiasikan secara multilateral, maka derajat kompleksitas pengetahuan agen-agen dituntut sangat tinggi baik secara substantif maupun prosedural.

2. Beberapa referensi yang relevan sebagai kerangka teoritis dalam penelitian diantaranya :

a. Diplomasi merupakan seni melakukan negosiasi

G.R. Berridge seorang Emeritus Professor pada International Politics, University of Leicester, UK, dalam bukunya "*Diplomacy : Theory and Practice*" menyatakan diplomasi merupakan seni dan tindakan untuk melakukan negosiasi-negosiasi diantara perwakilan masing-masing negara. Proses negosiasi biasanya dilakukan oleh diplomat profesional, adapun hal-hal yang dibicarakan mencakup pencapaian proses penyelesaian konflik, perdagangan, ekonomi, budaya, lingkungan ataupun hak asasi manusia. Aktivitas diplomasi harus didukung data dan profesionalisme karena harus mampu mengemban pesan dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara (G.R. Berridge, *Diplomacy : Theory and Practice*, Palgrave Macmilan Publisher Limited, New York – USA, 2010) Diplomasi

sebagai ujung tombak negara untuk mencapai tujuan utama kebijakan politik luar negerinya namun tanpa menggunakan kekuatan bersenjata dan propaganda. Diplomasi merupakan komunikasi antara pejabat pemerintah untuk mempromosikan kebijakan luar negerinya melalui perjanjian formal, pendekatan informal, pengumpulan informasi, penjelasan kepentingan nasionalnya dan penyampaian keinginan kerjasama kepada pihak lain. Penyelenggaraan diplomasi negara lazimnya dilaksanakan oleh *Ministry of Foreign Affairs* (Kementerian Luar Negeri) dan didukung oleh Kementerian Teknis lain yang berkompeten dalam bidangnya.

Merujuk dari teori yang dijelaskan oleh G.R. Berridge, bahwa diplomasi sebagai ujung tombak negara untuk mencapai tujuan utama kebijakan politik luar negerinya, demikian juga dengan Indonesia yang menempatkan perwakilannya yakni PTRI New York untuk menangani seluruh isu multilateral di PBB. Sebagian besar diplomat yang ditempatkan berasal dari Kementerian Luar Negeri, namun untuk menangani isu khususnya terkait *international peace and security* juga ditempatkan Penasehat Militer beserta stafnya yang berasal dari Mabes TNI.

b. Diplomasi harus membawa keuntungan bagi bangsa

Douglas E. Noll dalam bukunya yang berjudul "*Elusive Peace : How Modern Diplomatic Strategies Could Better Resolve World Conflicts*" menyatakan bahwa metode diplomasi yang dilakukan pada abad 18 tidak bisa meredam konflik internasional bahkan sangat membahayakan masyarakat dunia (Douglas E. Noll, *Elusive Peace : How Modern Diplomatic Strategies Could Better Resolve World Conflicts*, Prometheus Books, New York – USA, 2011). Sebagai contoh diplomasi pada masa perang dingin merupakan diplomasi yang penuh pura-pura yang dilakukan pada forum PBB, sedangkan dalam waktu bersamaan masing-masing negara meningkatkan kepemilikan dan kemampuan senjata pemusnah massal seperti nuklir, biologi dan kimia. Hampir selama 40 tahun negara pemilik nuklir (*nuclear weapon states*) tidak dapat mencapai kesepakatan untuk melakukan *disarmament*, sebaliknya meningkatnya produksi senjata hulu ledak nuklir yang

sangat membahayakan masyarakat dunia. Sedangkan strategi diplomasi modern terkait perdamaian yang sulit dicapai harus dicari solusi melalui proses mediasi dan negosiasi yang dilakukan oleh mediator, negosiator dan seseorang yang memiliki keahlian dan pengetahuan sebagai orang yang mampu menciptakan damai. Douglas E. Noll menjelaskan negosiasi para diplomat memiliki makna sama dengan seni jual beli (*mercantile art*) sehingga para diplomat yang terlibat dalam proses negosiasi membutuhkan pemahaman dari teori pemecahan konflik dan keahlian mengoptimalkan penyelesaiannya. Dalam *Elusive Peace*, Douglas E. Noll menjelaskan bagaimana perdamaian sulit diwujudkan, hal ini disebabkan sistem penyelesaian yang bias, untuk itu *peacemaker* perlu memahami persepsi yang berbeda, keyakinan, kekhawatiran ataupun identitas sosial untuk mencapai penyelesaian konflik.

Merujuk buku Douglas E. Noll maka para diplomat harus memahami makna *mercantile art* dalam mengemban misi mengutamakan kepentingan nasionalnya. Makna hakikinya adalah setiap dalam proses lobi, mediasi dan negosiasi harus mendapatkan keuntungan ataupun kelebihan yang dapat diberikan kepada bangsa, bukan sebaliknya lebih banyak kerugiannya.

c. Diplomasi bukan untuk mengalahkan musuh melainkan mengubah musuh menjadi kawan.

Dr. Ranny Emilia Mphil merupakan dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP di Universitas Andalas, Sumatera Barat Yang menulis buku “Praktek Diplomasi” menjelaskan bahwa praktek diplomasi tidak seharusnya dikuasai oleh negara maju saja, namun diplomasi harus membuat setiap pemerintah bisa memenuhi tanggungjawabnya dan melengkapinya dengan keadilan, menunjukkan empati kepada nasib manusia negara lain, mau memberikan pertolongan sukarela, memiliki kepedulian yang dalam pada masa depan kehidupan, serta menghormati hukum dan etika internasional.

d. Sejarah peran PBB dalam proses masuknya Papua ke dalam NKRI.

John Saltford yang memperoleh gelar Ph.D. untuk disertasi *United Nations and West Papua*, dari University of Hull, AS, dalam bukunya "*The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962 – 1969*" menjelaskan peran komunitas internasional dalam proses penyerahan wilayah *West Papua/Irian Jaya* yang merupakan koloni Belanda kepada Indonesia pada era tahun 1960-an dan membuktikan berbagai pertanyaan yang meragukan proses *right of self determination* rakyat Papua yang difasilitasi oleh PBB (John Saltford, *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962 – 1969*, Routledge Curzon, New York – USA, 2003). Memang pada saat itu beberapa pihak terlibat dalam diskusi seperti Indonesia, Belanda, Amerika, Uni Sovyet, Australia dan Inggris, namun akhirnya implementasi perjanjian dilakukan oleh peran sentral PBB pada tahun 1962. Sebagai penjamin (*guarantor*), untuk sementara PBB mengambil alih kewenangan atas West Papua dari Belanda sebelum diserahkan kendalinya kepada Indonesia tahun 1963. Setelah selama 5 (lima) tahun Papua dibawah pemerintahan Indonesia, PBB kembali ke West Papua untuk memonitor dan mengakui proses *self of determination* yang dinilai kontroversi dengan menghadirkan perwakilan pemilih sebanyak 1.028 orang Papua yang menolak untuk merdeka dan tetap ingin bergabung dengan Pemerintah Indonesia.

John Saltford dalam bukunya dapat menjelaskan secara rinci kronologis sejarah Indonesia sejak merdeka 17 Agustus 1945 sampai dengan *Act of Free Choice* (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969. Bahwa proses pengambilan suara dari beberapa kabupaten yang menjadi perwakilan tercatat dengan baik, dan memiliki fakta-fakta hukum yang kuat. Kepiawaian Presiden Indonesia Sukarno yang didukung para diplomat pada forum internasional, telah menggalang keberpihakan dunia kepada Indonesia. Selain itu untuk meyakinkan dunia bahwa Papua memang bagian terintegrasi Indonesia, baik dari aspek geografi maupun keinginan masyarakatnya pada saat itu untuk secara bulat menjadi satu bangsa dengan bangsa Indonesia.

### 2.1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait masalah Papua sudah cukup banyak dilakukan oleh korporasi, entitas maupun perorangan, baik ditinjau dari aspek antropologis yang berhubungan dengan kehidupan suku dan budaya ataupun secara politis baik dari tinjauan Pertahanan Wilayah, Pembangunan maupun Otonomi Khusus.

#### 1. Vemmy Richard

Penelitian yang dilakukan oleh Vemmy Richard Mahasiswa Kajian Sratejik Inteijen (KSI) Universitas Indonesia pada tahun 2011 telah membuat tesis mengenai “Potensi Ancaman Separatis Gerakan Papua Merdeka Terhadap NKRI”, namun penelitian tersebut hanya terbatas pada deskripsi ancaman yang akan ditimbulkan Organisasi Papua Merdeka.

#### 2. Stepi Anriani

Penelitian yang sedikit berbeda dilakukan oleh Stepi Anriani pada tahun 2012 Mahasiswa Kajian Sratejik Inteijen (KSI) Universitas Indonesia telah membuat tesis dengan judul “Kontra Intelijen Indonesia Dalam Menghadapi Konspirasi Asing (Studi Pada Gerakan Papua Merdeka), yang terbatas pada aspek kegiatan intelijen asing yang bermain pada beberapa organisasi yang mendukung Papua merdeka.

#### 3. Dr. Hanita Margaretha

Dosen Pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia pada tahun 2002 telah membuat tesis yang berjudul “Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan Dengan Negara Tetangga Dalam Perspektif Ketahanan Nasional (Studi Kasus Daerah Perbatasan Kalimantan, Papua dan Timor Barat)”. Tesis ini menggambarkan tentang perbatasan Indonesia yang sangat rentan dan diperlukannya Strategi Pertahanan, khusus di wilayah perbatasan khususnya dalam rangka menegakkan kedaulatan bangsa.

#### 4. Tim Peneliti *Center For Defense Boundary Reasearch (CBDR)* UNHAN

Salah satu tulisan dari Tim Peneliti *Center For Defense Boundary Reasearch (CBDR)* UNHAN yang berjudul “Menggali Mutiara Perekat Bangsa di Perbatasan Timur Papua sebagai bagian dari Upaya Bela Negara” terkait dengan upaya mencegah munculnya ide separatisme yang bermuara pada disintegrasi bangsa menjelaskan bahwa pembangunan pertahanan ideal wilayah perbatasan di Papua-PNG yang terbebas dari korupsi, selain diperlukan adanya perkuatan pertahanan dengan kemampuan mobilitas udara yang tinggi juga diperlukan sistem integrasi simbiosis mutualistis tinggi antara Pemerintah Daerah, aparat keamanan TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, dan dewan Adat Papua. Adapun model bela negara bagi rakyat atau pemuda-pemudi Papua untuk meningkatkan nasionalismenya dan patriotismenya terhadap NKRI adalah: Pertama, percepatan pembangunan kesejahteraan putra daerah asli Papua. Kedua, percepatan pembangunan SDM putra-putri Papua, Ketiga, sosialisasi bela negara bekerjasama dengan Dewan Adat Papua, Tokoh Agama Papua, FKPPi Papua, Kesbangpol Papua sebagai wakil Pemerintah Daerah Papua. Keempat, sosialisasi bela negara dari pusat ke Papua. Kelima, *affirmative action policy* berupa perekrutan putra-putri Papua untuk menjadi anggota militer dan sosialisasi arti perbatasan antar negara RI-PNG kepada putra-putri Papua. Selain itu Pemerintah Daerah Papua tidak ikut melakukan tertib sipil merupakan indikasi adanya advokasi atau pembiaran terjadinya konflik vertikal dan konflik horizontal di Papua. Di samping itu campur tangan pihak asing dalam hal itu juga tampak cukup kuat memberikan insentif bagi berlanjutnya konflik vertikal dan konflik horizontal di Papua. Kondisi itu menjadi alasan Pemerintah daerah Papua kepada Pemerintah Pusat tentang kegagalan pelaksanaan Otsus di Papua. Sehingga Pemerintah Pusat masuk dalam posisi sebagai pihak yang tertekan.

Dari penelitian di atas menyatakan betapa pentingnya hubungan sosial antar masyarakat untuk membentuk komunitas yang solid dengan dukungan semua pihak terutama Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Permasalahan disintegrasi muncul

akibat lemahnya pengelolaan terhadap aset yang ada seperti keanekaragaman suku/etnis, sumber daya alam ataupun kondisi geografis yang masih alami. Hal inilah yang harus dikelola bukan semata-mata untuk kepentingan pusat tetapi lebih dikedepankan kepentingan masyarakat lokal, sehingga diyakini ide merdeka akan semakin terkikis.

Dari beberapa penelitian di atas tidak ada yang menyinggung tentang bagaimana strategi diplomasi yang tepat sasaran Indonesia di PBB untuk diagendakannya isu Papua ke dalam badan utama (*main body*) dan badan turunan (*subsidiary body*) PBB, sehingga posisi Papua sampai kapanpun tetap dalam bingkai NKRI.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

1. Diplomasi pencegahan (*preventive diplomacy*) dikemukakan pertama kali oleh Sekjen PBB pada era perang dingin tahun 1960-an. Diplomasi pencegahan merupakan suatu bentuk diplomasi yang digunakan untuk mencegah perselisihan antar negara, untuk mengatasi persoalan perang, atau mencegah agar konflik tidak menyebar ke tempat-tempat lain (Dra.Ranny Emilia, M Phil, *Paktek Diplomasi*, Baduose Media, Jakarta 2013).

Diplomasi preventif dijalankan oleh negara-negara untuk mencegah meluasnya konflik dan menghindari perang. Diplomasi preventif juga dijalankan AS untuk menanggulangi permasalahan terorisme. Pada kasus ini AS menjalankan strategi pencegahan dengan memberikan dana untuk memerangi terorisme.

Untuk menjalankan diplomasi preventif ada 3 (tiga) syarat untuk keberhasilannya. Pertama, dilaksanakan secepatnya sebelum ketegangan menjadi buruk atau berkembang menjadi perang terbuka. Untuk itu maka sebab-sebab konflik harus diketahui secara tepat. Kedua, negara yang menjalankan diplomasi ini harus menerima kenyataan bahwa permasalahan itu tidak bisa diselesaikan hanya oleh pihak-pihak yang konflik. Lebih awal harus menerima campurtangan pihak lain, yang berkemungkinan akan menjadi area untuk dilakukan pencegahan. Ketiga,

biasanya diplomasi ini dilaksanakan dengan jenis-jenis tindakan yang khusus seperti bantuan ekonomi dan pasukan penjaga perdamaian sebagai alat untuk menyukseskannya, karena itu keterlibatan negara-negara dengan kekuatan militer dan ekonomi yang besar menjadi sangat penting dalam pelaksanaannya.

2. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan beberapa referensi di atas bahwa diplomasi harus mampu memainkan peran sebagai alat untuk pencapaian *national interest* bangsa Indonesia pada forum multilateral PBB, baik berupa kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Pentingnya melakukan penelitian terhadap strategi yang menjadi prioritas dan seyogyanya diaplikasikan oleh para diplomat Indonesia yang ditempatkan di PTRI New York untuk menangani seluruh isu multilateral di forum PBB.

3. Beberapa hal yang akan menjadi *stressing point* dalam penelitian terkait dengan peran diplomasi Indonesia di forum PBB adalah :

a. Strategi diplomasi Indonesia yang telah dilaksanakan selama ini oleh para diplomat Indonesia dari Kementerian/Lembaga khususnya Kementerian Luar Negeri dan Mabes TNI yang ditempatkan di PTRI New York dalam rangka mencegah masuknya isu Papua ke dalam agenda badan-badan PBB.

b. *Strategi nasional "smart approach"* Pemerintah yang didukung oleh Kementerian/Lembaga dan seluruh pemangku kepentingan, agar Papua tetap menjadi bagian integral NKRI.

4. Adapun capaian yang diinginkan dari pembahasan dan penulisan tesis ini adalah :

a. Terwujudnya diplomasi Indonesia yang profesional dan diakui oleh dunia internasional, khususnya di forum multilateral PBB dalam memperjuangkan *national interest*.

b. Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat beserta seluruh *stakeholder* dapat bersinergi secara positif dalam

mengimplementasi kebijakan *smart approach* bagi kesejahteraan dan rasa aman masyarakat Papua secara menyeluruh, sehingga Papua tetap menjadi bagian integral dari NKRI.

### **2.2.1 Peningkatan Diplomasi Indonesia di PBB**

Kekuatan diplomasi Indonesia di PBB sepenuhnya ditujukan untuk memproyeksikan kepentingan dalam negeri Indonesia kepada dunia internasional khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempertahankan keutuhan integritas teritorial Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa para diplomat diseleksi dari pemuda-pemudi terbaik bangsa yang tentunya memiliki kemampuan pengetahuan dan bahasa asing di atas kemampuan rata-rata, mengingat pengetahuan dan bahasa sebagai media untuk dapat memperjuangkan kepentingan bangsa di fora internasional. Tanpa kemampuan tersebut maka diplomasi Indonesia akan menjadi bulan-bulanan para diplomat asing yang sudah sangat piawai berdiplomasi untuk memperjuangkan kepentingan negaranya. Proses penempatan (*posting*) pada kantor perwakilan RI di luar negeri sangatlah selektif, didasarkan pada kemampuan para diplomat masing-masing. Pemerintah Indonesia telah mengoptimalkan proses seleksi, pendidikan dan penempatan para diplomatnya di kantor perwakilan khususnya di PTRI New York, namun apabila tanpa adanya dukungan dari seluruh Kementerian/Lembaga terkait akan sangat sulit untuk bisa memiliki data yang memadai untuk pembahasan dalam sidang. Untuk itu dukungan data dari Kementerian/Lembaga yang dimuarakan ke PTRI New York akan sangat berarti bagi kepentingan bangsa. PTRI New York akan menghimpun seluruh data dari Kementerian/Lembaga yang akan dibahas di sidang PBB, untuk pelaksanaan sidang PTRI New York sering mengundang perwakilan dari Kementerian/Lembaga yang berkompeten untuk turut serta hadir. Hal ini untuk lebih menguatkan perang diplomasi Indonesia yang didukung oleh unsur teknis yang sangat memahami permasalahan di masing-masing Kementerian/Lembaganya.

Mabas TNI juga menempatkan Penasehat Militer (*Military Adviser*) dan Wakil Penasehat Militer (*Deputy Military Adviser*) yang bertugas menjadi penasehat Kepala Perwakilan/Watapri terkait dengan urusan kerjasama militer Indonesia pada forum multilateral PBB, seperti kontribusi dalam *peacekeeping operations*. Selain tugas pokoknya untuk mengembangkan kuantitas dan kualitas pengiriman *Indonesia peacekeepers* pada berbagai *UN Mission*, Penasehat Militer juga harus mencermati *thematic issues* yang berkembang pada berbagai sidang di PBB, terutama terkait integritas NKRI, *international law*, *humanitarian law* dan *human rights* yang terkait dengan kepentingan TNI serta isu lainnya. Khusus masalah integritas NKRI, maka Penmil mencermati segala isu terkait Papua, dimana pada saat ini keinginan aktivis Papua pro “M”, *solidarity groups* dan *support groups* berupaya mengagendakan isu Papua ke dalam salah satu badan-badan utama PBB.

### **2.2.2 Mencegah masuknya isu Papua ke dalam agenda PBB**

Gerakan Separatis Papua yang dibedakan menjadi Gerakan Separatis Bersenjata Papua (GSBP) dan Gerakan Separatis Politik Papua (GSPP) memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari NKRI. Perjuangan GSBP melakukan aksi bersenjata merongrong kredibilitas Pemerintah dengan aksi perlawanan terhadap aparat keamanan TNI/Polri yang bertugas, selain itu melakukan aksi-aksi kriminal yang mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Sejauh ini aksi perjuangan GSBP belum mampu mewujudkan idealismenya untuk memisahkan dari NKRI, bahkan selalu mendapat perlawanan dari aparat keamanan. Menghadapi kenyataan bahwa perjuangan bersenjata kurang berhasil, maka GSPP mulai melakukan aksi internasionalisasi isu Papua melalui individu/entitas/LSM yang bersimpati terhadap perjuangan mereka, serta langkah diplomasi melalui organisasi multilateral seperti PBB. Dengan melihat *trend* perkembangan global, yakni proses lepasnya Timor Leste dari Indonesia, merdekanya Kosovo dari Serbia dan pisahnya South Sudan dari Sudan, yang diakui PBB maka GSPP melihat langkah diplomasi

melalui internasionalisasi isu Papua melalui forum PBB merupakan salah satu strategi paling ampuh untuk dapat memisahkan diri dari NKRI.

PBB sebagai organisasi multilateral dinilai paling *credible* oleh seluruh bangsa di dunia, dibangun berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional untuk mencegah terulangnya perang dunia dengan mengedepankan *international peace and security*, mengembangkan hubungan antar bangsa berdasarkan persamaan hak serta mewujudkan kerjasama internasional bidang ekonomi, sosial, budaya dan mendorong kebebasan fundamental tanpa diskriminasi. PBB dibentuk sebagai *centre for harmonizing of nations* untuk mengakomodasi seluruh kepentingan bangsa dunia, memiliki 6 (enam) badan utama yakni Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan Keamanan (*Security Council*), Dewan Ekonomi Sosial (*Economic Social Council*), Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*), Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dan Sekretariat. Aktivis pro “M” menggunakan segala cara untuk mencoba memasukkan isu Papua menjadi salah satu agenda pembahasan dalam badan utama PBB, dengan harapan akan ada langkah dunia melalui PBB untuk meninjau kembali proses *transfer of authority*, yang pada akhirnya dilaksanakan referendum untuk *Act of Free Choice* model baru. Hal inilah yang menjadi *concern* penulis menuangkan dalam bentuk penelitian, bagaimana hal ini untuk dapat dicegah, strategi apa yang digunakan sehingga keinginan Gerakan Separatis Papua dapat dieliminir.

### **2.2.3 Kemungkinan *entry point* masuknya isu Papua ke dalam agenda PBB**

Forum PBB merupakan target utama dari seluruh kampanye dan strategi diplomasi gerakan separatisme Papua. Sasarannya adalah untuk menarik simpati dan dukungan internasional sebagai jalan bagi masuknya isu Papua ke dalam agenda PBB. Tujuannya adalah untuk meminta PBB memasukkan kembali peninjauan status Papua yang pada akhirnya akan membuka jalan satu-satunya bagi sebuah proses perlepasan diri dan kemerdekaan wilayah Papua dari Republik Indonesia (Pieter Drooglever, *An Act of Free Choice : Decolonisation and the Right*

*to Self Determination in West Papua*, One World Publications, Oxford – England, 2009, h 78 – 79).

Saat ini masuknya isu Papua dapat dilakukan oleh negara-negara anggota, organisasi negara kawasan seperti *Melanesian Spearhed Group* (MSG) ataupun *Pacific Island Forum* (PIF), NGO/LSM melalui jalur institusional formal seperti Badan-badan utama PBB (*main body*) seperti MU PBB, DK PBB, Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat ataupun badan turunan PBB (*subsidiary body*) seperti Dewan HAM PBB, Komite Dekolonisasi (C-24), UNPFII dan lainnya. Lobby-lobby ini sudah dan akan terus dilakukan oleh beberapa tokoh politik atau intelektual, baik yang berasal dari Papua maupun simpatisan dari negara lain. Pendekatan ini dilakukan melalui diskusi/seminar di institusi pendidikan dan penelitian yang cukup berpengaruh atau korespondensi langsung tokoh-tokoh ini dengan institusi PBB dan organ-organ terkait didalamnya. Selain itu, *opinion* dan *media coverage* yang negatif atas isu Papua dapat pula mempengaruhi persepsi massa atas isu ini.

## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian

##### 3.1.1 Subjek Penelitian

Sumber data yang akan dijadikan subjek penelitian adalah para diplomat Indonesia yang saat ini menjabat atau pernah bertugas di PTRI New York termasuk Penasehat Militer RI dan Wakil Penmil RI, Kemenlu RI (Dirjen Multilateral Direktur KIPS), Kemenkopolhukam (Desk Papua), Staf Operasi Mabes TNI, Staf Intelijen Mabes TNI, Kodam XVII/CEN (Asintel) dan pejabat terkait lainnya di tingkat Mabes TNI. Melalui wawancara dan diskusi dengan subjek penelitian, maka data yang diperoleh dari sumber-sumber dimaksud akan menjadi data primer dalam penelitian.

##### 3.1.2 Objek Penelitian

Objek penelitian di luar negeri akan dilakukan pada organisasi PBB sebagai forum diplomasi multilateral seluruh bangsa dunia dan PTRI New York yang merupakan wadah strategi diplomasi Indonesia yang akan dibahas di PBB. Penelitian di PBB dilakukan melalui produk-produk hukum berupa konvensi, traktat maupun resolusi yang dihasilkan oleh badan-badan utamanya, sedangkan penelitian di PTRI New York berupa laporan tahunan dan pernyataan sebagai strategi bangsa Indonesia menghadapi semua isu internasional. Untuk instansi dalam negeri akan dilakukan pada Kemenkopolhukam, Kementrian Luar Negeri, Mabes TNI, Kodam XVII/CEN dan instansi lain yang terkait. Selain itu objek penelitian lain dapat berupa dokumen-dokumen yang diambil dari hasil sidang di PBB, *statement* dan pidato (*speech*) maupun buku, literature, koran, internet dan sumber lain terpilih yang sangat relevan dengan penelitian.

### 3.2 Desain Penelitian

Peneliti akan menggunakan desain penelitian kualitatif dalam penulisan Strategi Diplomasi Indonesia di PBB Dalam Rangka Mencegah Lepasnya Papua dari NKRI. Demikian pula untuk penelitian studi kasus akan menggunakan penelitian kualitatif seperti kasus bagaimana diplomasi Indonesia mencegah masuknya isu Papua ke dalam agenda badan utama PBB dan bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah internasionalisasi isu Papua yang dilakukan oleh para aktivis Papua Merdeka melalui *national grand strategy* yang konkrit untuk Papua. Penelitian lapangan akan dilakukan di Jakarta dan PTRI New York melalui komunikasi telepon dan email. Penelitian lapangan akan dilakukan melalui wawancara pada beberapa pihak yang sangat berkompeten.

Peneliti menilai metode kualitatif tepat digunakan untuk penelitian ini. Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *explanatory case study* ini dapat dianggap tepat untuk menjawab pertanyaan (*research question*) yang menjadi fokus penelitian, yaitu :

1. Bagaimana strategi diplomasi Indonesia di PBB dalam rangka mencegah masuknya pembahasan agenda Papua ke dalam badan-badan utama (*main body*) dan badan turunan (*subsidiary body*) PBB ?
2. Bagaimana strategi nasional bagi masyarakat Papua dengan mengedepankan *smart approach*, guna mencegah internasionalisasi isu Papua yang dilakukan oleh aktivis pro "M" dengan didukung oleh *support groups* dan *solidarity groups* ?

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam penyusunan tesis ini, dilakukan pengumpulan data yang tepat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan dalam analisis penelitian ini. Teknik pengumpulan data sangat penting dalam

penelitian, mengingat tujuan utama sebuah penelitian adalah memperoleh data yang *valid* dan *up to date*.

### **3.3.1 Wawancara**

Metode wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan informasi primer dari pejabat atau personil sebagai nara sumber yang berkompeten terkait peran diplomasi Indonesia di forum multilateral PBB dan mekanisme penambahan jumlah Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB. Wawancara akan dilakukan kepada pejabat Kementerian Luar Negeri, Sops TNI, Sintel TNI dan PTRI New York melalui koresponden dan telepon beberapa pihak lain yang relevan dengan penelitian ini.

### **3.3.2 Studi Kepustakaan**

Data yang akan diambil dalam studi kepustakaan seperti laporan, pidato dan *statement* resmi dari berbagai sidang yang diikuti oleh para diplomat PTRI New York. Selain itu data diambil dari tulisan yang telah dipublikasikan, buku-buku, journal, koran, internet, serta dokumen resmi Pemerintah, PBB maupun LSM yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.

## **3.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

### **3.4.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kemenkopolhukam, Kementerian Luar Negeri dan Mabes TNI - Jakarta, serta PTRI New York - USA melalui sarana telpon dan email. Sedangkan studi kepustakaan di Kemenkopolhukam, Kemenlu, Mabes TNI, Perpustakaan Universitas Pertahanan Indonesia dan Perpustakaan lain yang memiliki data pendukung.

### **3.4.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan antara bulan Maret 2013 - Januari 2014, dengan tahapan sebagai berikut :

<b>KEGIATAN</b>	<b>WAKTU</b>
Studi Kepustakaan	Maret 2013
Observasi Awal	April 2013
Penyusunan Naskah Proposal	Maret – Mei 2013
Konsultasi Pembimbing	Mei 2013
Perbaikan Naskah proposal	Mei 2013
Seminar Proposal	Mei 2013
Penyusunan Instrumen Penelitian	Juni 2013
Konsultasi Pembimbing	Juni 2013
Observasi Lapangan	Juli - Agustus 2013
Pengolahan Data Lapangan	Agustus 2013
Penyusunan Naskah Tesis	Desember 2013
Konsultasi Pembimbing	Januari 2014
Perbaikan Naskah	Januari 2014
Persiapan Ujian Tesis/Ujian Tesis	Februari 2014
Perbaikan Naskah	Februari 2014

## **BAB 4**

### **STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA DI PBB**

#### **GUNA MENCEGAH LEPASNYA PAPUA DARI NKRI**

##### **4.1 Umum**

Masyarakat internasional berharap dengan hadirnya organisasi multilateral seperti PBB maka kondisi dunia akan jauh lebih baik, dan perang terbatas sekalipun dapat berkurang secara dramatis. Berbagai macam persidangan dan konferensi digelar dan dijalankan melalui PBB untuk mencapai keadaan damai, dari mulai menetapkan batasan HAM dan rumusan tindakan untuk menjalankannya, mulai pengaturan tentang hak-hak individu sampai hak-hak kolektivitas dari mulai batasan pemakaian kekerasan dan kekuatan persenjataan sampai aktivitas kemanusiaan, mulai pemakaian sumberdaya alam, perlindungan terhadap kehidupan binatang, pemeliharaan lingkungan semuanya telah dibuat kesepakatan dan pengaturan melalui PBB. Namun demikian PBB bukanlah seperti pemerintah yang bisa memaksakan hukum atas negara-negara anggotanya. PBB adalah satu bentuk pemerintahan yang menjalankan aktivitas dan usaha seperti halnya sebuah pemerintahan namun tanpa hak-hak memerintah. (Ernst-Otto Czempiel and James Rosenau, *Governance Without Government : Order and Change in The World Politics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, hal 35-27)

##### **4.2 Perkembangan situasi Papua terkini**

###### **4.2.1 Tuntutan merdeka Gerakan Separatis Papua**

Pemerintah berkomitmen agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Papua dapat memenuhi rasa keadilan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan penegakan hukum serta penghormatan terhadap HAM. Untuk mewujudkan komitmen tersebut menjadi kenyataan, Pemerintah bersama DPR melahirkan Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus kepada Pemda Papua untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua serta memberi kesempatan untuk melakukan perubahan/revisi menjadi Otsus Plus. Meskipun demikian, niat baik Pemerintah tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif masyarakat Papua, bahkan tidak sedikit yang skeptikal dan berfikir negatif, dengan menentang berbagai kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah dan tidak sedikit peristiwa yang dimanifestasikan melalui perlawanan bersenjata oleh Gerakan Separatis Bersenjata Papua untuk menuntut “Merdeka” lepas dari NKRI. Berbagai perubahan positif dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, masih belum mampu menghilangkan keinginan sebagian masyarakat untuk menyuarakan kemerdekaan Papua. Untuk mencapai keinginan tersebut aktivis pro “M” secara intensif dan sistematis melakukan berbagai upaya mempengaruhi masyarakat baik di dalam maupun luar negeri serta gangguan keamanan dalam rangka mengangkat isu Papua ke dunia internasional. Isu masalah penegakkan hukum, demokrasi dan berbagai bentuk ketidakadilan Pemerintah Pusat terhadap Papua terus *diblow-up* dan mewarnai setiap aksi-aksi protes serta menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Penduduk Papua dan Papua Barat terdiri dari ± 255 suku/etnis dan 268 bahasa daerah. Komunitas suku-suku asli Papua secara umum mendiami wilayah pegunungan dan wilayah pesisir dengan batas daerah kaki pegunungan, namun pemberdayaan beberapa wilayah untuk *extractive industries* berdampak bergesernya batas beberapa wilayah hak tanah ulayat. Komunitas masyarakat suku asli Papua sebagian besar berada di wilayah kampung/pedesaan dan sebagian lagi telah membaaur dengan masyarakat suku Papua dari suku pendatang. Sedangkan daerah sentra produksi dan ekonomi di perkotaan cenderung didominasi komunitas masyarakat Papua dari suku/etnis pendatang diantaranya suku Jawa, Makassar, Bugis, Buton, Batak, Minahasa, Huli dan Tionghoa. Asimilasi antara sesama suku asli Papua lebih banyak terjadi dibandingkan suku asli Papua dengan suku pendatang. Pertumbuhan jumlah penduduk di Papua lebih banyak disebabkan oleh proses migrasi di daerah dari pada proses pertambahan secara alami (*natural increase*) apabila dilihat dari selisih antara kelahiran (*fertility*)

dikurangi dengan kematian (*mortality*). Hal ini sering dieksploitasi kelompok aktivis pro “M” untuk menolak program transmigrasi.

Eskalasi kegiatan Gerakan Separatis Papua menuntut Papua lepas dari NKRI cukup tinggi terutama di Jayapura, Timika, Merauke, Biak, Wamena, Asmat, Yahukimo, Nabire, Kep. Yapen, Dogiyai, Sorong, Fakfak dan Manokwari. Organisasi pendukung Gerakan Separatis Politik Papua yang aktif melakukan berbagai kegiatan dan aksi massa menuntut kepentingan Papua merdeka, yang beroperasi di lokal Papua diantaranya Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), ELSHAM Papua, Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP), Parlemen Rakyat Daerah (PRD), Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI), National Papua Solidarity (NAPAS), Komite Nasional Pemuda Papua (KNPP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Parlemen Anak-anak Jalanan (PARJAL) Papua, dan Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat (GEMPAR) Papua dll.

Sedangkan *support groups* dan *solidarity groups* yang secara intens mendukung gerakan aktivis pro “M” pada forum multilateral maupun forum bilateral selama ini diantaranya *West Papua Liberation Organization* (WPLO), *West Papua Interest Association* (WPIA), *Melanesian Spearhead Group* (MSG), *Free West Papua Campaign* (FWPC), *Papua Human Rights Defender* (PHRD), *International Parliamentarians for West Papua* (IPWP), *International Lawyer for West Papua* (ILWP), *West Papua National Authority* (WPNA), *West Papua National Coalition for Liberation* (WPNLC), *Australian West Papua Association* (AWPA), *Oxford Papua Right for Campaign* (OPRC) dll.

#### **4.2.2 Kegiatan Gerakan Separatis Politik Papua di dalam negeri**

Beberapa kegiatan yang menonjol Gerakan Separatis Politik Papua di dalam negeri sepanjang tahun 2013 (data diperoleh dari Desk Papua Kemenkopolkam,

Staf Operasi Mabes TNI, Staf Intelijen Mabes TNI, Kodam XVII/Cendrawasih dan instansi lainnya), diantaranya :

1. Pada tanggal 6-7 Januari 2013, di rumah Daniel Kogoya Jl. Sowi 2 Pantai Marampah Kab. Manokwari dan rumah Marthen Erari, SE, MM (Kabid BPKAD Setda Prov. Papua Barat) Jl. Sowi 4 Kab. Manokwari, telah berlangsung pertemuan tertutup Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Manokwari. Beberapa hal yang dibahas antara lain menolak segala bentuk bantuan apapun baik dari Pemprov. Papua Barat, Pemkab. Manokwari maupun bantuan dari TNI/POLRI, mendesak Ketua MRP Papua Barat untuk segera mempercepat proses penyusunan/pengesahan Perdasus dan Perdasi tentang hak kekhususan orang Papua.

2. Pada tanggal 17 Januari 2013, di samping GOR Sanggeng, Kab. Manokwari, berlangsung aksi unjuk rasa oleh sekitar 500 orang mengatasnamakan NFRPB, dipimpin Markus Yenu (Gubernur Executive WPNA Wil. III Doberay). Beberapa hal yang disampaikan, diantaranya bahwa *UN Special Raporteur* (pelapor khusus PBB) untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat telah datang di Jakarta dan masyarakat Papua harus mendukung kedatangannya, Apkam diharapkan tidak melakukan tindakan kekerasan karena masyarakat Papua sejak tahun 1991 telah mengalami penderitaan yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

3. Pada tanggal 8 Februari 2013, di Sekretariat Dewan Adat Papua (DAP) Jl. Raya Sentani-Expo Kel. Waena Distrik Heram Kota Jayapura, telah berlangsung jumpa pers oleh Welem Rumaseb (Sekretaris III DAP) dalam rangka menyikapi pernyataan Yan Christian Warenusi, SH (Ketua Tim Lawyers JR1269) tentang pemberian kuasa untuk meminta keabsahan DAP dalam memperjuangkan politik bangsa Papua.

4. Pada tanggal 1 Maret 2013, di Sekretariat Dewan Adat Papua (DAP) Kota Jayapura telah berlangsung jumpa pers DAP dipimpin Ferdinand Okoseray (staf khusus Presiden Negara Republik Federal Papua Papua Barat/NRFPB),

dihadiri Markus Haluk (Ketua Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia/AMPTPI), Engelberth Sorabut (Ketua Dewan Nasional Papua), Welem Rumaseb (Sekretaris III DAP), serta 4 orang wartawan media cetak dalam rangka menyikapi penembakan 8 anggota TNI dan 4 warga sipil di Tingginambut dan Sinak pada tanggal 21 Februari 2013.

5. Pada tanggal 6 Maret 2013, di toko buku Yoman Ninom Kotaraja Kota Jayapura telah berlangsung peluncuran buku berjudul "Saya Bukan Bangsa Budak" oleh Pdt. Socratez Sofyan Yoman (Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua/BP3GBP) dalam rangka menyikapi aksi penembakan 8 anggota TNI dan 4 warga sipil di Kab. Puncak dan Puncak Jaya yang dihadiri Pdt. Dr Benny Giay (Ketua Sinode KINGMI Papua) dan beberapa wartawan media lokal.

6. Pada tanggal 20 Maret 2013, di Cafe Prima Garden Distrik Abepura telah berlangsung jumpa pers oleh Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNPB)- Buhtar Tabuni, diikuti sekitar 15 orang wartawan lokal. Beberapa hal yang disampaikan diantaranya pada tanggal 19 Januari 2013 ybs pernah memberikan pernyataan bahwa PNPB merupakan lembaga representatif politik rakyat Bangsa Papua Barat yang bertanggung jawab dan menjamin keamanan masyarakat di seluruh tanah Papua Barat dengan membuka ruang demokrasi seluas-luasnya. Pemri jangan memaksa Ormas pribumi Papua untuk mendaftarkan di Kesbangpol Republik Indonesia.

7. Pada tanggal 29 Maret 2013, di ruang keberangkatan Bandara DEO Sorong, telah berlangsung jumpa pers oleh Buhtar Tabuni (Ketua KNPB) dihadiri beberapa wartawan, dengan penyampaian antara lain akan melakukan aksi peringatan 1 Mei dengan mengangkat isu bahwa 1 Mei 1962 adalah awal terjadinya genosida terhadap bangsa Papua dan menolak integrasi Papua ke dalam NKRI.

8. Pada tanggal 15 April 2013, di Jayapura telah beredar selebaran tentang Pemberitahuan No:01/KPBNGM/P/III/ 2013 dari pemerintahan Kerajaan Papua Barat New Guinea Melanesia (KPBNGM) dengan ibu kota kerajaan di Jayapura, di tandatangani Perdana Menteri : Ny. Persila Yakadewa, S.Th. tanggal 1 April 2013, dengan tembusan Sekjen *United Nations* di New York, Presiden USA, Ratu dan PM Inggris, Ratu dan PM Belanda, PM Australia, PM PNG, Presiden dan MPR RI, Seluruh Rakyat Bangsa Kerajaan Papua Barat *New Guinea Melanesia* dan Badan Organisasi Papua Merdeka. Selebaran berisi hal-hal mengenai pengalihan kekuasaan Pemerintah dari Pemri kepada KPBNGM.

9. Pada tanggal 16 April 2013, di Sekretariat Elsham Papua Jayapura telah berlangsung jumpa pers oleh Ketua Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM di Tanah Papua - Ferdinand Marisan, dalam rangka peluncuran website berjudul orang Papua dibalik jeruji, alamat website [www.papuansbehindbars.org](http://www.papuansbehindbars.org). Hal yang disampaikan antara lain bahwa Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM di Tanah Papua yang terdiri dari lembaga-lembaga maupun perorangan akan menuliskan keadaan Tapol Papua melalui website dengan harapan masyarakat dunia mengetahui nasib masyarakat Papua dan memberikan dukungannya.

10. Pada tanggal 23 April 2013, di halaman Auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura telah berlangsung jumpa pers oleh Ketua PNWP-Buhtar Tabuni, dengan penyampaian diantaranya bahwa bagi NKRI tanggal 1 Mei merupakan hari kembalinya Papua ke NKRI, namun bagi orang Papua tanggal 1 Mei adalah hari Aneksasi Bangsa Papua dimana telah terjadi pembunuhan massal di tanah Papua (*genocide*), untuk itu PNWP akan melaksanakan kegiatan doa syukur. Berdirinya Kantor OPM di London Inggris, diharapkan dunia internasional akan mengakui perjuangan bangsa Papua untuk merdeka.

11. Pada tanggal 23 April 2013, di Auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura telah berlangsung peluncuran buku berjudul "MATI ATAU HIDUP; Hilangnya Harapan Hidup dan HAM di Papua" karya Ketua Asosiasi Mahasiswa

Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI), Markus Haluk. Isi buku antara lain tentang perlakuan buruk terhadap orang Papua sejak 1 Mei 1963 sampai sekarang, permasalahan Papua yang selalu diredam oleh Indonesia melalui Apkam dengan tindak kekerasan khususnya kepada para pejuang HAM Papua.

12. Pada tanggal 24 April 2013, di Cafe Prima Garden Kel Kota Baru Distrik Abepura telah berlangsung jumpa pers oleh Koordinator Badan Pimpinan Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) Viktor Yeimo (Ketua Umum KNPB), dengan penyampaian antara lain bahwa pernyataan Pangdam XVII/Cen serta Kapolda Papua tentang akan ada penyerangan pada tanggal 1 Mei 2013 merupakan skenario atau pembohongan publik untuk menteror rakyat Papua yang akan memperingati 50 tahun pendudukan Indonesia kolonialisme di Papua Barat.

13. Pada tanggal 25 April 2013, di Aula Puspigra kampung Harapan Distrik Sentani Timur, telah berlangsung rapat gelap dari PNWP pimpinan-Buhtar Tabuni, dihadiri sekitar 130 orang diantaranya Ketua Umum KNPB-Vicktor F. Yeimo, Koordinator Intelijen TPN/OPM Dalam Negeri-Agus Kogoya, Sekretaris II Markas Pusat Tentara Revolusi West Papua (TRWP)-Simson Jikwa. Pembahasan rapat adalah penyusunan materi dan panitia Referendum sesuai arahan dari Ketua Diplomasi OPM di luar negeri Beny Wenda bahwa penyelesaian masalah Papua-Indonesia dengan jalur Referendum atau jajak pendapat seperti di Timor Leste.

14. Pada tanggal 27 April 2013, di Sekretariat Kontras Jl. Borobudur 14 Jakarta Pusat telah berlangsung rapat konsolidasi oleh Napas (*National Papua Solidarity*) dipimpin oleh Zely Ariane dan dihadiri 19 orang. Hasil rapat adalah rencana aksi *May day* tanggal 1 Mei 2013 pukul 10.00 WIB, di Bundaran Hotel Indonesia dan Istana Negara dengan koordinator Zely Ariane diikuti sekitar 30 orang. Selain itu akan mengadakan acara Satu Papua pada tanggal 1 Mei 2013 pukul 19.00 s.d pukul 21.00 WIB, di kantor Kontras Jl. Borobudur 14 Jakpus, dengan acara antara lain Screening film, peluncuran lagu "Karena Kebenaran Lebih Jauh Lagi" dan "Satu Papua", peluncuran kampanye dan buletin Papua, pertunjukan slide 50 tahun Papua sejak 1963.

15. Pada tanggal 30 April 2013, di sekretariat DAP Jayapura telah berlangsung jumpa pers NFRPB dipimpin oleh Sekretaris DAP-Ely Sirwa, dengan penyampaian antara lain tuntutan pelurusan sejarah tanggal 1 Mei 1963 sebagai hari Aneksasi Papua oleh NKRI, di Papua terdapat 2 Pemerintahan yaitu Pemerintahan Indonesia dan Pemerintahan NFRPB yang harus diselesaikan oleh pihak netral. NFRPB sedang menata lambang-lambang tinggi negara di tingkat federal dan ke tingkat teritorial 7 negara bagian

16. Pada tanggal 1 Mei 2013, di Lapangan Kp. Harapan Sentani Kab. Jayapura telah berlangsung kegiatan doa damai dalam rangka memperingati 1 Mei 2013 yang diikuti sekitar 400 orang diantaranya dari Parlemen Rakyat Demokrat (PRD), Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Beberapa hal yang disampaikan diantaranya bahwa 50 tahun NKRI telah menganeksasi Papua, menipu, menyiksa, memperkosa, memenjarakan serta membunuh rakyat Papua. Selain itu menuntut Pemri untuk berdialog dengan mediasi dunia internasional serta pengakuan terhadap Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPPB).

17. Pada tanggal 6 Mei 2013, di Kafe Prima Garden Kota Jayapura telah berlangsung jumpa pers oleh Jubir Komite Nasional Papua Barat (KNPB)-Wimed Lama. Beberapa penyampaian antara lain, menyayangkan tindakan brutal Kepolisian terhadap oknum yang diduga sebagai TPN di Sorong sehingga mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan dua orang luka-luka, KNPB akan mempublikasikan kepada publik dan akan melakukan aksi demonstrasi damai terkait kasus tersebut.

18. Pada tanggal 7 Mei 2013, Di Halaman Parkir Ruko Depan Kantor Pos Abepura Kota Jayapura telah berlangsung aksi pembagian *press release* Ketua Parlemen National of West Papua (PNWP)-Buhtar Tabuni kepada 4 (empat) orang wartawan media cetak tentang pelanggaran HAM sistematis yang dilakukan Republik Indonesia terhadap hak-hak Rakyat Pribumi West Papua yang dijamin dalam persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland pada

tanggal 15 Agustus 1962, telah terungkap dan menimbulkan keprihatinan yang mendalam dan perhatian serius internasional terkait status kenegaraan wilayah West Papua.

19. Pada tanggal 13 Mei 2013, di Gapura Kampus Uncen Atas Perumnas III Kel. Yabansai Distrik Heram telah berlangsung aksi unjuk rasa oleh KNPB dan mahasiswa Uncen dalam rangka menyikapi kasus penembakan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Kab. Sorong, Biak dan Timika. Aksi dipimpin oleh Ketua umum KNPB-Viktor Yeimo diikuti sekitar 100 orang dengan membawa spanduk dan pamflet bertuliskan menuntut Kapolda, Pangdam, Gubernur Prov. Papua dan Prov. Papua Barat bertanggung jawab atas jatuhnya korban 1 Mei 2013, bebaskan tahanan terkait peringatan 1 Mei di Sorong, Biak, Timika dan Serui serta pecat pelaku penembakan warga sipil pada tanggal 1 Mei 2013 di Sorong.

20. Pada tanggal 13 Mei 2013, di Lapangan Bola Kantor Bupati Kab. Yahokimo telah berkumpul massa KNPB sekitar 500 orang dipimpin oleh ketua KNPB Yahokimo-Sengber Pahabol dalam rangka ibadah syukur dan orasi. Hal yang disampaikan antara lain menuntut Gubernur, Pangdam dan Kapolda bertanggung jawab atas insiden Aimas Kab. Sorong dan segera membebaskan Tahanan Politik di Timika, Sorong, Biak dan Serui.

21. Pada tanggal 21 Mei 2013, di Kota Manokwari telah berlangsung aksi unjuk rasa dan long march simpatisan *The West Papua National Authority* (WPNA) dipimpin oleh Gubernur Executive WPNA Wilayah III Doberay-Markus Yenu diikuti sekitar 400 orang. Tuntutan aksi agar Pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua diantaranya Biak, Sorong, Fakfak dan Raja Ampat.

22. Pada tanggal 3 Juni 2013, di Sekretariat Kantor Dewan Adat Papua (DAP) Jl. Raya Sentani Distrik Heram Jayapura telah berlangsung jumpa pers Ketua Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI)-Markus Haluk didampingi Direktur Yayasan Hak Asasi Manusia Anti kekerasan

(YAHAMAK)-Yosepa Alomang menyikapi sikap Tapol/Napol Papua yang akan menolak rencana pemberian grasi oleh Presiden RI.

23. Pada tanggal 10 Juni 2013, di Kab. Manokwari telah berlangsung aksi unjuk rasa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dipimpin Ketua KNPB Wilayah Manokwari-Alexander Nekenem, diikuti sekitar 90 orang dalam rangka mobilisasi umum rakyat Papua untuk mendukung *West Papua* masuk menjadi anggota penuh *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dalam konferensi yang akan digelar di Kota Noumea New Caledonia.

24. Pada tanggal 10 Juni 2013, di Lapangan Kantor Bupati Lama Dekai Kab. Yahukimo telah berlangsung aksi unjuk rasa KNPB dipimpin Solimo Pahabol diikuti sekitar 200 orang massa. Orasi yang disampaikan diantaranya Bangsa Papua bukan Indonesia, Papua Barat telah menjadi anggota resmi dalam forum negara Pasifik dan terdaftar sebagai anggota MSG hal tersebut menandakan Bangsa Papua akan terlepas dari jajahan NKRI. KNPB Pusat dibentuk untuk memperjuangkan hak rakyat Papua yang tertindas oleh NKRI. Menolak Intel TNI/Polri masuk wilayah Kab. Yahukimo karena wilayah tersebut milik KNPB. KNPB menolak perilaku orang pantai (Biak) karena mereka bukan orang Indonesia namun membela orang Indonesia.

25. Pada tanggal 10 Juni 2013, di Jl. Patriot Kelurahan Girimulyo Kab. Nabire telah berlangsung aksi unjuk rasa KNPB dipimpin Ketua Alumni Universitas Wiyata Mandala (USWIM) Nabire-Agus Tebai dan diikuti sekitar 250 orang. Orasi yang disampaikan diantaranya menuntut Papua Merdeka, Indonesia harus bertanggung jawab atas pembunuhan masyarakat Papua, *West Papua* membutuhkan dukungan MSG, buka ruang demokrasi stop kekerasan, *We Want To Referendum of West Papua*.

26. Pada tanggal 14 Juni 2013, di Kota Manokwari telah berlangsung aksi unjuk rasa oleh *West Papua National Authority* (WPNA) dipimpin Gubernur *Executive* WPNA Wilayah III Doberai-Markus Yenu dan diikuti sekitar 350 orang

dalam rangka memperingati kasus pelanggaran HAM di Papua. Penyampaian Markus Yenu antara lain bahwa masyarakat Papua mendukung diterbitkannya *Passport* dan *Visa* oleh pemerintah Inggris bagi masyarakat dan aktivis Papua.

27. Pada tanggal 18 Juni 2013, di Tugu Zona Damai Kab. Biak Numfor depan Kantor Pelni telah berlangsung aksi unjuk rasa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Kab. Biak Numfor dipimpin Sekretaris KNPB Biak Numfor-Marthin Minumumes. Aksi diikuti sekitar 100 orang massa diantaranya Ketua KNPB Kab. Biak Numfor-Apolos Sroyer, Ketua Parlemen wilayah Kab. Biak Numfor-Hari Rosumbre, Perwakilan Dewan Adat Biak (DAB)-Absalom Mayor dalam rangka menuntut *Referendum West Papua*.

28. Pada tanggal 1 Juli 2013, di halaman Tugu Monas Jakarta Pusat telah berlangsung aksi unjuk rasa dengan tema "Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat" oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Jakarta dipimpin Rinto Kogoya diikuti sekitar 50 orang komunitas asal Papua. Orasi yang disampaikan intinya Papua dimasukkan secara paksa ke Indonesia dengan cara memanipulasi Penentuan Jejak Pendapat Rakyat (PEPERA), Sejarah Papua adalah sudah merdeka dan telah dikumandangkan "Proklamasi Kemerdekaan Papua pada tanggal 1 Juli 1971 di Distrik Waris Numbay Papua oleh Brigjen Zeth Jafet Rumkorem selaku presiden Papua Barat.

29. Pada tanggal 8 Juli 2013, di Kantor Bupati Lanny Jaya telah berlangsung aksi unjuk rasa oleh Forum Komunikasi Pelajar dan Mahasiswa Kab. Lanny Jaya diikuti sekitar 300 orang masyarakat dari Distrik Mokoni, Pirime dan Popomedari. Tuntutan aksi antara lain agar Pemda dan DPRD Kab. Lanny Jaya mendesak satuan-satuan yang bertugas di Tiom Kab. Lanny Jaya seperti anggota BKO Brimob Polda Papua, anggota Satgasban, anggota Yonif 756/WMS dan anggota Satgas Yonif 751/R, segera meninggalkan Kab. Lanny Jaya. Hanya Polres dan Koramil yang boleh bertugas di Tiom, serta menindak lanjuti kejadian penembakan terhadap Alm Aliance Tabuni warga Distrik Mokoni pada tanggal 1 Juli 2013.

30. Pada tanggal 10 Juli 2013, di Kampung Mantembo Distrik Yapen Selatan Kab. Kep. Yapen, rumah Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) bagian Saireri-Daud Abon telah berlangsung kegiatan penyampaian aspirasi politik dari kelompok West Papua National Authority (WPNA) dengan pembicara Dosen Uncen Jayapura/mengaku sebagai Menkopolhukan NRFPB - Franska Kapisa diikuti sekitar 150 orang. Kegiatan dilakukan sebagai pengganti aksi unjuk rasa yang rencana akan dilaksanakan di Kantor DPRD Kep. Yapen untuk meminta pembebasan Tapol/Napol di penjara NKRI, membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua, stop melakukan genocide di tanah Papua, menolak Otsus Plus dan UP4B.

31. Pada tanggal 18 Juli 2013, di Kab. Nabire telah berlangsung aksi unjuk rasa KNPB dipimpin oleh Ketua KNPB Kab. Nabire-Sadrak Kudiai dan Agus Tebay diikuti sekitar 900 orang massa. Tuntutan aksi agar Polri, TNI melalui Intelijen bertanggung jawab terkait kematian rakyat bangsa Papua Barat di GOR Kota Lama dan mengharapkan NKRI angkat kaki dari Bangsa Papua Barat sehingga Papua Barat aman dan damai.

32. Pada tanggal 22 Juli 2013, di Kantor Sekretariat Dewan Adat Papua (DAP) Jl. Nusa Indah 3 Kota Sorong telah berlangsung rapat gelap dihadiri oleh Amandus Mirino (protokoler DAP), Marthinus Yohame, Jack Bady, Lukas Murib (Komite Nasional Papua Barat-KNPB), Pdt. Mayor Tua, Pdt. Youweni (Forum Papua Bangkit-FPB), Alex Kogoya, Fredi Kawer, Markus Pikey, Petrus Mega, Edy Korwa (Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka-TPN/OPM), Thomas Mugu (Penjaga Tanah Papua-PETAPA) dan Selvina Wambrau (Serikat Perempuan Papua-SPP), dalam rangka membahas informasi kedatangan 8 kapal asing dari Pasifik. Penyampaian Amandus Mirino intinya bahwa akan datang 8 kapal asing dari Pasifik untuk misi kemanusiaan di Papua, rencananya akan bersandar 1 kapal di Jayapura, 1 kapal di Biak, 1 kapal di Merauke, dan 5 kapal di perbatasan RI-PNG. Selain itu disampaikan bahwa di Washington DC, Menlu AS-

Hillary Clinton menyampaikan dukungan terhadap kongres Papua di Vanuatu guna menentukan nasib orang Papua.

33. Pada tanggal 1 Agustus 2013, di Sekretariat DAP Mamta, Kampung Sabron Yaru Distrik Sabron Kab. Jayapura telah dilaksanakan apel konsolidasi Polisi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dipimpin oleh Ellyas Eyakeding (Kepala Kepolisian NRFPB) dan dihadiri sekitar 50 orang berpakaian seragam Polisi NRFPB. Acara tersebut dalam rangka mendukung pendirian/pembukaan Kantor Perwakilan OPM di Deen Haag Belanda pada tanggal 15 Agustus 2013, kunjungan para menteri *Melanesian Spearhead Groups* (MSG) ke Papua.

34. Pada tanggal 13 Agustus 2013, di Kantor Dewan Adat Papua (DAP) Expo Waena Kota Jayapura Prov. Papua telah berlangsung jumpa pers oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB)-Elyas Ayakeding. Inti penyampaian adalah tidak menerima tindakan represif aparat Polres Kab. Jayapura yang didukung aparat TNI-AD pada tanggal 12 Agustus 2013, saat melakukan pemeriksaan di rumah Presiden NRFPB-Forkorus Yaboisembut yang dinilai sebagai bentuk intimidasi dan pelanggaran HAM.

35. Pada tanggal 15 Agustus 2013, di depan Museum Daerah Papua (Expo) Kel. Waena Distrik Heram Kota Jayapura Prov. Papua telah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sekitar 200 orang simpatisan KNPB dipimpin oleh Buhtar Tabuni dalam rangka mendukung peresmian perwakilan OPM di Den Haag Belanda, menyambut Misi MSG dan menolak perundingan *New York Agreement*. Selain itu di Lapangan Kama Kab. Jayawijaya Prov. Papua telah berlangsung aksi unjuk rasa sekitar 800 orang simpatisan KNPB pimpinan Ketua KNPB wilayah Jayawijaya-Uchok Logo dan Amanus Daby dalam rangka mendukung peresmian perwakilan OPM di Den Haag Belanda, menyambut Misi MSG dan menolak perundingan New York.

36. Pada tanggal 26 Agustus 2013, di Asrama Mansinam Jl. Gunung Salju Amban Kab. Manokwari Prov. Papua Barat telah berlangsung pertemuan Kelompok *West Papua National Coalition For Liberation* (WPNCL) wilayah Manokwari, yang diikuti sekitar 30 orang diantaranya Wakil Ketua WPNCL/Narasumber-Dr. Otto Ondawame. Agenda pembicaraan diantaranya memproses NKRI ke Mahkamah Internasional (*International Court Of Justice*) di Den Haag Belanda, pendaftaran *West Papua* ke Komite 24 PBB, perundingan Papua-NKRI, deklarasi Pesta Mama Papua dan Lobi mencari dukungan kekuatan dari negara-negara kawasan seperti *Melanesian Sparehead Group* (MSG).

37. Pada tanggal 27 Agustus 2013, di Kota Manokwari Prov. Papua Barat telah berlangsung aksi unjuk rasa dan Parade Budaya Kelompok Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dalam rangka menyambut dan mendukung kedatangan Kapal "*Freedom Flotilla*" dari Australia ke wilayah Papua Barat. Aksi dipimpin Wakil Gubernur NRFPB Wilayah III Doberai-Markus Yenu dan diikuti sekitar 700 orang massa diantaranya Jubir WPNA/Jubir Perdana Menteri NRFPB-Jack Wanggai, Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Wilayah Papua Barat-Yance Kambu, Ketua Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Papua Cinta Kedamaian (SPMPCK)-Ellimelek Kawiyai.

38. Pada tanggal 28 Agustus 2013, di Sekretariat Dewan Adat Papua (DAP), Distrik Heram, Kota Jayapura Prov. Papua telah berlangsung jumpa pers oleh Ketua Dewan Nasional Papua Barat-Angelberth Sorabut dan Sekretaris Staf NFRPB-Ida Faidiban dalam rangka menyambut kedatangan Kapal "*Freedom Flotilla*". Pernyataan Presiden NFRPB-Forkorus Yaboisembut yang disampaikan Ida Faidiban intinya kedatangan Konvoi *Freedom Flotilla* telah diketahui dari Menlu NFRPB-Jacob Rumbiak yang disampaikan melalui Perdana Menteri NFRPB-Edison Waromi. NFRPB perlu memberikan undangan secara tertulis kepada tim konvoi *Freedom Flotilla* untuk memasuki wilayah NFRPB sebagai bentuk kampanye internasional karena tim konvoi *Freedom Flotilla* adalah bagian dari komunitas yang mengkampanyekan isu lingkungan hidup, kebebasan dan perdamaian di dunia.

Program Konvoi Laut *Freedom Flotilla* menandakan awal dukungan terhadap Kemerdekaan Papua Barat yang telah dideklarasikan pada tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus Abepura Jayapura.

39. Pada tanggal 7 September 2013, di Jl. Bupul Kelapa Lima Kab. Merauke Prov. Papua telah dilaksanakan pertemuan KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dipimpin Igidius Mahuze diikuti sekitar 25 orang massa, diantaranya Gento Emerikus Dop-Ketua KNPB Merauke, Ketua PRD Merauke-Panggresia Yeem dan simpatisan KNPB-Sektor Matara. Pertemuan tersebut membahas rencana aksi unjuk rasa KNPB dan PRD wilayah Merauke tanggal 16 September 2013 sebagai bentuk dukungan dalam menyikapi sidang tahunan PBB tanggal 19 September 2013.

40. Pada tanggal 12 September 2013, di Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat/Asrama mahasiswa Uncen unit VI Kota Jayapura Prov. Papua telah berlangsung pertemuan KNPB dipimpin Ketua *Parlemen Nasional West Papua* (PNWP)-Buctar Tabuni diikuti sekitar 30 orang simpatisan, hadir dalam kegiatan diantaranya Ketua I KNPB-Agus Kosai, Sekum KNPB-Ones Suhuniap dan Ketua BEM Fisip Uncen-Yason Ngelia. Pertemuan membahas persiapan rencana aksi unjuk rasa tanggal 16 September 2013 dalam mendukung kebijakan PM Vanuatu-Mr. Moana Carcases Kolosil untuk membawa masalah Papua ke sidang tahunan PBB.

41. Pada tanggal 13 September 2013, di Bandara Rendani Manokwari Prov. Papua Barat, telah berlangsung penjemputan terhadap Menkopolhukam Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB)-Prof. Dr. Frans Kapissa dan Komandan Batalyon Kaswari Wilayah Kepala Burung-Eliezer Awom oleh Wakil Gubernur NRFPB Wilayah Doberai-Markus Yenu, diikuti sekitar 400 orang simpatisan. Dalam orasinya Prof. Dr. Frans Kapissa menyampaikan intinya saat ini *Freedom Flotilla* sudah berada di wilayah perbatasan dan siap memasuki wilayah Papua, kemerdekaan Papua telah dideklarasikan tanggal 19 Oktober 2011 di Jayapura dan merupakan salah satu syarat penting bagi terbentuknya sebuah

Negara, Otsus adalah program Pemri yang bertujuan menjajah Papua, pejabat Pemda orang asli Papua jangan menari-nari di atas penderitaan masyarakat Papua.

42. Pada tanggal 16 September 2013, di Lapangan Jayanti Kota Timika Kab. Mimika Prov. Papua, telah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sekitar 700 orang dari KNPB dipimpin Ketua KNPB Mimika-Steven Itlay dan aktifis Parlemen Rakyat Daerah-Abihut Degey dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional. Penyampaian orasi diantaranya bahwa Bendera Bintang Kejora adalah Bendera Papua yang nilainya sama serta sejajar dengan Bendera Merah Putih, rakyat Melanesia Barat dari Sorong sampai Samarai agar mendukung Hari Demokrasi Internasional, mendesak negara-negara MSG datang melihat situasi di Papua, PBB harus mengambil inisiatif nyata dan bertanggung jawab terhadap resolusi PBB, Pepera 1969 cacat hukum dan harus dihadapkan kepengadilan Internasional.

43. Pada tanggal 16 September 2013, di Pertigaan Kompleks Ruko Dekai Kab. Yahukimo Prov. Papua telah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sekitar 300 orang dari KNPB dipimpin Markus Suhun dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional. Penyampaian orasi diantaranya bahwa NKRI adalah negara penganut sistem demokrasi namun telah menodai nilai-nilai demokrasi, Negara Vanuatu mendukung terbentuknya Bangsa Papua Barat, Pemri dan Dunia Internasional harus menyelesaikan masalah Papua secara singkat.

44. Pada tanggal 20 September 2013, di Halaman Gereja Pante Kosta Tip Top Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor Prov. Papua, telah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sekitar 100 orang dari kelompok Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dipimpin Yan Piet Manggaprouw, SH dan Gubernur Negara Bagian II Saireri-Edison Kendi, dihadiri Drs. Frans Kapisa, Gebson Wader, Markus Yenu. Penyampaian orasinya Drs. Frans Kapisa intinya agar masyarakat tetap semangat dan bersabar untuk Kemerdekaan NFRPB demi kemakmuran rakyat Papua kedepan.

45. Pada tanggal 2 Oktober 2013, di Kantor Dewan Adat Papua (DAP) Distrik Heram Kota Jayapura Prov. Papua telah berlangsung jumpa pers oleh Sekretaris Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB)-Markus Haluk dan dihadiri Ketua harian DAP-Willem Rumaseb, Ketua Yayasan HAM dan Anti Kekerasan (YAHAMAK)-Mama Yosepha Alomang, juru bicara DAP-Fredy Okoseray, Ketua Dewan Nasional Papua-Elly Sorabut serta wartawan lokal Papua. Jumpa pers tersebut dalam rangka penyerahan surat terbuka No : 014/P-02/NFRPB/X/2013 dari Presiden NFRPB-Forkorus Yoboisembut, S. Pd tentang ucapan terima kasih kepada *The Right Honourable Moana Carcasses Kalosil Prime Minister Of The Republic of Vanuatu in Port Villa Vanuatu* yang mendukung isu Papua masuk dalam agenda sidang umum PBB tahun 2013 pada sesi debat umum ke 68 tanggal 28 September 2013 di Markas Besar PBB New York Amerika Serikat.

46. Pada tanggal 16 Oktober 2013, di Depan Museum Papua Expo Distrik Heram Kota Jayapura Prov. Papua telah berlangsung aksi unjuk rasa sekitar 250 orang simpatisan KNPB dipimpin oleh Wakil Ketua I KNPB-Warpo Wetipo, dihadiri diantaranya Koordinator umum-Ones Suhuniap, Ketua PNWP-Buhtar Tabuni, Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Kaimana-Muhammad Kurika, Ketua I KNPB-Agus Kosay dan Perwakilan Tapol/Napol-Saul Bomay. Aksi dalam rangka mendukung Pidato Perdana Menteri Vanuatu pada Sidang Tahunan PBB tanggal 28 September 2013 yang meminta PBB menunjuk Wakil Khusus untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Prov. Papua dan Papua Barat serta memperingati HUT IPWP ke-5 tanggal 15 Oktober 2013.

47. Pada tanggal 19 Oktober 2013, di Kantor DAP Mamta Kampung Sabron Yaru Distrik Sentani Barat Kab. Jayapura Prov. Papua telah berlangsung kegiatan ibadah syukur sekitar 25 orang terdiri dari 13 orang PETAPA dan simpatisan NRFPB dipimpin Ketua DNP Dafonsoro Utara-Yosafat Sato, hadir diantaranya Kepala Kepolisian NRFPB-Ellias Ayekeding, Bendahara DNP-Ofni Yeuw, Komandan Operasi Mamta-Kores Demotouw, Kapolres Daponsoro Utara-Yonatan Yanggoseray dan Habel Demotouw. Kegiatan dalam rangka memperingati

HUT II deklarasi pemulihan kedaulatan bangsa Papua tanggal 19 Oktober 2011-19 Oktober 2013.

48. Pada tanggal 4 November 2013, di Sekretariat DAP Jayapura telah berlangsung jumpa pers oleh Plh. Ketua Umum DAP Wilayah Baliem (La Pago)-Wilem Rumaseb dalam rangka menyikapi laporan *Asian Human Rights Commission* (AHRC) terkait Operasi Militer di Wamena tahun 1977 dengan judul "*Human Rights Abuses Against Papuan in The Central Highlands*". Inti penyampaian adalah pelanggaran HAM di wilayah Adat Baliem pada tahun 1977-1978 telah menimbulkan rasa trauma bagi rakyat Papua maka Pemri harus menyatakan permohonan maaf kepada rakyat bangsa Papua, serta meminta PBB dan masyarakat Internasional segera menyikapi Kasus HAM di Papua.

49. Pada tanggal 19 November 2013, di Sekretariat KNPB Kab. Merauke telah berlangsung ibadah syukur KNPB dengan tema "Selamat Merayakan Hari Ulang Tahun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Yang Ke-5, Dengan Semangat HUT Yang Ke-5 KNPB Wilayah Merauke Siap Memediasi Rakyat Bangsa Papua Barat Menuju Penentuan Nasib Sendiri "*Self Determination*". Kegiatan diikuti sekitar 50 orang dipimpin Ketua KNPB wilayah Merauke-Emerikus Gento Dop. Pidato Emerikus Gento Dop.

50. Pada tanggal 25 November 2013, di Rumah Makan Selera Nusantara (Samping Aula Gereja GKI Maranatha) Kota Sorong Prov. Papua Barat, telah berlangsung jumpa pers Ketua KNPB Sorong-Martinus Yohame terkait pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 26 November 2013. Penyampaian Martinus Yohame, intinya KNPB wilayah Sorong Raya akan melaksanakan Ibadah Syukur dan unjuk rasa di Lapangan SPG Gereja GKI Maranatha Kota Sorong pada tanggal 26 November 2013, untuk mendukung Pengacara Internasional (IPWP dan ILWP) dalam memperjuangkan Papua Merdeka, membuka Ruang Demokrasi dan Stop Kekerasan di Tanah Papua, mendukung pembukaan Kantor OPM di Port Moresby PNG.

51. Pada tanggal 27 November 2013, di Sekretariat KNPB Kab. Jayawijaya telah berlangsung doa bersama sekitar 350 orang simpatisan KNPB wilayah Lembah Baliem, hadir diantaranya Ketua KNPB wilayah Pegunungan Tengah-Simeon Daby, Ketua PRD wilayah Hubula-Yosep Siep, Ketua PNWP La-Pago-Paulus Logo, Korlap KNPB wilayah Pegunungan Tengah-Heri Kosai, Sekertaris DAP Pegunungan-Nardi Mosip. Kegiatan dalam rangka mendukung Pembukaan Kantor OPM dan pertemuan IPWP/ILWP serta kampanye Papua Merdeka "*Sorong to Samarai*" di Port Moresby Ibu Kota Negara PNG.

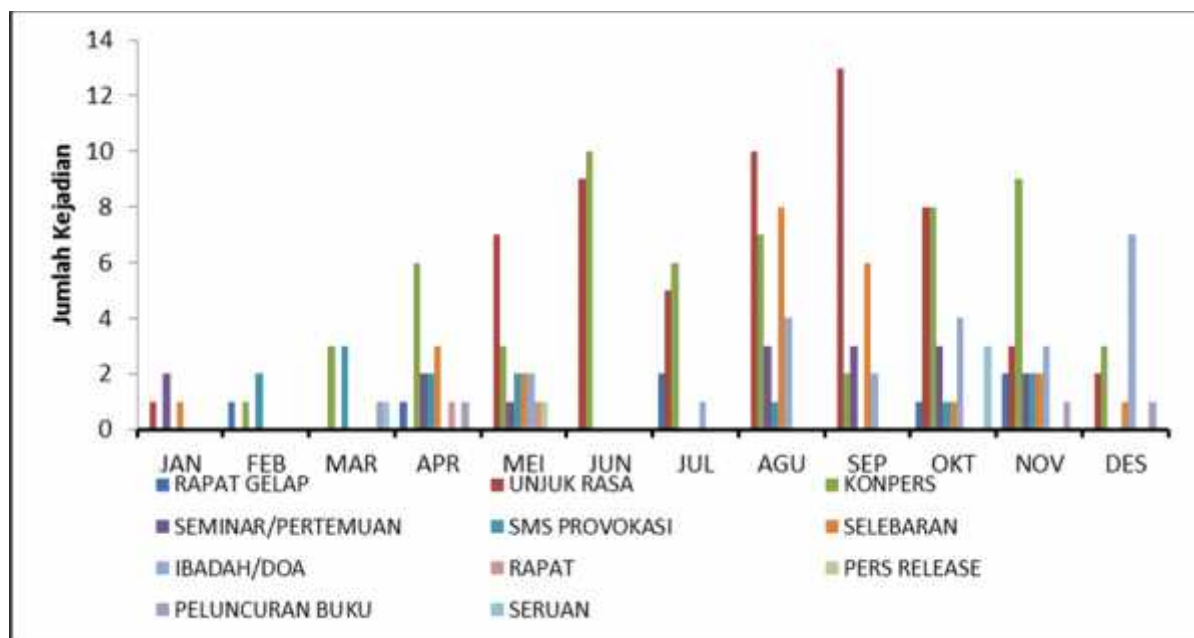
52. Pada tanggal 1 Desember 2013, di Kantor DAP Wil. III Jl. Pahlawan Manokwari telah berlangsung Ibadah Syukur kelompok yang menamakan diri Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dalam rangka peringatan HUT Papua Merdeka ke 52, diikuti sekitar 30 orang dipimpin Johan Warijo, S.Sos. (Ketua Komite Nasional Pemuda Papua/KNPP/Kepala Bappeda Kab. Manokwari) turut hadir diantaranya Pdt. Stefanus Kafiar (Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja/BKAG) dan Zakarias Horota (Sekretaris KNPP).

53. Pada tanggal 4 Desember 2013, di Kantor Kontras Papua, Kota Jayapura telah berlangsung jumpa pers oleh Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Papua, Bersatu Untuk Kebenaran (BUK), Gerakan Rakyat Demokratik (Garda) Papua, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Papua, Lembaga Study HAM dan Advokasi Masyarakat (Elsham) Papua, GMKI Cabang Kota Jayapura, National Papua Solidarity (Napas), Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Indonesia (AMPTI) dan Parlemen Anak Jalanan (PARJAL) dipimpin oleh Peneas Lokbere, dalam rangka menyikapi kriminalisasi ruang demokrasi dan matinya nilai-nilai kemanusiaan di tanah Papua.

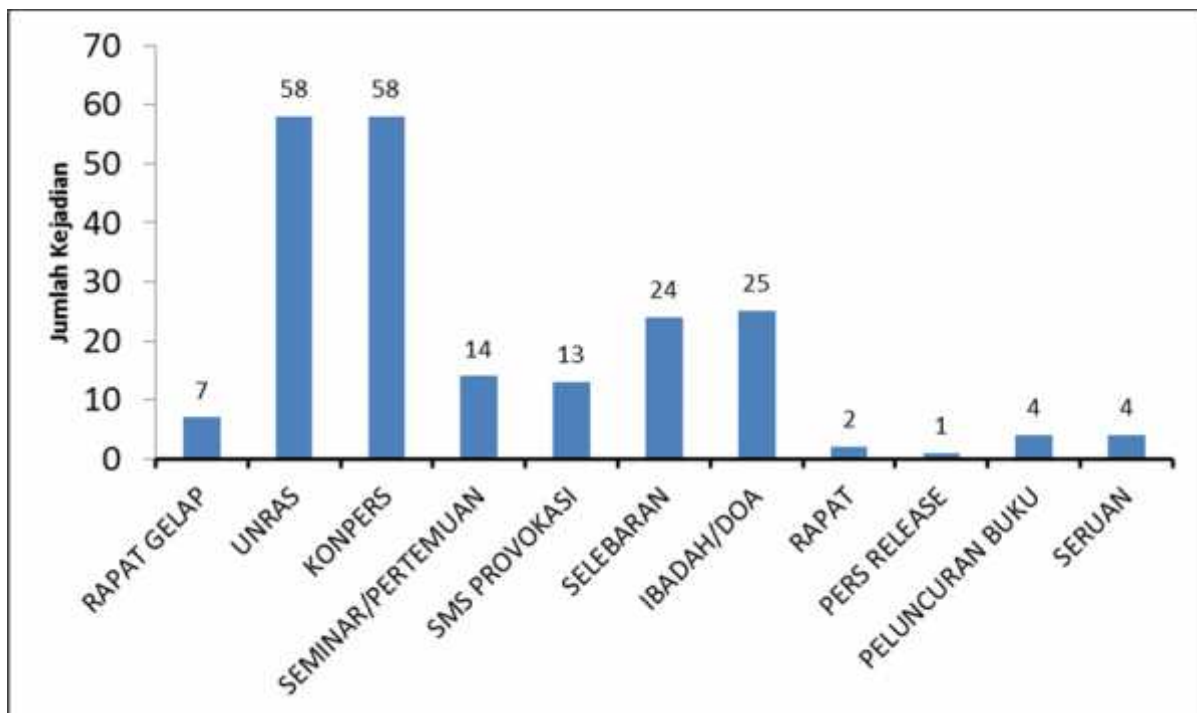
54. Pada tanggal 10 Desember 2013, di Manokwari telah beredar pernyataan sikap Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Manokwari yang ditandatangani Ketua KNPB Manokwari-Alexander Nekenem dan Sekretaris KNPB-Melkias Beanal, yang berisi bahwa rakyat Papua ingin memisahkan diri dari NKRI, Polda Papua harus menghentikan kriminalisasi terhadap KNPB dan bertanggung

jawab atas korban pada tanggal 16 November 2013, Referendum adalah solusi tepat untuk rakyat pribumi Papua Barat, PBB agar bertindak tegas atas hak-hak rakyat pribumi West Papua.

55. Pada tanggal 14 Desember 2013, di Jl. Merapi Fanindi Manokwari (rumah Sekjen Dewan Komite Pelaksana Kemerdekaan dan Kedaulatan Negara Republik Melanesia/DKPKKM a.n. Melkianus Bleskadit, S.Kom), telah berlangsung ibadah syukur peringatan Hari Ulang Tahun Negara Republik Melanesia ke-25 dengan tema "Dr. Thomas Wanggai telah bangkit kembali" dihadiri sekitar 15 orang dipimpin Melkianus Bleskadit, S.Kom.



Gambar 1 : Grafik Kegiatan GSPP Januari - Desember 2013



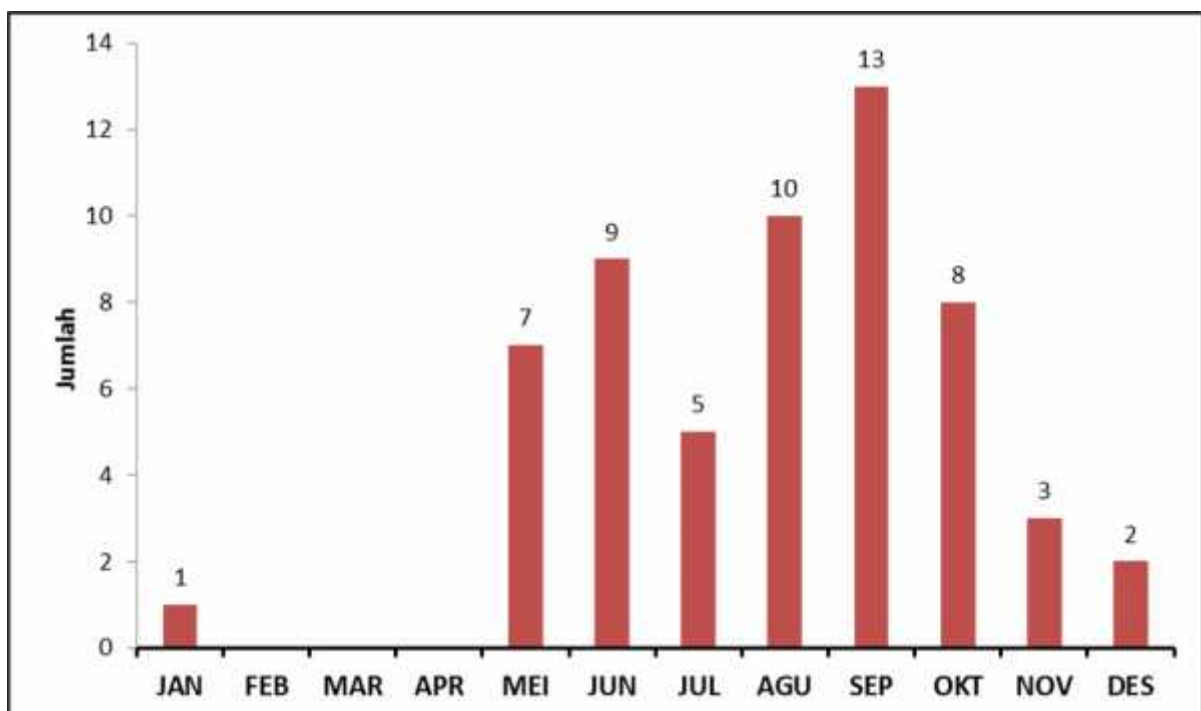
**Gambar 2 : Grafik Jenis Kegiatan GSPP**



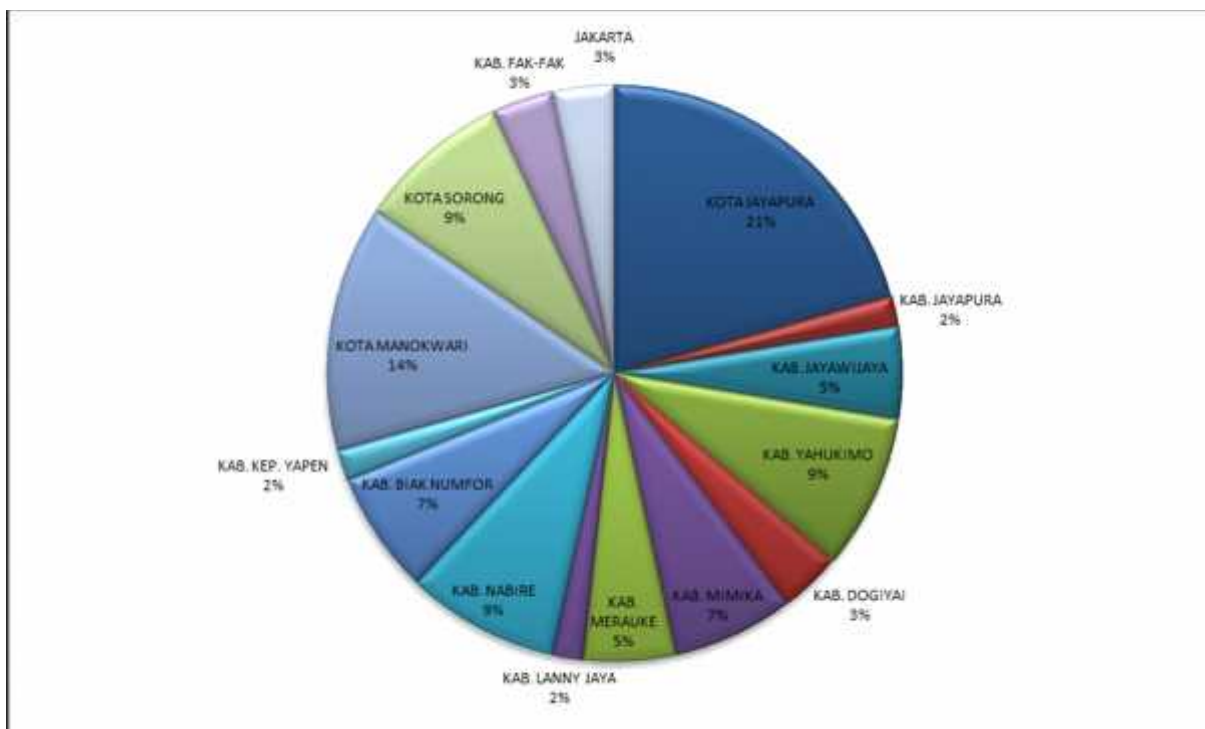
**Gambar 3 : Grafik Fluktuasi Kegiatan GSPP Januari - Desember 2013**



**Gambar 4 : Prosentase Aksi GSPP pada Tiap Kota/Kabupaten Th 2013**



**Gambar 5 : Grafik Aksi Unjuk Rasa Ormas/LSM Pro "M" Jan – Des 2013**



**Gambar 6 : Grafik Aksi Unjuk Rasa Ormas/LSM Pro “M” di Kota/Kab Th 2013**

#### **4.2.3 Aksi Gerakan Separatis Bersenjata Papua**

Gangguan keamanan bersenjata oleh GSBP terus terjadi sebagai teror kepada warga pendatang, aparat TNI/Polri dan yang sering menjadi sasaran adalah aset perusahaan swasta, Obvitnas serta pesawat udara sipil maupun militer. GSBP yang intens beraksi, diantaranya adalah Kelompok Jhon Yogi di wilayah Kab. Paniai dan Kab. Deiyai, kelompok Jack Jepalan Kemong di wilayah Kab. Mimika, Kelompok Enggarango Wonda dan Purom Wenda, kelompok Goliat Tabuni dan Kelompok Pilia di wilayah Kab. Puncak Jaya. Kelompok Yambi Murib dan Lekagok Talangen di Kab. Puncak dan Kab. Jayawijaya, kelompok Ruddy Orarey di wilayah Kep. Yapen dan kelompok Isak Klaibin di wilayah Kab. Sorong. Sepanjang wilayah perbatasan antara RI-PNG masih sering terjadi tindakan kriminal, *extraordinary crime*, *illegal trading*, *illegal logging* dan *illegal passing*. Hal tersebut bila tidak segera diantisipasi, ditanggulangi dan diselesaikan sesuai prosedur, tidak tertutup kemungkinan berpotensi mengganggu hubungan antara RI-PNG. Masih terjadinya

aksi penembakan di Area PT. Freeport Indonesia yang dilakukan oleh kelompok Kenny Walik dan Goliat Tabuni telah menjadi perhatian internasional serta mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan keamanan PT. Freeport Indonesia. Tindakan kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI/Polri menjadi bahan eksploitasi GSP sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Sepanjang tahun 2013 aksi GSBP intensitasnya cukup tinggi, beberapa catatan menonjol (data diperoleh dari Desk Papua Kemenkopolhukam, Staf Operasi Mabes TNI, Staf Intelijen Mabes TNI, Kodam XVII/Cendrawasih dan instansi lainnya), diantaranya :

1. Pada tanggal 10 Januari 2013, di Kp. Wuyukwi Distrik Mulia Kab. Puncak Jaya telah terjadi penembakan oleh OTK yang mengakibatkan 2 (dua) orang korban, yaitu Praka Hasan (29 tahun, Islam, Anggota Satgas Pamrahwan Yonif 753/AVT) dan Haji Abbas Hadis (52 tahun, Suku Madura, Islam, Swasta, alamat Kp. Wuyukwi Distrik Mulia Kab. Puncak Jaya). Kejadian berawal ketika Praka Hasan sedang berada di depan warung sate, tiba-tiba mendapat tembakan. Akibat tembakan tersebut korban roboh dengan luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri. Pelaku juga kemudian menembak Haji Abbas Hadis yang baru selesai makan di warung miliknya tersebut, selanjutnya melarikan diri ke arah selatan menuju arah ketinggian Gunung Nanas. Penembakan tersebut mengakibatkan Haji Abbas meninggal dunia, sedangkan Praka Hasan dalam kondisi kritis.

2. Pada tanggal 11 Januari 2013, Di Koramil 1701-22/Muara Tami, Kp. Skow, Distrik Muara Tami Kab. Jayapura, sebanyak 24 orang OPM tanpa bersenjata dipimpin Daniel Kogoya (Wakil Panglima TPN/OPM) telah menyerahkan diri ke NKRI. Kelompok Daniel Kogoya selama ini berada di perbatasan RI-PNG.

3. Pada tanggal 7 Februari 2013, Kapolres Paniai AKBP Semi Roni Abaa, S.Ik. bersama Danki Pos Kotis Brimobda BKO Polres Paniai AKP Hans Fairnap melakukan pengejaran terhadap GSBP TPN/OPM Pimpinan Jhon Magai

Yogi yang melakukan perampokan terhadap *speed boat* yang ditumpangi oleh Briptu Ishak Mofu anggota Polsek Obano bersama beberapa orang masyarakat menuju Enarotali dalam rangka mengambil gaji bulanan ke Polres Paniai serta membeli bahan makanan untuk persediaan bulanan. Saat pengejaran tiba di Kampung Totio ditembak sebanyak dua kali oleh GSBP dari arah bukit, rombongan membalas tembakan sehingga terjadi kontak tembak antara kedua belah pihak sekitar 15 menit s.d. 20 menit. Akibat kejadian tersebut 1 orang anggota Brimob BKO Polres Paniai a.n. Briptu Aplion Wondiwoi terkena rekaset peluru dari GSBP mengenai punggung sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka memar dan dirawat di RSUD Kab. Paniai.

4. Pada tanggal 14 Februari 2013, di ketinggian Pugo-1 Distrik Paniai Timur Kab. Paniai, telah terjadi aksi penembakan oleh OTK terhadap Wagiran, 47 tahun, agama Islam, suku Jawa (tukang ojek). Akibat kejadian tersebut, korban dirawat di RSUD Kab. Paniai karena mengalami luka tembak di punggung kiri dan tangan kiri. Kasus tersebut masih dalam proses pendalaman Polres Paniai.

5. Pada tanggal 21 Februari 2013, di Pos Tingginambut Kab. Puncak Jaya telah terjadi penembakan anggota Satgasban Kopassus oleh kelompok GSBP Papua Bersenjata pimpinan Goliat Tabuni. Akibat penembakan tersebut mengakibatkan Lettu Inf Reza (Dan Pos Satgasban Kopassus) luka tembak di lengan kiri, sedangkan Pratu Wahyu Wibowo gugur karena luka tembak di leher.

6. Pada tanggal 21 Februari 2013, di Kampung Gigobak, Distrik Sinak, Kab. Puncak telah terjadi penghadangan dan penembakan oleh kelompok GSBP Papua Bersenjata terhadap 11 orang anggota TNI terdiri dari anggota Koramil Sinak dan Yonif 753/AVT dipimpin Sertu Ramadan Amang yang sedang menuju Bandara dengan berjalan kaki berjarak sekitar 1,5 km dengan berpakaian preman untuk menjemput alkom HT (*handy talky*) dan HP Satelit yang dikirim dari Kodim Nabire, tanpa membawa senjata. Akibat penghadangan tersebut 7 orang anggota TNI gugur terdiri dari 4 orang anggota Yonif 753/AVT (Sertu Ramadan Amang, Pratu Mustofa, Praka Jojo Wiharja, Praka Wempri), 3 orang anggota Koramil 1714-

04/Sinak (Sertu Frans Hera, Sertu M. Udin, Sertu Ebi Juliana) serta 2 masyarakat sipil tewas, adapun 4 orang anggota TNI lainnya selamat (Serda Seno, Serda Wahyudi, Praka Supriyadi dan Praka Ari).

7. Pada tanggal 22 Februari 2013, di Bandara Sinak Kab. Puncak telah terjadi penembakan helikopter Puma HT-3318 milik TNI AU dari Skuadron Udara 8 Atang Sanjaya Bogor oleh kelompok GSBP. Penembakan terjadi ketika helikopter baru saja mendarat untuk mengevakuasi personel TNI yang gugur guna dibawa ke Jayapura. Akibat tembakan tersebut 3 orang anggota TNI luka-luka a.n. Mayor Pnb Asep (*captain pilot*), Kapten Pnb Tatak One (*copilot*) dan Lettu Tek Amang Rosadi (JMU) serta *right windshield* pesawat lobang dan retak.

8. Pada tanggal 27 Februari 2013, di ketinggian antara Sinak dan Mulia telah terjadi gangguan tembakan dari kelompok GPK terhadap Helikopter Mi-17 yang mengangkut 11 anggota Brimob Polda Papua dipimpin oleh Bripta Gultof dan 1 orang anggota tambahan Deninteldam. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, kerusakan materiil 1 lubang tembakan di badan helikopter.

9. Pada tanggal 2 Maret 2013, di depan Pos Polisi Sinakma Jl. Yos Sudarso Wamena Kab. Jayawijaya telah terjadi aksi penembakan yang dilakukan oleh OTK dengan mengendarai sepeda motor, pelaku mengeluarkan tembakan sebanyak 3 kali ke atas, kemudian melarikan diri ke arah Honay Lama, tidak ada korban dalam kejadian tersebut.

10. Pada tanggal 9 Maret 2013, di Gunung Janggruk Distrik Bolakme Kab. Jayawijaya telah terjadi kontak tembak antara pasukan Satgas Pamrahwan Yonif 756/WMS dengan sekitar 40 orang kelompok GPK. Kejadian berawal saat anggota Pos Bolakme Yonif 756/WMS melakukan pengendapan di Gunung Janggruk Bolakme untuk mencari kemungkinan adanya korban dari kelompok GSBP yang diperkirakan bersenjata AK 47 saat terjadi kontak tembak tanggal 8 Maret 2013. Dari pengintaian anggota pos Bolakme melihat sekitar 40 orang kelompok GPK bersenjata panah, tombak dan 1 orang terpantau bersenjata Mouser berada

dibeberapa titik bergerak turun dari gunung Janggruk, selanjutnya terjadi kontak tembak dan akhirnya kelompok GSBP berhasil dipukul mundur. Akibat kejadian 1 orang anggota Yonif 756/WMS terluka dibagian jari tengah karena terkena batu dan barang bukti yang diamankan berupa 2 buah Bendera Bintang Kejora, 5 patahan tombak, 1 Kaos dan 5 buah Parang.

11. Pada tanggal 10 Maret 2013, di Distrik Ilaga Kab. Puncak telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh OTK diduga dari kelompok Militer Murib terhadap 10 orang personel TNI gabungan dari Koramil Ilaga, Yonif 753/AVT dan Paskhas pimpinan Mayor Inf Isak Sattu (Pabung Kab. Puncak). Penembakan terjadi saat personel TNI Gabungan dalam perjalanan kembali setelah mengambil kayu untuk pembenahan Makoramil Ilaga, tidak ada korban personel maupun kerugian materiil dalam kejadian tersebut.

12. Pada tanggal 11 Maret 2013, di depan toko Himalaya II Jl. Irian Distrik Wamena Kab. Jayawijaya telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh 3 orang OTK diperkirakan menggunakan senjata api jenis SS1. Akibat kejadian seorang warga a.n. Irjoni Krisno, 26 tahun (Kasir Toko Ujang) mengalami luka di bagian dada dan lengan kiri terkena serpihan, kasus dalam penyelidikan Polres Jayawijaya.

13. Pada tanggal 14 Maret 2013, di Kampung Serui Laut Pasir Hitam Distrik Yapen Selatan Kab. Kep. Yapen telah terjadi kontak tembak antara 6 orang anggota Intel Polres Kep. Yapen dengan 2 orang GSBP bersenjata, diperkirakan dari kelompok Rudi Aurey. Akibat kejadian tersebut Briptu Elisa terkena tembakan pada paha kanan.

14. Pada tanggal 26 Maret 2013, di ketinggian sekitar Puncak Senyum Tingginambut Kab. Puncak Jaya telah terjadi penembakan terhadap Helikopter Bell 206 milik Helivida (eks Helimission) dengan registrasi PK-HME, diindikasikan dilakukan oleh Gerakan Separatis Bersenjata Papua (GSBP). Penembakan terjadi ketika Helikopter tersebut dalam penerbangan dari Mulia menuju Wamena dalam

misi membawa oli untuk Yajasi dan 2 orang Missionaris. Akibat kejadian tersebut kaca samping kiri depan berlubang (*cockpit*) dan tembus kaca bagian atas, namun Heli tetap melanjutkan penerbangan ke Wamena.

15. Pada tanggal 6 April 2013, di Tanggul Timur areal PT. FI Kab. Mimika telah terjadi aksi pembakaran 2 unit alat berat (*escafator*) milik PT. TRMP dan aksi penembakan terhadap anggota Satgas Amole serta karyawan yang diduga dilakukan kelompok Theny Kwalik. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, kerugian materi berupa 2 Unit alat berat (*escavator*) mengalami rusak dibakar, 2 Mobil Toyota LWB milik PT. FI mengalami rusak lubang kena tembakan.

16. Pada tanggal 6 April 2013, di depan RSUD Mulia Kab. Puncak Jaya telah terjadi kontak tembak antara anggota Satgasban Kopassus Pos-15 Mulia dengan sekitar 4 orang GSBP, tidak ada korban dalam kejadian tersebut.

17. Pada tanggal 8 April 2013, di ruas jalan Tanggul Timur MA-225 Mile 37 areal PT. Freeport Indonesia (PT.FI) Kab. Mimika telah terjadi kontak tembak antara personel Polisi dari Satgas Amole dengan sekitar 20 orang TPN/OPM wilayah Timika. Kontak tembak berawal dari penembakan TPN/OPM terhadap 4 mobil pengawal Satgas Amole yang sedang mengantar Bahan Makanan, tidak ada korban dalam kejadian tersebut, karena setiap mobil dilengkapi plat lapisan dan kaca tahan peluru.

18. Pada tanggal 27 Maret 2013, di kampung Aitiri Distrik Angkaisera Kab. Kep. Yapen telah terjadi aksi penusukan terhadap anggota Polsek Angkaisera-Bripka Jefri Sesa oleh kelompok Ruddy Orarey. Akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia dan pelaku merampas 1 pucuk senjata SS1 V-2 beserta magazen berisi 20 butir munisi. Selanjutnya pelaku melakukan penembakan sebanyak 7 kali terhadap rumah anggota Polsek Angkaisera-Brigadir Lamek Matui sehingga mengenai sepeda motor sebanyak 2 tembak, kemudian melarikan diri. Kasus dalam penyelidikan Polres Kep. Yapen.

19. Pada tanggal 1 Mei 2013, di Balai Diklat Biak Timur Kab. Biak Numfor telah terjadi aksi pengibaran Bendera Bintang Kejora (BK) oleh sekitar 50 orang dipimpin Otis Warnares dan Syor Simyapen. Selanjutnya aparat Kodim dan Polres Biak Numfor menurunkan bendera BK serta membubarkan massa. Selain itu mengamankan seorang pelaku a.n. Yance Warmaer (Wakil Pimpinan OPM wilayah Biak Utara) beserta 6 orang lainnya dan barang bukti berupa parang, sangkur, bom rakitan, satu pucuk pistol replika, bendera BK dan Munisi kaliber 7,62 mm sebanyak 39 butir. Akibat kejadian tersebut 2 orang masyarakat mengalami luka-luka.

20. Pada tanggal 1 Mei 2013, di Jl. Klalin Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kab. Sorong telah terjadi penghadangan oleh sekitar 30 orang masyarakat pendukung TPN/OPM pimpinan Isak Klaibin terhadap patroli gabungan Polres Sorong dan Kodim 1704/Sorong dalam rangka mengantisipasi kegiatan 1 Mei 2013. Akibat kejadian 1 anggota TNI a.n. Pelda Sultoni terluka, dipihak TPN/OPM 2 orang tewas, 1 orang luka dan 5 orang ditangkap.

21. Pada tanggal 1 Mei 2013, di daerah Dogom CO.1382-6582 wilayah Tiom Kab. Lanny Jaya telah terjadi kontak tembak antara GSBP dengan 4 orang anggota Satgasban dipimpin Lettu Inf Petrus dan 4 orang anggota Satgas Pamrahwan Yonif 756 pada saat melakukan pengendapan. Kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian personel maupun materiil.

22. Pada tanggal 25 Mei 2013, di Kampung Kebo Kab. Paniai telah terjadi penembakan terhadap 1 unit Helikopter milik PT. MQ (Madidah Quartain) yang dilakukan oleh OTK. Penembakan terjadi saat Helikopter melintas di Kampung Kebo dari Enarotali menuju ke lokasi tambang KM 45 dengan membawa *crew* dan karyawan PT. MQ sebanyak 5 orang, tidak terjadi kerugian personel maupun materiil dari kejadian tersebut.

23. Pada tanggal 6 Juni 2013, di Jl. Raya Saubeba KM 26 Distrik Yapen Utara Kab. Kep. Yapen telah terjadi aksi penembakan yang diduga dilakukan oleh

kelompok GSBP Rudi Orarey terhadap Lodwik Yosep Ayomi (pecatan TNI-AD karena kasus disersi, mantan tamtama Yonif 753/AVT Kipan C tahun 2000), saat korban dibonceng oleh Lodik Worembay menggunakan sepeda motor melewati TKP. Akibat kejadian tersebut korban tewas dengan luka tembak pada dada kiri tembus ke punggung dan dari punggung kanan tembus ke perut serta leher digorok. Selanjutnya korban dilarikan ke RSUD Serui untuk dilakukan otopsi, kasus dalam penanganan Polres Kep. Yapen.

24. Pada tanggal 25 Juni 2013, di sekitar kebun anggur Distrik Jigonikme Kab. Puncak Jaya telah terjadi penghadangan diduga dilakukan oleh GSBP kelompok Tingginambut (Pimpinan Goliat Tabuni) terhadap anggota Pos Maleo Illu yang mengakibatkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia a.n. Letda Inf wayan (Danpos Maleo Pos Illu) dan Sdr. Tono.

25. Pada tanggal 12 Juli 2013, di Tanjakan Jl. Puncak Senyum Distrik Mulia Kab. Puncak Jaya telah terjadi penembakan terhadap Tukang Ojek a.n. Muhamad Saleh (laki-laki, Makasar, 43 Tahun, alamat Kampung Purlleme Mulia Kab. Puncak Jaya) oleh penumpang ojek menggunakan senjata api jenis pistol. Akibat kejadian tersebut korban tewas di TKP dengan luka tembak pada bahu kanan belakang tembus dada kanan dan rusuk kanan belakang tembus rusuk kiri.

26. Pada tanggal 19 Juli 2013, di ujung landasan Bandara Mulia Kampung Karubate Distrik Mulia Kab. Puncak Jaya telah terjadi kontak tembak antara personel gabungan TNI terdiri dari 10 orang anggota Satgasban, 10 orang anggota Yonif 753/AVT, 10 orang anggota Yonif 751/R, 10 orang anggota Paskhas dan 15 orang anggota Kodim 1714/PJ dengan kelompok GSBP kekuatan 4 orang menggunakan senjata campuran. Akibat kejadian 2 orang GSBP tewas a.n. Welison Telenggen alias Welison Wenda (20 tahun), anak dari Libomili (Bendahara TPN/OPM kelompok Purom Wenda) dan Longgop alias Kwali Tabuni (17 tahun) anak buah dari Lekagak alias Leka Telenggen, kelompok GPK Bersenjata Militer Murib, serta berhasil diamankan 1 pucuk pistol Revolver No XK256009 made in Brazil, dengan 8 butir munisi kaliber 38.

27. Pada tanggal 31 Juli 2013, di Kampung Puncak Senyum Kab. Puncak Jaya telah terjadi aksi penembakan oleh Gerakan Separatis Bersenjata Papua (GSBP) diduga dari kelompok Pilia terhadap mobil Ambulan milik RSUD Mulia yang mengangkut 1 pasien dan 10 orang pengantar. Akibat kejadian 1 orang masyarakat pengantar pasien tewas tertembak a.n. Erik Yoman (25 tahun, suku Dani, luka tembak di wajah dan dada) dan 2 orang mengalami luka tembak a.n. Prins Baransano (30 tahun, Suku Biak, petugas kesehatan, luka tembak di tangan kanan) dan Darson Wonda (25 tahun, Suku Dani, supir Ambulance luka tembak di bahu kiri). Seluruh korban selanjutnya di evakuasi ke RSUD Mulia.

28. Pada tanggal 31 Agustus 2013, di Kampung Tinggineri Distrik Tingginambut Kab. Puncak Jaya Prov. Papua telah terjadi kontak tembak antara Gerakan Separatis Bersenjata Papua (GSBP) wilayah Tingginambut dengan Timsus Maleo Satgasban Pos Tingginambut yang sedang melaksanakan pengendapan/ambus pada CO 7750-8890. Akibat kejadian 1 anggota Timsus Maleo Satgasban dari Kompi 1 Yon 13 Kopassus Serang Banten, a.n. Pratu Andre Candrayasa (25 tahun) meninggal dunia dengan luka tembak dibagian perut.

29. Pada tanggal 21 September 2013, di KV 7989 (Jembatan jalan Distrik Tingginambut) Kab. Puncak Jaya Prov. Papua telah terjadi aksi penembakan diduga dilakukan oleh Gerakan Separatis Bersenjata Papua (GSBP) kelompok Tingginambut terhadap mobil trayek Mulia-Wamena jenis Strada Triton No. Pol DS 8694, saat perjalanan dari Mulia ke Wamena Kab. Jayawijaya. Akibat kejadian, pengemudi mobil a.n. Ali Hasan alias Manggalik (30 tahun, Suku Bugis, Islam) tewas ditempat kejadian.

30. Pada tanggal 4 November 2013, di depan Kantor Distrik Mulia Kab. Puncak Jaya Prov. Papua telah berlangsung kontak tembak antara anggota Satgas Yonif 753/AVT berjumlah 8 orang yang dipimpin oleh Lettu Inf Yoni dengan 3 orang anggota GSBP. Akibat kejadian tersebut 1 orang anggota GSBP a.n. Trigele Inumbi (Adik Kepala Kampung Yambi Kiri) tewas tertembak dan barang bukti

berupa pistol FN No. Seri 713957 (index Danramil Wewoluk Puncak Jaya-Lettu Inf Paulinus Logo yang dirampas oleh OTK tahun 2012) berhasil diamankan.

31. Pada tanggal 28 November 2013, di Pasar Lama Distrik Illu, Kab. Puncak Jaya Prov. Papua telah terjadi aksi penembakan terhadap anggota Koramil 1714/Puncak Jaya a.n. Sertu Wandi Ahmad NRP 21060157830185 pada saat ybs sedang belanja oleh Tembak Wenda menggunakan pistol Sig Sauer. Akibat kejadian korban mengalami luka tembak di bagian pipi tembus ke bawah mata kanan.

32. Pada tanggal 28 November 2013, di Kampung Kanggime Distrik Illu, Kab. Puncak Jaya Prov. Papua telah terjadi aksi penembakan dan pembakaran Mobil Lajuran Illu-Mulia oleh 8 orang anggota Gerakan Separatis Bersenjata Papua (GSBP) kelompok Goliat Tabuni, yang mengakibatkan korban tewas a.n. David (39 tahun, agama Islam, Suku Jawa, alamat Blitar Jawa Timur, Pengemudi Mobil Lajuran) dan 1 unit Mobil Strada rusak dibakar.

33. Pada tanggal 8 Desember 2013, di Mile 40 Areal PT. FI Timika, Kab. Mimika telah terjadi penembakan terhadap mobil Toyota Kijang Inova Nopol S 730 WG yang dikemudikan Praka Warsidi (anggota Brigif 20/IJK Timika) saat mengangkut 5 orang pendulang oleh Orang Tak Di Kenal (OTK). Akibat kejadian tersebut 1 mobil Toyota Kijang Inova mengalami kerusakan terkena tembakan pada bagian depan kanan dan kiri tembus mesin.

34. Pada tanggal 9 Desember 2013, di Mile Point 41-42 Jl. Freeport Timika, Kab. Mimika, Prov. Papua telah terjadi penembakan oleh OTK terhadap mobil tangki air nomor Lambung 021010 yang dikendarai oleh Agustinus Weyai (Karyawan KPI/ Koala Pelabuhan Indonesia). Selanjutnya anggota Satgas TNI dipimpin oleh Mayor Inf Mustofa Akbar (Dansub Satgas TNI) tiba di TKP untuk mengamankan situasi dan melakukan pengecekan terhadap mobil tangki air di Pos Brimob Mile 41. Akibat kejadian tersebut kerugian personil nihil dan 1 unit mobil tanki air nomor Lambung 021010 mendapatkan tembakan diantaranya pada bagian

Radiator mobil sebanyak 2 kali, bagian pintu kiri bawah sebanyak 1 kali, bagian kepala mobil depan bagian kiri sebanyak 1 kali dan bagian pintu kanan dekat kaca spion sebanyak 1 kali.

35. Pada tanggal 10 Desember 2013, di Mile 40 Area PT. Freeport Indonesia (tepatnya di belakang cekpoint dan base camp Brimob 41) telah terjadi aksi penembakan yang dilakukan oleh OTK terhadap konvoi trailer bermuatan bahan peledak terdiri dari mobil pengawal Satgas Amole jenis Toyota LWB *Escort* warna putih nomor lambung 01-4758 dikemudikan oleh Ridwan Zuma (karyawan PT. FI) dan Truk Trailer pengangkut bahan peledak nomor lambung 02-0868 dikemudikan oleh Bus Warkito (Karyawan PT. KPI).

36. Pada tanggal 12 Desember 2013, di Mile 42 Areal PT. FI Tembagapura, Kab. Mimika, Prov. Papua telah terjadi aksi penembakan terhadap Bus *Visitor* jenis *Western* warna kuning, nomor lambung 140323 yang membawa rombongan Danrem 174/ATW, dikemudikan oleh karyawan PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) oleh OTK saat menuju ke Mile 50. Akibat kejadian tersebut kerugian personel nihil dan kerugian materiil berupa kerusakan pada kendaraan Bus *Visitor* akibat terkena tembakan pada bagian filter angin kanan tembus ke kap mesin kanan.

37. Pada tanggal 13 Desember 2013, di Mile 43 RPU 7-8 Areal PT.FI Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika telah terjadi aksi penembakan yang dilakukan oleh OTK terhadap mobil patroli *Zona Alfa* RP 04 dan mobil *Escort* no lambung 01-4785 yang sedang mengawal kendaraan pengangkut bahan makanan. Akibat kejadian tersebut mobil RP 04 terkena 4 kali tembakan (bawah lampu sen kiri depan sebanyak 1 butir, kaca depan lurus dengan sopir sebanyak 2 butir, di atas kaca depan sebanyak 1 butir) dan mobil LWB nomor lambung 01-4785 terkena tembakan di bagian pintu kiri pada bagian bawah lurus kaki sebanyak 1 butir.

38. Pada tanggal 15 Desember 2013, di Mile 44 Area PT. Freeport Indonesia, Kab. Mimika telah terjadi penembakan terhadap 2 unit kendaraan Patroli

Satgas Amole jenis Toyota LWB nomor lambung 01-4779 dan 01-4939 yang dikemudikan oleh Security Kontraktor PT. Srikandi a.n. Cristian dan Boy Tambunan saat sedang melakukan patrili rutin dari Mile 50 menuju ke Mile 40. Namun saat melintas di Mile 44 ditembaki dari arah kiri jalan. Akibat kejadian tersebut mobil nomor lambung 01-4779 terkena tembakan di bagian body kiri dan kaca belakang dan mobil dengan nomor lambung 01-4939 terkena tembakan pada bagian kaca depan sebelah kiri.

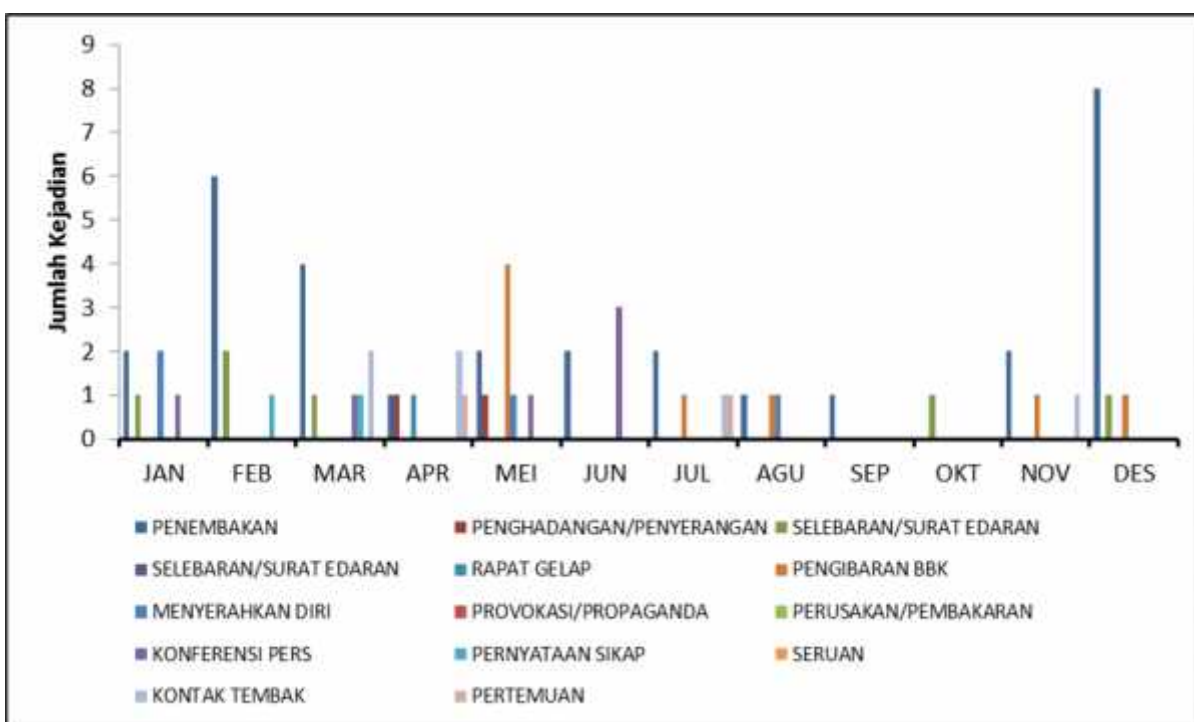
39. Pada tanggal 17 Desember 2013, di Mile 44 Area PT. FI (antara RPU 10 dan RPU 11) Kab. Mimika telah terjadi aksi penembakan sebanyak 2 kali dari arah kanan jalan oleh OTK, terhadap rombongan konvoi 9 truck trailer pengantar bahan makanan dari Kuala Kencana menuju Tembagapura dengan pengawalan 4 mobil dari TNI/Polri. Akibat kejadian, kerugian personil nihil dan kerugian materiil yaitu 1 (satu) truck trailer nomor lambung 020824 yang dikemudikan karyawan PT. Kuala Pelabuhan Indonesia/KPI a.n. Supriono mengalami kerusakan terkena tembakan 1 kali pada kaca bagian depan sebelah kanan. Aparat gabungan TNI/Polri (anggota Pos Yonif 754/ENK dipimpin Kapten Inf Rainer dan anggota Pos Brimob) melaksanakan penyisiran ke dalam hutan sekitar TKP, dengan hasil ditemukan 1 bungkus rokok, 1 batang korek gas dan 1 lembar terpal warna biru.

40. Pada tanggal 18 Desember 2013, di Mile 45 Area PT. FI Kab. Mimika Prov. Papua telah terjadi aksi penembakan oleh OTK terhadap Bus Rute Perjalanan Umum (RPU) Satgas Amole nomor lambung 14-0116 dalam keadaan kosong yang dikemudikan Frangki Ibra (Karyawan Kontraktor PT. Srikandi). Akibat kejadian tersebut Bus mengalami kerusakan terkena tembakan pada kaca bagian depan jendela sebelah kanan tembus ke sandaran tempat duduk pengemudi.

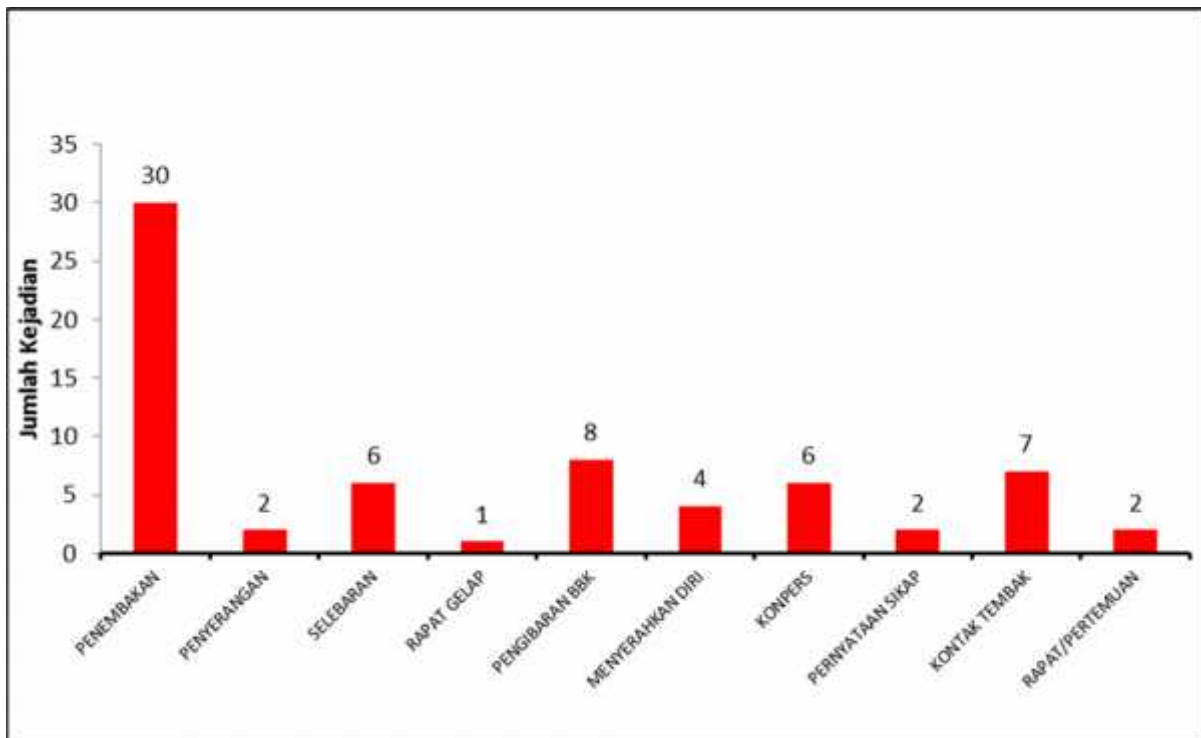
41. Pada tanggal 27 Desember 2013, di Mile 42 Area PT. FI Tembagapura Kab. Mimika telah terjadi aksi penembakan oleh OTK terhadap truck trailer nomor lambung 020868 yang dikemudikan oleh Karyawan PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) a.n. Sukri Ridwan. Akibat kejadian kerugian personil nihil, sedangkan kerugian materiil yaitu 1 (satu) unit truck trailer mengalami

kerusakan terkena tembakan 1 kali pada pintu kanan, 2 kali pada kaca pintu kanan dan 1 kali pada *chasis* dekat ban depan kanan.

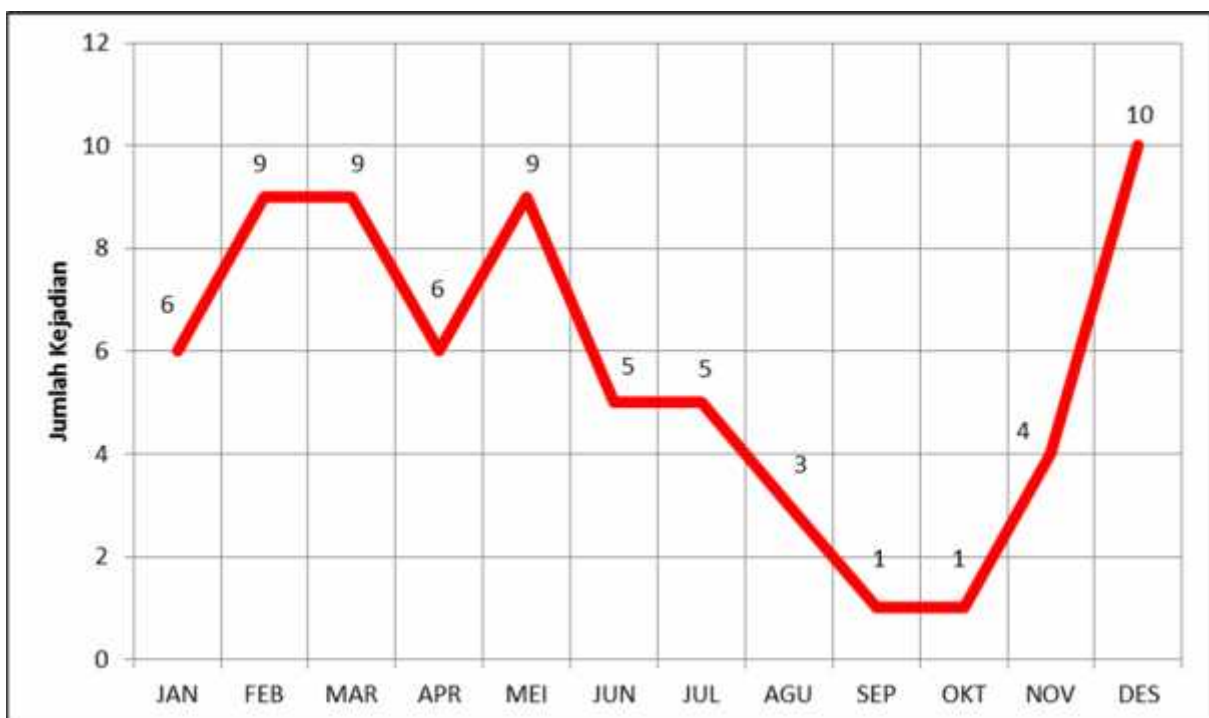
42. Pada tanggal 30 Desember 2013, di MP 40 Area PT. FI, Kab. Mimika, Prov. Papua (antara RPU 03 dan 04 yang dijaga oleh 2 orang personel Brimob) telah terjadi penembakan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) terhadap Mobil LWB (mobil kawal Satgas Amole) nomor lambung 4837, pengemudi a.n. Boy dengan penumpang Tim *Direct Finder* (DF) Polda Papua, saat melakukan patroli dan mencari jejak OTK pelaku penembakan di Area PT. FI. Akibat kejadian, kerugian personil nihil dan kerugian materiil yaitu 1 Mobil LWB mengalami kerusakan 1 kali tembakan pada kaca bagian depan (tepat di depan sopir) dan 1 kali tembakan pada kap mesin.



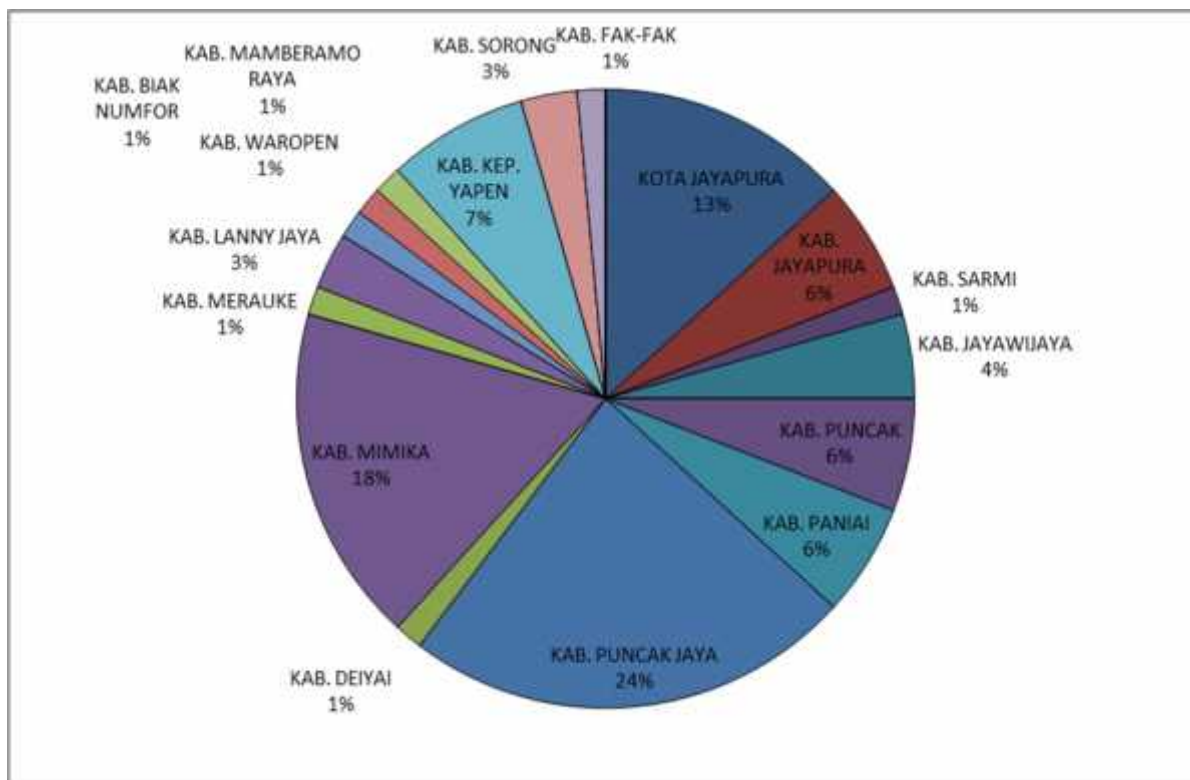
Gambar 7 : Grafik Jenis Aksi GSBP Th 2013



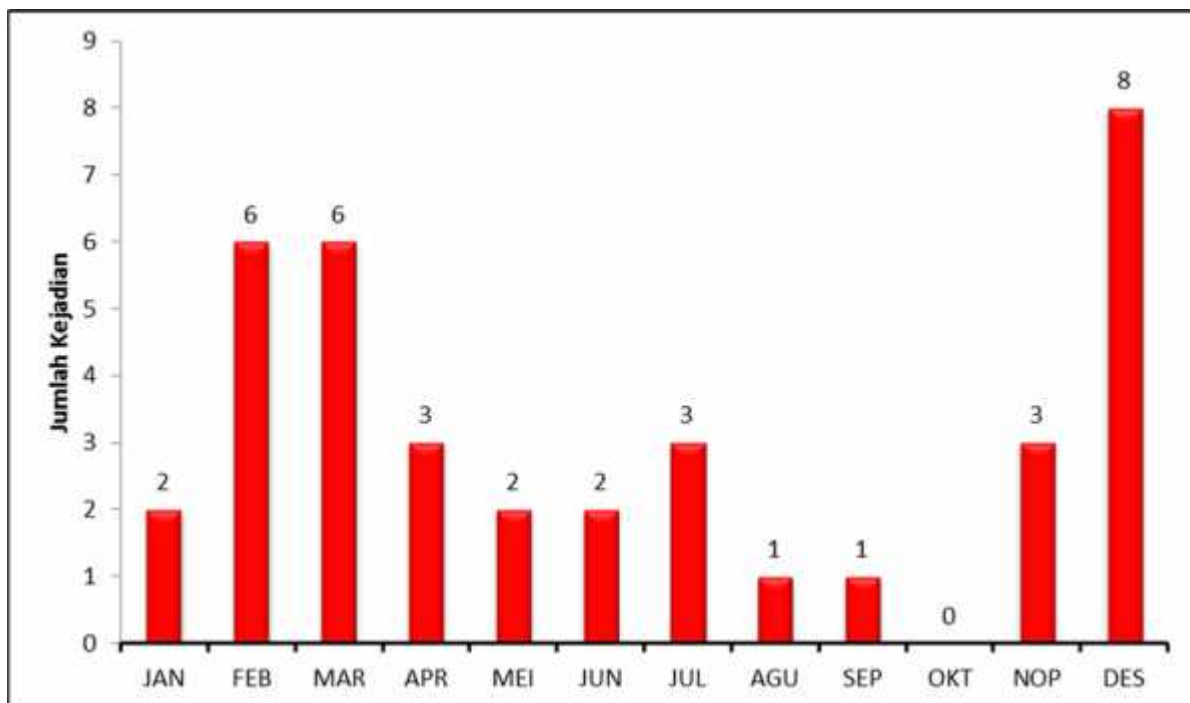
Gambar 8 : Grafik Jumlah Aksi GSBP Th 2013



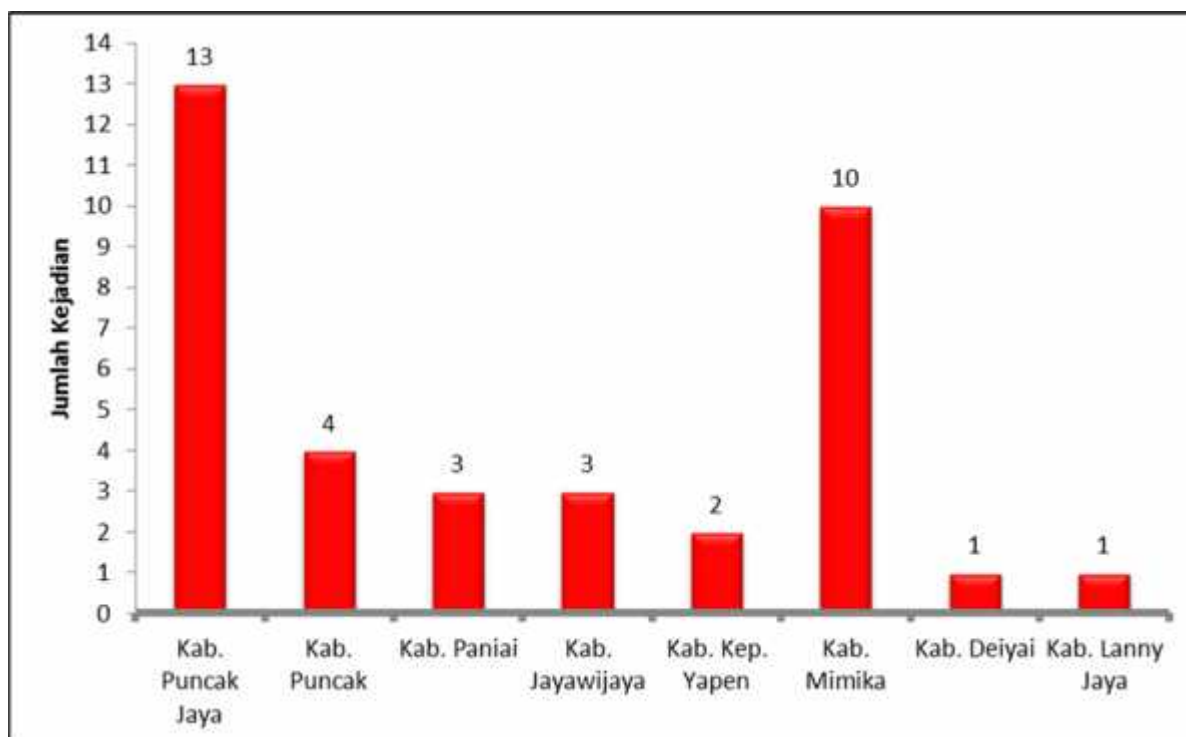
Gambar 9 : Grafik Fluktuasi Jenis Aksi GSBP Th 2013



Gambar 10 : Prosentase Aksi GSBP pd Tiap Kota/Kabupaten Th 2013



Gambar 11 : Grafik Penembakan oleh GSBP Periode Jan – Des 2013



**Gambar 12 : Intensitas Penembakan GSBP di area Kab. Pegunungan Th 2013**

#### 4.2.4 Kegiatan Aktivistis pro “M” di Luar Negeri

Internasionalisasi isu Papua tidak bisa dibendung lagi, aktivis pro “M” yang dibantu oleh *support groups* dan *solidarity groups* dari berbagai negara telah mengakibatkan semakin besarnya dukungan politik disertai dukungan dana pada kelompok ini. Pemerintah Indonesia yang terdiri dari Kementerian/Lembaga terkait dibantu pihak akademisi dan pihak swasta yang *concern* terhadap situasi Papua juga berupaya optimal untuk meredam proses internasionalisasi ini. Catatan menonjol yang dilakukan oleh aktivis pro “M” sepanjang tahun 2013 (data diperoleh dari Desk Papua Kemenkopolkum, Kemenlu, Setwapres bidang politik, Staf Operasi Mabes TNI, Staf Intelijen Mabes TNI, Kodam XVII/Cendrawasih, dan instansi lainnya, diantaranya :

1. Pada tanggal 25 Februari – 8 Maret 2013, telah dilaksanakan kegiatan kampanye "*Freedom West Papua Tour*" Benny Wenda, *Free West Papua*

*Campaign* (FWPC) di Negara PNG. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Gubernur NCD, Mr. Powes Parkop (anggota Parlemen PNG).

2. Pada tanggal 29 Maret 2013, *West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)* mengeluarkan *Press Release* tentang pertemuan delegasi WPNCL. Dalam pertemuannya dengan PM Frank Bainimarama kelompok WPNCL mengharapkan agar dukungan atas permohonan keanggotaan penuh WPNCL sebagai wakil *West Papua* di MSG, (aplikasi permohonan yang telah dimasukkan tanggal 28 Januari 2013) dan PM Frank Bainimarama menyatakan bahwa akan dilakukan proses permohonan keanggotaan tersebut sesuai prosedur serta mendiskusikannya dalam pertemuan *Senior Official* MSG bulan Juni 2013 sebelum dibahas di pertemuan para Menlu MSG dan *Leader Summit* yang akan datang.

3. Pada tanggal 20 Maret 2013, di depan KBRI Canberra Australia telah berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh *Democratic Labor Party (DLP)* Cabang *New South Wales* (pendukung perjuangan *Free West Papua*) yang dipimpin oleh Antony Craig dan June Craig diikuti oleh Fitzgerald K Wall dari *Australia West Papua Association (AWPA)* Canberra dan 1 orang warga Papua yang membawa Bendera Bintang Kejora dan lambang Partai DLP. Dalam aksi tersebut tuntutan yang disampaikan antara lain agar Pemerintah Australia menghentikan hubungan baiknya dengan Pemri dan memberikannya kepada perjuangan kemerdekaan Papua Barat serta menghentikan bantuan kepada Apkam RI yang menggunakan uang pajak Australia, meminta PBB melakukan aksi atas tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua Barat dan menyatakan memiliki bukti tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua Barat, meminta agar Pemri memberikan kesempatan dialog bagi masyarakat Papua Barat serta memberikan penentuan nasib sendiri dan DLP akan terus melakukan kampanye *Free West Papua* di Australia dan ke masyarakat Internasional khususnya PBB.

4. Pada tanggal 12 April 2013, di depan KBRI Washington DC telah berlangsung aksi unjukrasa yang diorganisir oleh kelompok *Amnesty International*

menuntut pembebasan Filep Karma. Aksi tersebut dilakukan  $\pm$  79 orang warga Amerika Serikat sambil membentangkan poster dan spanduk.

5. Pada tanggal 28 April 2013, di 106-108 Cowleg Place, Oxford, OX4 1 DP, UK telah berlangsung peresmian Kantor FWPC-UK oleh LSM *Free West Papua Campaign* (FWPC) yang diinisiasi oleh Benny Wenda selaku Ketua FWPC dan dihadiri oleh  $\pm$  70 orang pendukung FWPC. Turut hadir dalam acara tersebut adalah *The Lord Mayor of Oxford*, Mohammed Niaz Abbasi, Andrew Smith MP (Labour Party/IPWP), Jennifer Robinson (ILWP), Professor Charles Forester (ILWP), Maria Wenda (FWPC/Istri Benny Wenda), Paul Aiton (Selebriti/pemain rugby asal PNG), Clare Harding (penyandang dana pengadaan kantor baru FWPC), Ester Stanford (Pemilik *Radio Black Community* di London) dan Oridek AP beserta para pendukung FWPC dari Belanda. Kegiatan yang telah dipropagandakan di situs FWPC tersebut telah mendapat perhatian media elektronik di Indonesia dan seolah-olah menyatakan bahwa Pemerintah Inggris telah mempermalukan Indonesia dengan adanya kehadiran *Lord Mayor Oxford* dalam acara peresmian kantor FWPC tersebut.

6. Pada tanggal 6 Mei 2013, di pinggir taman *Grosvenor Square*, seberang jalan depan KBRI London telah berlangsung unjuk rasa tentang Papua yang dilakukan oleh *Free West Papua Campaign* (FWPC). Aksi tersebut diikuti sekitar 14 orang yang terdiri dari 8 orang dewasa dan 6 orang anak-anak. Selama aksi, pengunjung rasa mengibarkan bendera Bintang Kejora, bendera PNG dan Inggris serta membawa spanduk, plakat dan meneriakkan yel-yel "*Free West Papua*", "*Indonesia shame on you*", "*Indonesia Get Out of Papua*" dan "Papua Merdeka". Plakat yang usung diantaranya menggambarkan foto Presiden RI disertai tulisan *WANTED* dan menuduh telah melakukan genosida dan kejahatan HAM di Papua.

7. Pada tanggal 13 Mei 2013, di depan KBRI Den Haag telah berlangsung unjuk rasa oleh kelompok *Free West Papua Campaign* (FWPC) yang diikuti  $\pm$  20 orang pimpinan Oridek Ap. Aksi unjuk rasa tersebut merupakan salah

satu bentuk protes atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua serta jatuhnya korban pada tanggal 1 Mei 2013 yang bertepatan dengan 50 tahun serah terima kedaulatan Papua dari Belanda kepada UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*).

8. Pada tanggal 6 Juli 2013, di depan gedung KBRI London telah berlangsung aksi unjuk rasa (demonstrasi) oleh kelompok anti RI, *Free West Papua Campaign (FWPC)* pimpinan Beny Wenda. Aksi demonstrasi tersebut diikuti oleh sekitar 25 orang yang terdiri dari 8 orang dewasa berwajah Melanesia dan 12 orang kulit putih serta 5 orang anak-anak berwajah Melanesia. Dalam demonstrasi kali ini, mereka membawa sebuah spanduk, beberapa bendera bintang kejora, serta beberapa photo provokatif tentang pelanggaran HAM di Papua.

9. Pada tanggal 15 Agustus 2013, di Depan Stasiun *Holland Spoor (HS)* Den Haag Telah Berlangsung Aksi Demonstrasi Oleh Kelompok/Simpatian FWPC. Aksi tersebut dipimpin oleh Demianus Koerni (aktifis garis keras Papua) dan diikuti sekitar 50 orang yang terdiri dari mayoritas orang keturunan papua, 8 orang kulit putih dan 6 orang anak-anak. Para demonstran kemudian bergerak menuju Gedung *Haagse Toren* sambil menyanyikan lagu dan tarian Papua, serta membawa spanduk pembukaan Kantor FWPC dan 2 bendera Bintang Kejora.

10. Pada tanggal 15 Agustus 2013, di Gedung *Haagsche Toren/The Hague Tower* Jl. Rijkswijkseplein 786 Den Haag Belanda telah diadakan pembukaan kantor perwakilan FWPC di Den Haag oleh kelompok FWPC yang dihadiri sekitar 70 orang. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Benny Wenda dan Oridek Ap (OPM Belanda).

11. Pada tanggal 27 Agustus 2013, di depan Konsulat Jenderal RI Melbourne telah berlangsung aksi unjuk rasa oleh kelompok pendukung *Freedom Flotilla* dengan pembicara Shirley Shackleton (janda reporter Greg Shackleton/*Balibo Five*) yang juga ikut aktif dalam *Freedom Flotilla Lusitania Express ke East Timor* tahun 1992, Natalie Pa'apa'a (anggota *music Blue King*

*Brown*) dan Piter Elaby (aktivis *West Papua*). Adapun tujuan aksi ini untuk mendukung *Freedom Flotilla Lake Eyre* ke Papua Barat dan menyatakan kekhawatirannya atas keselamatan kelompok/aktivis *Freedom Flotilla* yang akan memasuki wilayah Indonesia.

12. Pada tanggal 29 Agustus 2013, di depan KBRI Den Haag Belanda telah berlangsung aksi unjuk rasa oleh sekelompok orang yang tergabung dalam "*Free West Papua Campaign Netherland*" dan "*Freedom Flotilla to West Papua*" yang diikuti oleh sekitar 37 orang yang sebagian besar terdiri dari warga Belanda asal Papua, warga Belanda asal Maluku dan warga Belanda asli serta pendatang lainnya yang dipimpin oleh Oridek AP, Henri Sapioper dan Mansorak Ap dengan maksud menyuarakan dukungannya terhadap kegiatan pelayaran yang dilakukan oleh *Freedom Flotilla* dari Australia menuju Papua Barat. Dalam aksinya pengunjung rasa membawa spanduk, mengibarkan Bendera Bintang Kejora, Bendera RMS, Bendera Peace Foltilla, Poster dan memutarakan lagu-lagu bertemakan Papua Merdeka serta mengenakan *t-shirt* Papua Merdeka.

13. Pada tanggal 1 Desember 2013, di depan KJRI Sydney Australia telah berlangsung aksi demo oleh pendukung *Free West Papua* Sydney, yang diikuti 10 orang kulit putih dan Fransiscus (warga Papua). Aksi ini dipelopori oleh Antony Craig (AC) dari *Democratic Labour Party* cabang NSW, Joe Collins (Ketua AWWA), Andrew Johnson (AWWA Sydney) dan Camelia Web-Ganoon (Koordinator CPACS) bersama partnernya.

14. Pada tanggal 1 Desember 2013, di *City Hall Newcastle City Council* telah berlangsung pengibaran bendera Bintang Kejora dan melakukan kegiatan informasi *Stall di Civic Park City Hall* oleh kelompok pendukung *Free West Papua* Amanda dan Michael Freund (AWWA) *Newcastle* yang didukung oleh dua orang Papua/aktivis *Free West Papua* yang tinggal di Newcastle. Selain unjuk rasa para aktivis juga menyebarkan pamflet yang berisikan kampanye /propaganda *Free West Papua*.

15. Pada tanggal 1 Desember 2013, Di *Federation Square* Melbourne Australia telah dilaksanakan penyambutan Jeremy Bally "*Pedalling for Papua*" dan pengibaran bendera Bintang Kejora serta melakukan orasi serta penampilan kelompok musik simpatisan *Free West Papua*. Orasi disampaikan oleh Joe Wally (Warga Papua) dilanjutkan dengan Senator Ricard Di Natalie (Partai Hijau) dan juga mantan pendeta Peter Wood serta beberapa aktifis *Free West Papua* dari Melbourne.

#### **4.2.5 Kisruh Pemilukada sebagai Proses Politik**

Dinamika politik di Papua dan Papua Barat secara umum diwarnai dengan penolakan hasil Pemilukada yang akhirnya harus diselesaikan lewat persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Berbagai alasan yang melatarbelakangi adanya sengketa Pemilukada diantaranya terkait masalah manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), terjadinya politik uang, pemilih diarahkan dengan memanfaatkan "sistem noken" dan penyalahgunaan jabatan untuk menekan bawahannya agar mendukung calon tertentu. Penyelenggaraan Pemilukada di Papua dan Papua Barat sering mengalami berbagai kendala mulai dari pelaksanaan yang tidak sesuai jadwal, mundurnya pelantikan kepala daerah terpilih, adanya gugatan pasangan yang kalah, serta aksi protes terhadap hasil perolehan suara dalam Pemilukada. Hal ini juga berdampak pada perkembangan situasi politik dan keamanan wilayah yang dapat memicu konflik horisontal. Kondisi tersebut menggambarkan belum siapnya infrastruktur dan tokoh politik lokal Papua dalam menyelenggarakan Pemilukada secara mandiri. Pendidikan politik kurang berjalan dengan baik, pemahaman terhadap Otonomi Khusus masih belum utuh, demikian pula terhadap kebijakan pemekaran wilayah yang selalu disikapi dengan apriori dan emosional. Tingkat kesadaran masyarakat Papua dalam berpolitik praktis melalui proses demokrasi masih rendah, sehingga ketidaksiapan masyarakat dari segi wawasan dan mentalitas sangat mempengaruhi persepsi dan ekspektasi masyarakat terutama menyikapi hasil Pemilukada.

Munculnya usulan pemekaran beberapa wilayah merupakan salah satu solusi atas ketidakpuasan proses demokrasi di wilayah tertentu.

Kerusuhan sosial yang diakibatkan oleh kekisruhan pemelukada provinsi maupun kabupaten/kota tidak terlepas dari struktur masyarakat Papua yang heterogen. Masyarakat Papua terdiri dari lebih 255 suku/etnis yang sangat sulit disatukan dan terjadi rivalitas di antara mereka. Akan tetapi menjadi satu harapan untuk menyelesaikan masalah karena digunakannya Bahasa Indonesia oleh hampir semua suku yang ada sehingga hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Bahasa persatuan orang Papua adalah Bahasa Indonesia.

#### **4.2.6 Disparitas Ekonomi dan Sosial Budaya**

Perbedaan tingkat ekonomi dan kesempatan bekerja serta jumlah pengusaha yang tidak berimbang antara orang asli Papua dan masyarakat pendatang berdampak timbulnya kesenjangan sosial dan menjadi potensi kerawanan. Tuntutan dibentuknya Kamar Adat Pengusaha Asli Papua, mengindikasikan sistem ekonomi belum mendorong pemberdayaan pengusaha orang asli Papua dan cenderung didominasi pengusaha pendatang. Upaya Pemda Papua memperkecil kesenjangan dengan pembukaan lapangan kerja dan kesempatan kerja mengacu pada Otonomi Khusus dan rekomendasi MRP dengan perbandingan 80 : 20 (80% calon pegawai dari penduduk pribumi dan 20% penduduk pendatang) belum mampu mengangkat derajat dan kesetaraan dalam persaingan sektor formal karena rendahnya kualitas SDM penduduk asli dibandingkan pendatang. Perekonomian rakyat belum dapat dikembangkan dengan baik, mengingat sebagian besar masyarakat Papua masih bersandar pada alam atau produksi lahan sendiri dan upaya pengembangan lahan produksi selalu terkendala dengan persoalan hak ulayat. Tidak sedikit permasalahan sengketa lahan antar pemilik tanah ulayat dengan pembeli baik yang berasal dari perorangan ataupun instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Pemenuhan kebutuhan ekonomi, khususnya di daerah tertentu berupa sembako dan kebutuhan pokok

lainnya, masih tergantung pada sarana transportasi udara, sehingga terjadi fluktuasi harga.

Pandangan beberapa masyarakat Papua bahwa Pemerintah tidak cukup serius menerapkan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus, sehingga dianggap gagal dari aspek ekonomi yang berakibat pada keinginan sebagian masyarakat Papua untuk mengembalikan kebijakan Otsus kepada pusat. Kondisi masyarakat orang asli Papua yang berbeda dengan para pendatang dari wilayah lain baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur sehingga menimbulkan kecemburuan dan keraguan masyarakat Papua terhadap keseriusan pusat di dalam mengelola Provinsi Papua dan Papua Barat. Meskipun demikian harus diakui bahwa implementasi UU 21/2001 membawa dampak positif dengan menurunnya angka kemiskinan dan sebagian besar pejabat di Papua adalah orang asli Papua, serta dari aspek pendidikan telah banyak masyarakat Papua yang melanjutkan studinya ke perguruan tinggi karena mendapat beasiswa. Untuk mempercepat akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, maka Pemerintah Presiden SBY menetapkan Perpres 66/2011 tentang Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Dari institusi ini sangat diharapkan akan mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya bagi orang asli Papua.

Ketahanan sosial masyarakat di Prov. Papua sangat memprihatinkan atau dapat dikatakan berada pada titik yang sangat rendah. Perang suku, perang kampung, bentrok antar orang asli Papua dan pendatang rentan terjadi. Fenomena hak ulayat menjadi persoalan krusial bagi Pemda, pengusaha, Apkam maupun komunitas adat setempat. Sementara dari pihak pemerintah tidak ada keberanian untuk mengambil sikap bahwa sebenarnya hak ulayat tidak bisa disamakan dengan hak milik. Tuntutan tanah hak ulayat dari masyarakat adat bersifat temporer dan tidak berlanjut dengan upaya hukum namun bersifat laten. Penyelesaian permasalahan secara adat dalam bentuk ganti rugi atau dengan istilah "uang ganti

kepala”, kerap lebih efektif menyelesaikan permasalahan sehingga penerapan hukum nasional cenderung terabaikan, seperti pada kasus kecelakaan, pembunuhan dan perzinahan. Sikap kesukuan masih cukup kuat, sehingga apabila timbul pertengkaran perorangan dengan suku lain dapat memicu perkelahian yang lebih luas dan mengarah pada perang suku.

#### **4.2.7 Persoalan PT. Freeport Indonesia**

Sebagai perusahaan kontrak karya PT. Freeport Indonesia mayoritas sahamnya dimiliki oleh Freeport – Mc Moran Cooper & Gold, sisanya dimiliki oleh PT. Indocooper Investama Cooperation dan Pemerintah RI. Permasalahan terus mengemuka sejak perusahaan ini beroperasi karena mendapat protes keras dari masyarakat lokal, yang menilai akan adanya kerusakan lingkungan besar-besaran. Suku Amungme dan suku Kamoro menyampaikan protes keras kepada PT. FI maupun Pemerintah berkaitan dengan masalah lingkungan, hak tanah ulayat dan sedikitnya orang asli Papua yang menjadi karyawan pada saat itu. Akhirnya muncullah salah satu tokoh Suku Amungme Tom Beanal yang dapat menjembatani permasalahan antara masyarakat lokal dengan perusahaan kontrak multi nasional tersebut, Tom Beanal sekaligus diangkat menjadi komisaris perusahaan. Meskipun masih sering terjadi protes dan demonstrasi namun dialog terbuka lebar untuk mencari solusi terbaik, contohnya dengan membangun RS. Mitra Masyarakat dan RS. Banti yang bekerjasama dengan Yayasan Caritas. PT. FI memberikan kompensasi kepada Suku Amungme dan Suku Kamoro sebagai dana perwalian sebesar US\$ 500,000 setiap tahun untuk masing-masing suku. Sehingga perusahaan harus mengeluarkan dana sebesar US\$ 1 juta setiap tahun untuk kedua suku asli tersebut. Dana perwalian itu tidak dapat diambil hingga kontrak karya PT. FI selesai, yang boleh diambil hanya bunganya. Ada bantuan lain yang langsung dapat dirasakan oleh Suku Amungme dan Suku Kamoro yakni berupa dana 1% dari laba kotor perusahaan, yang dialokasikan untuk pengembangan masyarakat. Dari dana 1% inilah yang digunakan untuk memberikan beasiswa kepada 7.000 pelajar orang asli Papua yang ada di sekitar lokasi perusahaan.

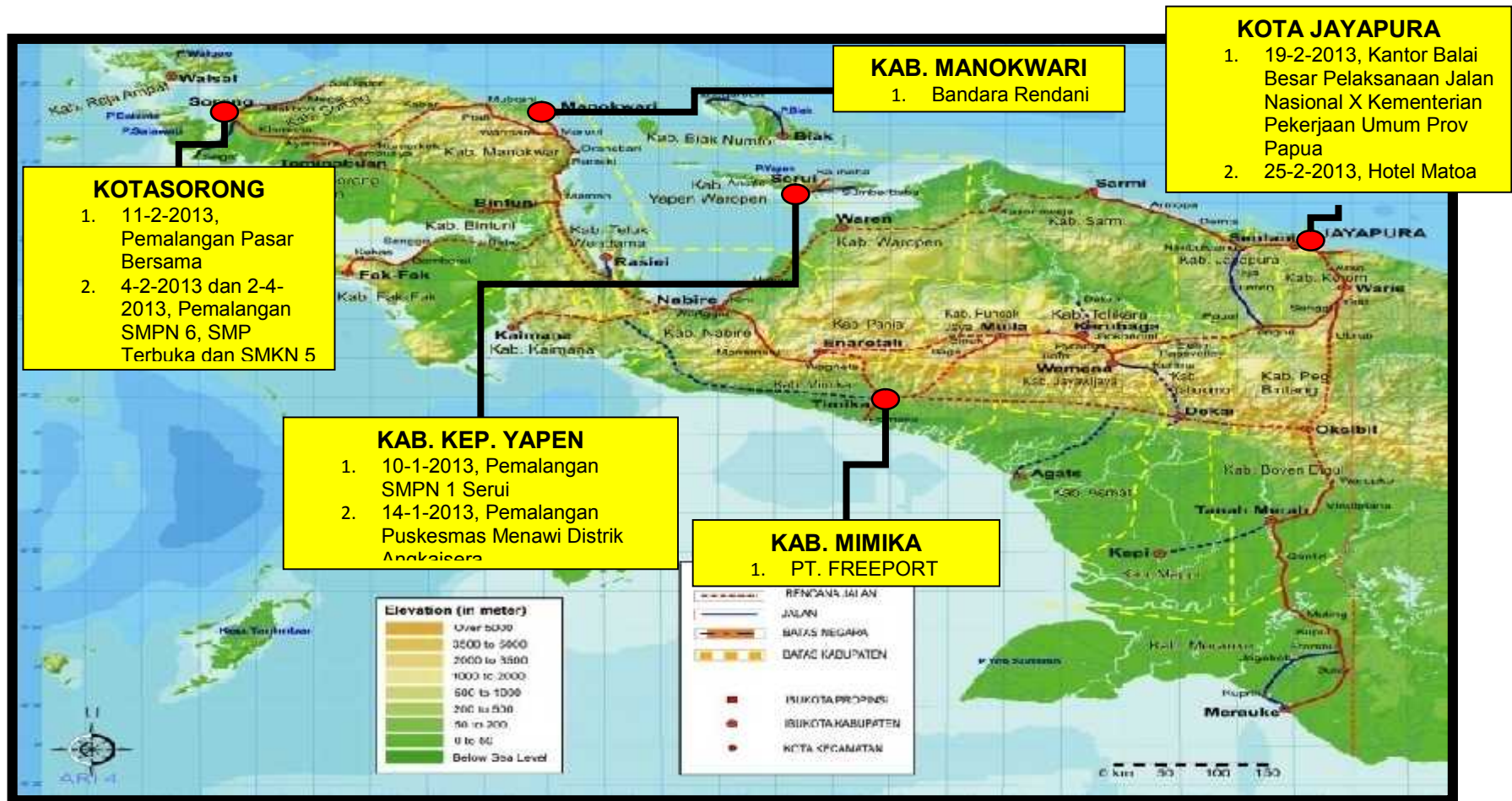
(Dirjen Strahan Kemhan RI, Analisa Tentang Potensi Konflik di Papua dan Pengaruhnya Terhadap Pertahanan Negara, Kemhan, Jakarta, 2011, hal 99-104)

Keberadaan PT. FI tidak terlepas dari incaran Gerakan Separatis Bersenjata Papua TPN/OPM yang selalu mengganggu situasi keamanan di sekitar perusahaan. Kelompok Tenny Walik dan Goliath Tabuni menjadi kelompok yang paling intens mengganggu, bahkan tidak segan-segan melakukan pengrusakan alat-alat berat, penculikan, penghadangan, penembakan, pembunuhan kepada masyarakat maupun karyawan ataupun perampasan persenjataan yang dimiliki oleh TNI/Polri yang bertugas. Kelompok ini menutup segala bentuk dialog dan menyatakan bahwa kemerdekaan Papua merupakan harga mati. Meskipun jumlah personel dan senjata relatif kecil, namun kelompok ini cukup disegani oleh masyarakat Papua pegunungan, karena menguasai medan dan pengaruhnya kuat.

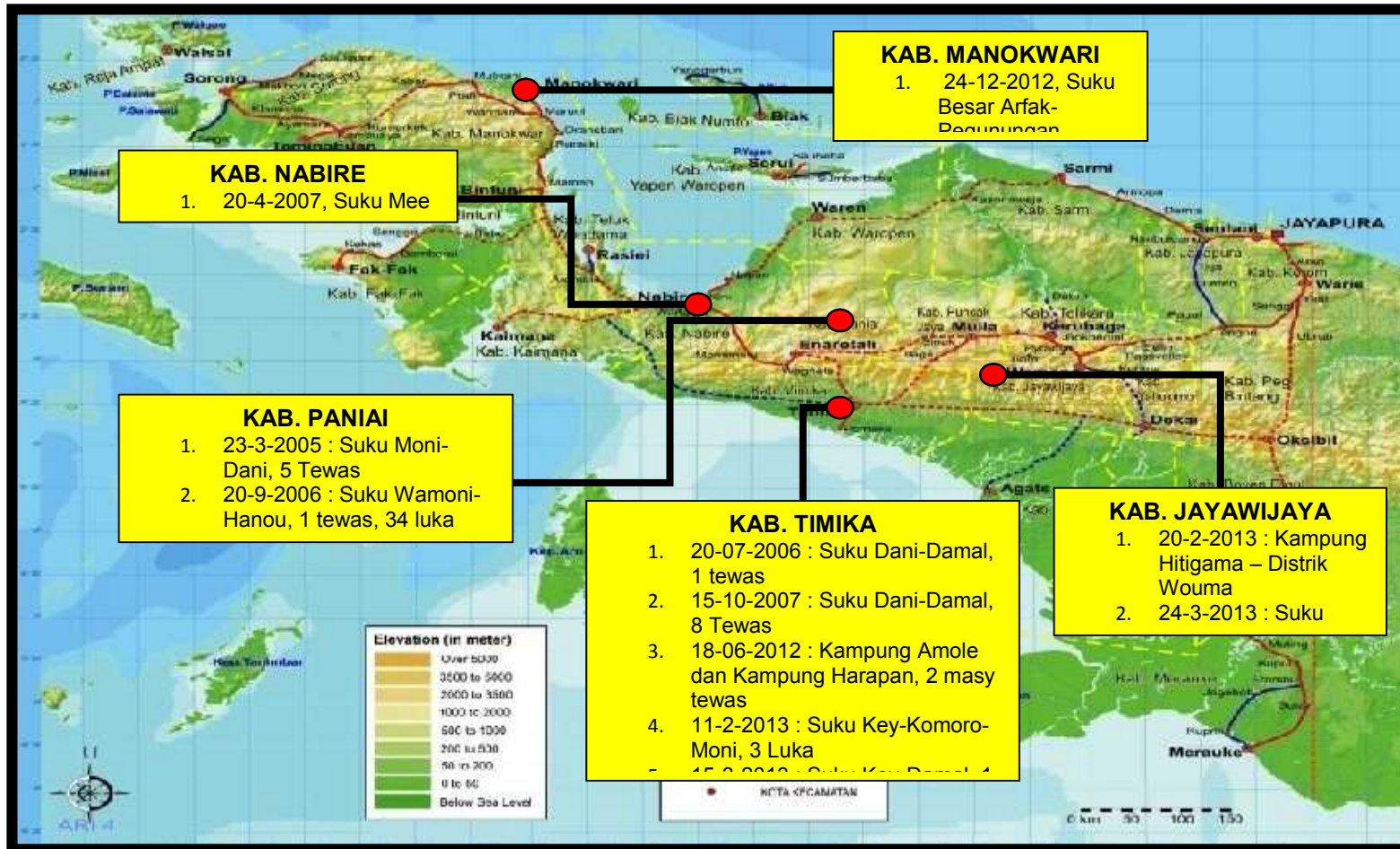
Pada awal tahun 2014, PT. FI menghadapi permasalahan kebijakan Pemerintah dengan diberlakukannya UU 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara (Minerba), yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) 1/2014 tentang Pelaksanaan UU Minerba, khususnya terkait dengan kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang berlaku efektif mulai tanggal 12 Januari 2014. Kebijakan ini mengharuskan seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia tidak boleh mengirim konsentrat (bahan mentah) langsung ke luar negeri untuk kepentingan ekspor, kecuali batu bara yang merupakan hasil akhir penambangan. Hingga waktu yang ditentukan PT.FI belum membangun *smelter* (pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat). Saat ini PT. FI belum memiliki *smelter* dan hanya mau mengolah dan memurnikan 30% dari total konsentrat yang diproduksinya di *smelting* Gresik, Jawa Timur. Penolakan mendirikan *smelter*, karena dari segi ekonomi manajemen PT. FI lebih diuntungkan jika mengekspor langsung konsentrat mentah sehingga dapat memanipulasi jumlah bahan mineral yang di ekspor yang tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan ke Pemerintah dimana hal ini berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dibayar. Di samping itu adanya kekhawatiran Pemri mengontrol dan mengetahui jenis-jenis mineral yang

terkandung di dalam konsentrat mentah yang diekspor selama ini. Hal yang dikhawatirkan adalah menumpuknya hasil produksi tambang berupa konsentrat tetapi tidak bisa seluruhnya diolah, dampaknya akan terjadi PHK besar-besaran karyawan sampai dengan berdirinya *smelter*. Dihadapkan dengan pemberlakuan UU 4/2009 dan PP 1/2014 walaupun PT. FI tidak secara terus terang menolak UU dimaksud, namun munculnya organisasi *Papua Brotherhood* merupakan bentukan manajemen PT. FI telah menimbulkan gejolak diantara karyawan. Di satu sisi SPSI mendukung UU tersebut sementara *Papua Brotherhood* dengan melakukan manipulatif mengatasnamakan seluruh karyawan meminta dukungan DPRD Kab. Mimika untuk menolak pemberlakuan UU 4/2009. Hal ini merupakan ditengarai sebagai bagian dari skenario manajemen PT. FI dan pihak tertentu untuk mengeliminir SPSI yang selama ini lebih sering menentang kebijakan manajemen PT. FI. Pemerintah bersama dengan PT. FI masih mencari solusi terbaik agar tidak terjadi PHK, yang pada muaranya akan membuat suasana tidak kondusif.

Masalah perusahaan dengan karyawan sudah dapat ditemukan solusi yakni terkait tuntutan kenaikan upah karena pekerja menilai gaji mereka jauh di bawah standar gaji karyawan Mc Moran Cooper & Gold di sejumlah negara lain yang upahnya mencapai US\$ 15/jam, namun manajemen PT. FI hanya menyanggupi kenaikan sebesar 30%. Persoalan ini akhirnya dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara PT. FI dengan pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Hal-hal yang disepakati diantaranya PT. FI meningkatkan upah dasar sebesar 24 % pada tahun pertama yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2011 – 2012 dan 13 % pada tahun kedua yang berlaku pada 1 Oktober 2012 – 30 September 2013. Perusahaan juga memberikan peningkatan manfaat termasuk peningkatan tunjangan perumahan, bantuan pendidikan dan tabungan pensiun, selain itu tidak ada lagi sanksi bagi karyawan yang mengikuti aksi-aksi demo dan mogok kerja. Agar hubungan industrial antara karyawan dan manajemen tetap berjalan dengan baik, maka pihak perusahaan memperlakukan karyawan sebagai *human capital* yakni sebagai mitra kerja/usaha yang menikmati keuntungan dan tanggung jawab bersama, bukan sebatas alat usaha dan *profit oriented* semata.



Gambar 13 : Peta Situasi Sengketa Lahan di Papua



Gambar 14 : Peta Situasi Perang Suku di Papua

### 4.3 Upaya Mengagendakan isu Papua di PBB

Setelah pengesahan resolusi 2504 (XXIV) terkait Laporan Sekjen PBB mengenai hasil Pepera (*Act of Free Choice*) tahun 1969 sebagai implementasi *Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian)/New York Agreement*, isu “West Papua” tidak lagi dimuat dalam agenda PBB. Namun demikian, dengan semakin meningkatnya kampanye aktivis pro “M” di luar negeri yang utamanya terfokus pada upaya memisahkan wilayah Papua dari NKRI, upaya untuk mencegah internasionalisasi kepentingan kelompok separatis tersebut di PBB dan forum internasional lainnya harus semakin diperkuat. Pengangkatan isu Papua dapat dilakukan, dalam konteks HAM maupun hak menentukan nasib sendiri yang dapat dikerucutkan menjadi isu pemisahan wilayah Papua dari NKRI.

#### 4.3.1 Melalui Negara-negara Anggota PBB

Pada pembukaan masa sidang tahunan MU PBB tanggal 28 September 2013, PM Vanuatu - Moana Karkas Kalosil meminta PBB untuk menunjuk *UN Special Envoy* (Utusan Khusus PBB) guna menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Propinsi Papua Indonesia dan status politiknya. PBB dinilai telah mengabaikan penderitaan masyarakat Papua dengan hanya memikirkan perang Suriah. Kalosil menyatakan banyak catatan sejarah bahwa orang Melanesia di Papua Barat hanya dijadikan sebagai kambing hitam politik dalam mengeksploitasi sumber daya alamnya. Sebenarnya hal serupa pada tahun 2000 pernah disuarakan oleh Mantan PM Vanuatu Hon Barak Tame Sope dan Presiden Nauru Hon Bernad Dowiyogi, namun sejauh ini tidak ada tindak lanjut dari PBB.

Selain itu, Komite 24 (Komite Dekolonisasi SMU PBB) yang memiliki modalitas pemberian kesempatan bagi organisasi atau individu untuk menyampaikan petisi terkait dengan wilayah-wilayah yang belum memiliki pemerintahan sendiri (*Non Self Governing Territories (NSGTs)*), dapat juga digunakan untuk mengangkat situasi di Papua dimaksud. Melalui jalur C-24 ternyata suatu wilayah yang sudah pernah dihapuskan dari Daftar Wilayah

Dekolonisasi PBB, bisa kembali dimasukkan ke dalam Daftar dimaksud. Sebagai contoh, pada tanggal 18 Mei 2013, MU PBB melalui pemungutan suara menempatkan kembali *French Polynesia* ke dalam *UN list of Territories* yang perlu didekolonisasi, dan MU PBB meminta Pemerintah Perancis memfasilitasi secara cepat proses penentuan pendapat wilayah dimaksud. Resolusi tersebut dibawa oleh negara-negara yaitu Nauru, Tuvalu dan Kepulauan Salomon. Dengan dimasukkannya kembali wilayah ini maka daftar wilayah yang perlu didekolonisasi menurut PBB menjadi 17 wilayah. Papua Barat tidak termasuk dalam daftar. Meski terkesan bahwa resolusi ini mendapatkan suara konsensus, namun beberapa negara penting menunjukkan simpatiknya kepada Perancis. Inggris, AS, Jerman dan Belanda seluruhnya menyatakan “*disasosiasi*” dari proses pungutan suara. Begitu pula Perancis yang menyatakan bahwa negaranya tidak akan ikut serta dalam pungutan suara yang berakhir dengan “konsensus” dimaksud.

#### **4.3.2 Melalui Organisasi Negara Kawasan**

Activis pro “M” yang tergabung dalam *West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)* berupaya memasukkan negara *West Papua* dalam organisasi *Melanesian Spearhead Group (MSG)*. Hal ini didasarkan atas pertimbangan etnis, yakni orang Papua menjadi bagian dari etnis Melanesia. MSG berkantor pusat di Port Vila Vanuatu, saat ini menjadi bagian dari *Pacific Island Forum (PIF)* atau yang dikenal dengan *Forum Oceania*. PIF juga merupakan forum *intergovernmental organization* yang terdiri dari negara-negara di kawasan Pasifik Utara (*North Pacific*) dan Pasifik Selatan (*South Pacific*) serta Australia. PIF atau *Forum Oceania* memiliki *legal standing* di PBB sebagai *official observer*. Dari forum inilah sangat dimungkinkan semua isu terkait Papua dapat disuarakan bahkan diagendakan ke dalam salah satu Badan-badan utama (*main body*) atau badan turunan (*subsidiary body*) PBB. Strategi ini yang diambil oleh WPNCL agar West Papua masuk dalam MSG.

Keinginan WPNCL mendapat tanggapan dari MSG, dengan adanya kunjungan Delegasi Menlu MSG pada tanggal 11 – 15 Januari 2014 ke Jakarta dan Jayapura. Delegasi terdiri dari Ratu Inoke Kubuabola (Menlu Fiji), Rimbink Pato

(Menlu PNG), Soalaoi Clay Forau (Menlu Solomon Islands), Ratu Seremaia Tui Cavuliati (Dubes Fiji), dan Commodore Peter Ilau (Dubes PNG) bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta cabinet, selain itu juga melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur Papua, SMKN 1 Jayapura dan Bank Papua. Berdasarkan *press release* yang disampaikan pimpinan delegasi, menyatakan bahwa MSG tetap mendukung Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tetap menjadi bagian integral dari NKRI. Pertimbangan MSG, bahwa West Papua bukanlah sebuah negara berdaulat, dan tidak memiliki sistem pemerintahan. Adapun keinginan Vanuatu meloloskan proposal WPNCL yang didasarkan atas pertimbangan pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia selama lebih 50 tahun, tidak mewakili aspirasi negara-negara MSG.

Selain itu tercatat satu insiden ketika Sekjen PBB, menjawab pertanyaan wartawan mengenai Papua Barat, diberitakan bahwa “isu pelanggaran hak masyarakat Papua untuk menentukan nasib sendiri seharusnya dibahas di Komite Dekolonisasi”, pada konferensi pers di sela-sela KTT *Pacific Islands Forum (PIF)* di Auckland, Selandia Baru, tanggal 7 September 2011. Sekjen PBB sendiri telah mengeluarkan klarifikasi resmi yang secara tegas menolak pemberitaan dimaksud, in merupakan “*slip of the tongue*” seorang Ban Ki Moon. Namun demikian, hal ini menunjukkan bahwa tidak tertutup kemungkinan terdapat pihak-pihak yang menggunakan jalur Sekretariat PBB, termasuk Sekjen PBB, yang terus menghidupkan isu belum selesainya proses dekolonisasi di Papua Barat.

#### **4.3.3 Melalui NGO/LSM**

Ekspose via LSM dapat dilakukan pada forum-forum NGO di PBB, termasuk pada pertemuan-pertemuan *UN Permanent Forum on Indigeneous Issues (UNPFII)*. Anggota UNPFII terdiri dari pakar independen/non-pemerintah dan partisipannya adalah perwakilan masyarakat *indigeneous people* (pribumi), sedangkan delegasi pemerintah justru berstatus sebagai *observer*. Kelompok separatis Papua dan Maluku Selatan biasanya hadir pada pertemuan UNPFII dimaksud, baik atas nama organisasinya sendiri melalui LSM lain. Perlu digarisbawahi bahwa LSM yang dapat

hadir pada pertemuan UNPFII atau forum-forum PBB lain yang bersifat terbuka adalah LSM dengan *consultative status* yang diberikan ECOSOC atas rekomendasi *Committee on NGOs*. Terlihat adanya korelasi antara upaya pembahasan isu Papua Barat dengan menggunakan forum terkait dengan “*indigenous people*”. Oleh karena itu, strategi diplomasi perlu secara struktural dan komprehensif menyiasati bagaimana agar isu *indigenous people* tidak menjadi katalisator bagi tujuan-tujuan seperti ini:

1. Upaya untuk mengangkat isu “*West Papua*” melalui UNPFII telah dilakukan dalam pertemuan ke-12 UNPFII di New York, tanggal 20-31 Mei 2013, dengan pembahasan kajian “*Study on Decolonization of the Pacific Region*”. Kajian ini disusun oleh salah seorang anggota UNPFII, Ms. Vaimana Toki, di bawah mata agenda 8: *future work of the Permanent Forum, including issues of Economic and Social Council and emerging issues*. Studi dimaksud memuat rujukan mengenai “*West Papua*” dengan pokok-pokok, antara lain, sebagai berikut:

2. Masyarakat asli “*West Papua*” tengah memperjuangkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan merdeka, dan isu pelanggaran HAM di “*West Papua*” perlu segera ditangani sebagaimana telah dilaporkan oleh *Working Group Universal Periodic Review* pada bulan Juli 2012. Pelanggaran HAM dan kekerasan di “*West Papua*” juga dinilai telah mendekati genosida. Laporan tersebut merujuk kepada *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review* Juli 2012 (A/HRC/21/7). Adanya kekerasan yang luar biasa dimaksud dapat menjadi alasan untuk memberikan dukungan kepada kemerdekaan Papua Barat. “*West Papua*” dapat dimasukkan ke dalam daftar NSGTs mengingat:

- a. “*West Papua*” memenuhi kriteria NSGTs sesuai Resolusi 1514 (XV)
- b. “*West Papua*” sebelumnya pernah dimasukkan dalam daftar NSGTs
- c. Hak menentukan nasib sendiri telah ditegaskan dalam Pasal 3 *United Nations Declaration on the Rights of Indigeneous Peoples*.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Kaledonia Baru, French Polynesia, Hawaii, dan Papua Barat memiliki hak untuk *self determination*. Seluruhnya mengalami pelanggaran HAM yang tidak dapat diterima. Pihak terkait pada badan-

badan PBB perlu membentuk sebuah pertemuan kelompok ahli untuk melanjutkan proses dekolonisasi di Pasifik yang pada akhirnya memberikan rekomendasi untuk diberikannya kemerdekaan.

#### **4.4 Strategi Diplomasi Indonesia di PBB**

##### **4.4.1 Isu Prioritas Diplomasi Indonesia**

PTRI New York sebagai perwakilan terdepan dalam diplomasi multilateral Indonesia bertugas melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasional di PBB, dengan mengartikulasikan pandangan Indonesia mengenai berbagai isu yang menjadi perhatian serta mengupayakan kepentingan nasional dapat terakomodasi dalam keputusan-keputusan di forum PBB. Tugas tersebut dilakukan melalui berbagai jalur, seperti dengan berpartisipasi aktif dalam sidang-sidang PBB, berinteraksi dengan pihak badan-badan utama (*main body*) dan badan turunannya (*subsidiary body*), menjalin kerjasama dengan delegasi negara anggota lainnya, organisasi non pemerintah dan masyarakat madani internasional, serta berpartisipasi dalam berbagai kelompok kepentingan dan kawasan. Beberapa isu prioritas dalam diplomasi multilateral di PBB sebagaimana diarahkan Presiden RI dalam setiap pertemuan dengan Kepala Perwakilan RI selama ini adalah:

1. Mempertahankan integritas NKRI dan mencegah separatisme. Isu ini sangat terkait dengan upaya untuk mencegah pembahasan mengenai Papua dan isu residual HAM di tingkat PBB. Prioritas isu juga mencerminkan tekad Pemerintah di tingkat multilateral untuk menjaga batas dan luas wilayah RI sesuai hukum internasional.
2. Meningkatkan kerjasama *capacity building* dan kerjasama multilateral di bidang politik, perdamaian dan perlucutan senjata, demokrasi, pemberantasan korupsi, *good governance*, *counter terrorism* serta pemajuan perlindungan HAM.
3. Menindaklanjuti peluang kerjasama di bidang pertahanan, militer, *peacekeeping operations*, *peace building* dan *civilian capacity* di fora internasional.
4. Memantapkan posisi Indonesia sebagai salah satu *emerging countries* yang mempunyai peran signifikan di fora multilateral di bidang ekonomi,

pembangunan, lingkungan hidup, sosial dan kemanusiaan, termasuk kerja sama kawasan.

#### **4.4.2 Rencana Strategis Diplomasi Indonesia**

Proses diplomasi bukan hanya dilakukan secara singkat dengan sasaran satu atau dua negara saja, melainkan diplomasi telah dilakukan para pendiri bangsa (*founding father*) sejak NKRI diproklamirkan dan diakui oleh bangsa-bangsa dunia. Sebagai isu prioritas Pemerintah Indonesia pada berbagai forum bilateral maupun forum multilateral, maka isu Papua harus supaya tidak lepas dari NKRI harus mendapat dukungan dari sebanyak-banyaknya negara pihak (*states party*), termasuk negara-negara kawasan seperti *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), *Non Alignment Movement*/Gerakan Non Blok (GNB), *Islamic Organization Conference*/Organisasi Konferensi Islam (OKI), *European Union* (EU) maupun negara paling berpengaruh seperti AS, Rusia, China, India dan lainnya. Sehingga strategi diplomasi Indonesia harus dilaksanakan pada berbagai forum yang erat bersinggungan dengan isu Papua. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri, telah ditetapkan kebijakan-kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran (data diperoleh dari Laporan Tahunan PTRI New York Tahun 2013) sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan partisipasi Indonesia dalam diplomasi multilateral di forum PBB dan organisasi internasional lainnya yang berkedudukan di New York, dalam bidang; politik, keamanan dan hukum internasional serta ekonomi dan sosial budaya.
2. Memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam forum multilateral PBB dan organisasi internasional lainnya yang berkedudukan di New York, dalam bidang; politik, keamanan dan hukum internasional serta ekonomi dan sosial budaya.
3. Meningkatkan peran dan partisipasi Indonesia dalam upaya memelihara keamanan internasional dan perdamaian dunia.
4. Melaksanakan fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian dari rencana strategis tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kondisi strategis seperti globalisasi yang mengharuskan diplomasi Indonesia memperhatikan keterkaitan antara faktor internasional dan domestik. Kecepatan informasi, komunikasi dan interaksi dengan publik internasional dan domestik sangat menentukan keberhasilan misi diplomasi. Untuk itu penguasaan teknologi informasi, ketersediaan peralatan komunikasi yang modern serta jaringan yang luas menjadi faktor krusial untuk mencapai sasaran. Hal lain yang mempengaruhi adalah keanggotaan Indonesia pada sejumlah badan-badan utama (*main body*) dan badan turunan (*subsidiary body*) PBB yang menyebabkan isu krusial yang ditangani diplomasi Indonesia memiliki variasi besar. Konsekuensinya menimbulkan tuntutan khusus bagi seluruh diplomat beserta staf untuk mendalami dan memberikan kontribusi dalam penanganan isu-isu tersebut.

#### **4.4.3 Partisipasi Diplomasi Indonesia pada Sidang/Konferensi Internasional**

Strategi pencegahan isu Papua ke dalam agenda PBB yang menjadi isu Prioritas Pemerintah Indonesia, harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Keterlibatan dan partisipasi aktif delegasi Indonesia dalam berbagai persidangan dan konferensi akan sangat menentukan bentuk dukungan tersebut dari berbagai pihak. Berbagai partisipasi aktif yang telah dilakukan oleh diplomasi Indonesia pada berbagai persidangan dan konferensi internasional, diantaranya:

1. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu reformasi Dewan Keamanan PBB (*Security Council*). (*isu Papua dapat menjadi agenda DK PBB apabila ada Negara Anggota Tetap PBB yang mengangkatnya ataupun apabila ada isu luar biasa seperti pelanggaran HAM berat/genosida*).
2. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu revitalisasi Majelis Umum PBB (*General Assembly*). (*isu Papua dapat diangkat oleh salah satu atau beberapa anggota MU PBB pada forum pembukaan Sidang Umum MU PBB, seperti yang disampaikan dalam statement PM Vanuatu pada 28 September 2013, terkait isu HAM yang dituduhkan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia selama lebih dari 50 tahun*).

3. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu penguatan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). (*isu Papua dapat diangkat dalam forum UN Permanent Forum for Indigenous Issues (UNPFII) yang diselenggarakan setiap tahun, oleh aktivis pro "M" dan para simpatisannya*).

4. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu Sekretariat PBB. (*isu Papua dapat diagendakan oleh individu ataupun entitas melalui Sekretariat agar dibahas dalam badan PBB, seperti yang disampaikan oleh Eni Faleomavaega dan Donald Payne, anggota Kongres AS yang simpati terhadap perjuangan orang Papua*).

5. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu Senjata Pemusnah Massal (*Weapon Mass Destruction*).

6. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB (*UN peacekeeping operations*). (*sebagai bagian partisipasi aktif Indonesia khususnya TNI untuk mendapat dukungan di forum DK PBB, mengingat peacekeeping operations merupakan core business DK PBB dalam memelihara perdamaian dunia*).

7. Partisipasi aktif delegasi RI dalam penanganan isu *conflict prevention* dan *post-conflict peace building*.

8. Partisipasi aktif delegasi RI dalam penanganan isu terorisme dan kejahatan internasional.

9. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu senjata konvensional.

10. Partisipasi aktif delegasi RI dalam penanganan isu politik, hukum, dan keamanan pada persidangan forum Gerakan Non Blok.

11. Partisipasi aktif delegasi RI dalam penanganan isu politik, hukum, dan keamanan pada persidangan forum organisasi lainnya, termasuk Organisasi Kerjasama Islam.

12. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu HAM dan Demokrasi. (*isu Papua sangat memungkinkan dibawa dalam sidang Dewan HAM PBB, apabila ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan negara*).

13. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu informasi dan dialog antar agama (*interfaith dialog*).

14. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu Dekolonisasi. (Sekjen PBB pernah secara tidak sengaja menyatakan bahwa isu Papua dapat dimasukkan kembali sebagai salah satu *Non Self Governing Territories* yang dapat dibahas kembali dalam *Special Committee on Decolonization* (Komite-24) tentang Dekolonisasi. Namun akhirnya pernyataan tersebut diralat dan menyatakan bahwa pernyataan itu salah, dan tidak ditindaklanjuti)

15. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu Hukum Internasional.

16. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*). (*isu Papua masuk dalam program MDG's yang dicanangkan PBB, untuk peningkatan bidang kesejahteraan rakyat Papua*)

17. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu keuangan, kebijakan makro ekonomi serta perdagangan internasional.

18. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu kependudukan, migrasi dan iptek.

19. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu Lingkungan Hidup.

20. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu Kehutanan.

21. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu pembangunan sosial budaya dan kesehatan.

22. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu kesetaraan gender dan hak-hak kelompok rentan.

23. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

24. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu kegiatan operasional dan pendanaan pembangunan PBB.

25. Partisipasi aktif delegasi RI pada persidangan isu anggaran dan administrasi PBB serta kontribusi organisasi internasional.

26. Partisipasi aktif delegasi RI dalam penanganan isu ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup pada pertemuan Kelompok 77 dan China.

27. Partisipasi aktif delegasi RI dalam penanganan isu ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup pada forum kerjasama ekonomi lainnya termasuk kerjasama Selatan-Selatan.

#### **4.4.4 Strategi Diplomasi Indonesia pada Sidang UNPFII**

*United Nations Permanent Forum for Indigenous Issues (UNPFII)* sebagai salah satu badan turunan PBB, yang setiap tahun mengadakan pertemuan perwakilan komunitas *indigenous people* dari seluruh dunia, termasuk perwakilan dari Papua, maka PTRI New York sangat *concern* baik dari kegiatannya maupun dokumen-dokumen yang dihasilkannya. Terkait dengan isu Papua pada forum UNPFII, PTRI New York telah melakukan pendekatan khusus kepada anggota UNPFII, yakni Prof. Megan Davis dari Australia, serta dengan pihak Sekretariat UNPFII, untuk memperoleh gambaran mengenai pandangan UNPFII atas kajian dimaksud. Prof. Davis menyampaikan keprihatinan atas kajian tersebut yang dinilai sangat bias dan tidak mengindahkan kriteria penulisan kajian akademis yang kredibel. Dalam hal ini dirujuk khusus adanya rujukan dan tuduhan terkait terjadinya berbagai pelanggaran HAM yang mengarah pada tindak genosida di *West Papua*, yang disebutnya sebagai “*baseless*”. Yang bersangkutan juga menegaskan bahwa mengingat sensitifitas isu yang diangkat dalam kajian tersebut, yang tidak hanya mengundang keprihatinan banyak pihak, termasuk dirinya, Indonesia dan *countries concerned* lainnya, yaitu Perancis, Chile, dan Amerika Serikat (AS), maka kajian tersebut dipastikan tidak akan dimuat dalam laporan dan ditindaklanjuti dalam berbagai rekomendasi UNPFII sesi ke-12.

PTRI telah melakukan pertemuan dengan Ms. Valmaine Toki selaku penyusun kajian “*Study on Decolonization of the Pacific Region*”. Tercatat keprihatinan Ms. Toki dengan menyatakan dirinya “tidak mengira” politisasi dan ratifikasi atas kajian tersebut, yang tidak hanya mengundang protes keras dari berbagai pihak dan negara, namun juga berpotensi digunakan oleh sejumlah kalangan tertentu untuk mengedepankan agenda separatisme, yang jelas

bertentangan dengan *United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People* (UNDRIP) khususnya Pasal 3 (*self determination*) dan Pasal 46 (yang melarang bahwa upaya *self-determination* digunakan untuk tindak separatisme). Sebagai hasil pendekatan PTRI tersebut, Ms. Toki tidak menyebutkan “*West Papua*” pada saat memberikan pemaparan singkat mengenai kajian dimaksud pada tanggal 30 Mei 2013.

Pada saat pertemuan antara para anggota/pakar UNPFII dengan delegasi Negara anggota PBB yang dilaksanakan sekitar Mei 2013 sebelum pertemuan pleno UNPFII, PTRI telah menyampaikan keprihatinan atas penyusunan kajian tersebut, yang pada intinya memuat pokok-pokok hal yaitu:

1. Sebetulnya Indonesia mendukung *mandate* UNPFII dan menghargai berbagai kajian penting yang dihasilkan selama ini.
2. Namun menyangkan terjadinya berbagai proliferasi kajian yang menyulitkan negara-negara PBB mempelajari berbagai rekomendasi.
3. Menyangkan dan prihatin adanya kajian terkait dekolonisasi yang tidak mengindahkan kriteria kajian akademis yang baik serta memuat hal-hal yang bertentangan dengan UNDRIP dan madat UNPFII.

Ke depan, penting untuk terus memantau perkembangan isu dekolonisasi melalui forum UNPFII, khususnya mengantisipasi penyelenggaraan *World Conference on Indigenous Peoples* (WCIP) tanggal 22-23 September 2014. Dalam *global preparatory conference* WCIP di Alta, Norwegia, 10-12 Juni 2013, telah dihasilkan *Alta Outcome Document* berisi rekomendasi kelompok-kelompok *indigenous* untuk pertemuan WCIP dimaksud. Tercatat rekomendasi yang berpotensi untuk digunakan dalam menggulirkan isu dekolonisasi di bawah *Theme 3: Implementation of the Rights of the Indigenous Peoples*, yaitu:

Butir 10: *Recommend that States fully honour and in conjunction with Indigenous Peoples create conditions for the right of self-determination of the Indigenous Peoples including through formal decolonization processes to those Indigenous Peoples who seek it, and that all administering powers*

*of non-self governing territories take all steps necessary to eradicate colonialism in all forms and manifestations.*

Butir 11: *Recommend that States, in conjunction with Indigenous Peoples support the effective implementation of Indigenous Peoples' right of self-determination through providing financial institutions and donor organizations support the implementation of Indigenous Peoples' right of self-determination including through capacity building to achieve this end in all regions.*

Meskipun “*Study on Decolonization of the Pacific Region*” tidak masuk dalam rekomendasi UNPFII kepada ECOSOC, PTRI akan terus memantau perkembangan laporan UNPFII dalam konteks pertemuan substantive ECOSOC bulan Juli 2014 mendatang di Jenewa, Swiss.

Di samping itu, perlu terus dipantau dinamika dalam *Committee on NGOs* sebagai upaya untuk meminimalisir jumlah LSM yang dinilai merupakan elemen atau mendukung gerakan separatisme Papua. Dengan perubahan politik dalam negeri Vanuatu, dimana kabinet baru yang dipimpin Perdana Menteri Moana Carcasses Kalosil cenderung bersimpati dan mendukung gerakan separatisme Papua, yang telah mengangkat isu Papua dalam *statement* di sesi *general debate* di Sidang Majelis Umum ke-68 PBB, pada 28 September 2013 lalu.

#### **4.4.5 Strategi Diplomasi Indonesia menggalang Penolakan Penyamaan konsep *Self Determination* sebagai Konsep “*Independence*” atau “Merdeka”**

Strategi diplomasi internasional Indonesia, tidak hanya dalam kerangka sistem PBB, dapat dikembangkan untuk menggalang dan memposisikan bahwa konsep *self determination* tidak selalu diartikan sebagai konsep pemisahan diri (*external self determination*). *Self determination* yang banyak dipakai oleh negara adalah pemberian otonomi khusus atau otonomi luas (*internal self determination*). Pengembangan konsep seperti ini dilakukan oleh negara-negara yang juga

mengalami ancaman separatisme, meski negara-negara tersebut adalah negara-negara maju, seperti Kanada, Australia, AS.

Penggalangan dan pembelajaran Indonesia dalam menyempitkan makna *self determination* dapat dilihat dan dikaji dari keputusan Mahkamah Agung Kanada dalam kasus *Quebec*, kasus ini mengemuka ketika Pemerintah Kanada saat itu mengalami ancaman separatisme Propinsi Quebec, yang dikuasai oleh partai daerah yang berhaluan separatisme. Dalam keadaan kritis, Pemerintah Kanada meminta fatwa hukum Mahkamah Agung Kanada agar terdapat dasar hukum yang kuat dan kredibel untuk menolak separatisme Quebec yang akan dijalankan melalui referendum lokal pada tahun 1995. Mahkamah Agung Kanada, setelah mendengarkan pendapat berbagai pakar hukum nasional dan internasional, menyatakan bahwa *self-determination* tidak selalu diartikan pemisahan diri atau separatisme. Ruang lingkup *self determination* “normally fulfilled through internal self determination – a people’s pursuit of its political, economic, social and cultural development within the framework of an existing state” daripada melakukan *self determination* melalui pemisahan diri. (Supreme Court of Canada, Lihat *Quebec*, “Reference re Succession of Quebec”, Supreme Court of Canada (1998) “Reference re Succession of Quebec”, 2 S.C.R. 217, 37 International Leg, Mat. 1342 at <http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1998/vol2/html/1998scr20217.html>, paragraph 124).

Indonesia perlu menggalang “kerjasama” dengan negara seperti Kanada, sehingga memperkuat landasan hukum internasional dan nasionalnya. Sebagai negara yang demokratis maka kerjasama seperti ini akan membantu memperkaya pengetahuan hukum internasional aparatur negara. Kerjasama antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan pihak mitra di Kanada akan membantu memahami makna utama dari *self determination* yang dipraktekkan di negara maju lain sebagai pemberian otonomi luas/khusus. Indonesia juga dapat memanfaatkan peran dari para ahli hukum nasional dan internasional yang terlibat dalam pembuatan keputusan tersebut yang secara tidak langsung membantu Indonesia yang telah diakui oleh dunia internasional sebagai negara demokratis.

Terdapat keuntungan Orde reformasi saat ini dalam mengatasi masalah separatisme di Papua, mengingat kasus *Quebec* tersebut memberikan hubungan yang kuat antara hak suatu negara demokratis menolak pemisahan suatu wilayah dan telah terdapat preseden internasional yang kuat atas hal ini.

Dalam kasus *Quebec* tersebut dinyatakan bahwa hak untuk memisahkan diri hanya dapat diberikan dalam situasi *“in the most extreme cases and, even then, under carefully defined circumstances”*. Dari pemahaman kasus tersebut terlihat dua hal yang dapat menjadi alasan apa yang dimaksud *“extreme cases”* yaitu apabila terjadi pelanggaran berat HAM yang luar biasa dan adanya ketidakadilan utama ketidakadilan ekonomi terhadap penduduk asli. Dengan memahami cara berpikir *“komunitas internasional”* seperti ini akan memudahkan diplomasi Indonesia dan pendekatan intermestik Indonesia mengenai cara yang tepat untuk menggalang dan menghindari separatisme di Papua Barat. Pemahaman seperti ini akan membuat fokus diplomasi Indonesia adalah menghindari terdapat justifikasi separatisme atas dasar pelanggaran berat HAM, khususnya yang muncul setelah Pepera (bukan yang terjadi sebelum terjadinya Pepera) dan bagaimana memberikan jawaban yang tepat dan preskriptif yang tepat untuk menghadapi justifikasi bahwa terjadi penghisapan ekonomi di Papua. Inilah penggalangan modern yang perlu dilakukan oleh seluruh elemen aparat pemerintah termasuk dalam aspek diplomasi dan pendekatan intermestik.

#### **4.4.6 Strategi Intermestik: Menggabungkan konsep Internasional dan kondisi Domestik mengurangi Penggunaan Alasan “Penghisapan Ekonomi’ sebagai alasan permintaan “Merdeka”**

Diketahui bahwa diplomasi Indonesia di tingkat internasional menghadapi upaya separatisme Papua akan efektif, apabila Pemerintah Indonesia mampu mematahkan argumentasi aktivis pro “M” didukung *support groups* dan *solidarity groups* yang menyatakan adanya penghisapan ekonomi yang terus berlanjut di Papua. Dalam kaitan ini pendekatan yang dilakukan bukanlah diplomasi internasional tapi lebih meng-*address* permasalahan yang ada di tingkat domestik. Menjawab permasalahan ini pendekatan intermestik dapat dilakukan dan dapat

dipadukan *value* internasional dalam hal pengaturan ekonomi, khususnya dalam hal *natural resources* sebagaimana yang menjadi produk utama di Papua, dengan upaya untuk mengatasi separatisme.

Dalam tesis saya ini, pentingnya untuk melihat hubungan antara pengaturan *natural resources* dihadapkan dengan mengatasi atau mengurangi justifikasi perlunya separatisme Papua. Dalam literatur Hubungan Internasional studi ini sudah mulai mengemuka, khususnya studi-studi yang dilakukan di Afrika, namun dalam konteks studi di Asia hal ini masih kurang dilakukan (studi terkait hal ini dapat dilihat tulisan Paul Collier, *The Bottom Billion*, Oxford University Press, ISBN: 9780195311457) Dalam buku tersebut Collier menunjukkan adanya kaitan antara konflik dengan permasalahan *natural resources*, khususnya di dalam konflik-konflik di Afrika (sebagai contoh film *Blood Diamond* merupakan salah satu turunan dari hubungan konflik dengan penanganan SDA intan di Afrika). Dinyatakan bahwa terdapat hubungan korupsi dalam *extractive industries* dengan konflik di Afrika. Dalam catatan Bank Dunia, korupsi terbesar kedua di dunia berasal dari *extractive industries*. Menurut Collier hal inilah yang menyebabkan munculnya berbagai konflik internal dan konflik bersenjata di berbagai wilayah di Afrika. Apabila ini dapat “diatasi” dan dibuat transparan, maka Collier meyakini bahwa konflik di wilayah tersebut akan berkurang. Transparansi bukan hanya akan mengurangi kelompok miskin di negara tersebut (diistilahkan di Afrika adanya 1 milyar orang terjebak dalam tingkat yang paling miskin di dunia) tapi juga dapat mengatasi konflik. Cara pandang seperti ini mulai menjadi *mainstreaming* di tingkat global dan menjadi perhatian berbagai pihak di PBB. Bahkan pembahasan transparansi *extractive industries* mulai mengemuka di dalam forum G-20.

Tesis ini, setidaknya sebagai tahap awal, untuk menyadarkan kita di Indonesia bahwa studi terkait seperti ini perlu juga untuk dilihat dalam konteks konflik-konflik di Indonesia. Tentunya studi khusus terkait *intra state conflict* di Indonesia atau di Asia dihadapkan dengan *extractive industries* perlu masih didalami. Namun dalam tahapan awal, penulis memberanikan diri untuk mengangkat isu ini dan mengkaitkannya dengan upaya untuk mengatasi

separatisme di Papua. Tidak suatu kebetulan, bahwa konflik bersenjata dan separatisme yang relatif lama dan menyita energi di Indonesia, sebagaimana yang terjadi di Papua dan Aceh berada di wilayah yang memiliki sumberdaya alam luar biasa besar. Penulis juga meyakini mengapa konflik di Maluku Selatan “lebih mudah” diatasi dibandingkan di Papua dan Aceh karena tidak adanya unsur sumber daya alam yang besar di Maluku dibandingkan Papua dan Aceh. Studi lebih lanjut akan hal ini perlu dilakukan oleh penelitian lain. Namun demikian, tesis ini dapat mulai menyentuh hubungan antara konflik dengan masalah *extractive industries* di Papua Barat.

Dalam berbagai catatan, kelompok separatisme di Papua seringkali mengangkat bahwa salah satu alasan (selain masalah pelanggaran berat HAM) perlunya kemerdekaan Papua adalah adanya “penghisapan ekonomi” oleh pihak Pemerintah Pusat atas kekayaan alam yang luar biasa yang dimiliki Papua. Beberapa pihak menganggap Pemerintah Pusatlah yang mendapatkan keuntungan terbesar dari kehadiran PT. Freeport Indonesia, SKK Migas, kekayaan hutan/kayu yang dimiliki Papua, dll. Beberapa kasus korupsi yang terungkap dewasa ini misalkan dalam hal pembalakan liar juga memperkuat anggapan ini, apabila hal ini tidak diaddress oleh pemerintah Indonesia, maka di tingkat internasional terdapat anggapan bahwa benar terjadi penghisapan ekonomi oleh Indonesia hingga sekarang, dan terjadi anggapan yang bisa keliru dan kurang tepat menyatakan bahwa Otonomi Khusus yang dimiliki Papua tidak untuk kepentingan *indigenous people* Papua. Hal ini harus dikelola karena hal ini memperkuat argumentasi separatisme. Perlu kita catat, dalam kasus Quebec *extreme case* yang dimaksud, selain adanya pelanggaran berat HAM yang membuat masyarakat internasional dapat “menyetujui” separatisme adalah adanya penghisapan dan diskriminasi seperti diskriminasi ekonomi. Diskriminasi budaya Papua dinilai tidak muncul ke permukaan, namun diskriminasi SDA ini yang menurut penulis menjadi ancaman utama.

Strategi terbaik, dalam konteks intermestik, untuk mengatasi masalah ini adalah “menelanjangi” mitos bahwa selama ini pihak Pusat lah yang paling banyak menikmati keuntungan dari *extractive industries* di Papua. Strategi terbaik untuk

mengatasi hal ini adalah meningkatkan secara luar biasa transparansi pengelolaannya di Papua. Strategi terbaik untuk memutuskan argumentasi diskriminasi ekonomi di Papua adalah meningkatkan peran lembaga-lembaga kredibel pemberantasan korupsi Indonesia - seperti KPK dan PPATK - untuk berperan mengawasi transparansi sumber daya alam Papua. Dengan diputuskannya atau diperkecilnya mata rantai korupsi pada *extractive industries* di Papua maka akan memperkuat diplomasi internasional Indonesia untuk memagari NKRI.

Beberapa hal utama yang kongkrit bisa sebagai strategi meningkatkan transparansi *extractive industries* di Papua, diantaranya:

1. Sebagai tindak lanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pertanahan, dan sebagai pelaksanaan mandat Pasal 18b UUD, maka perlu didorong dibentuknya RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA). Dalam RUU MHA ini bukan hanya unsur HAM yang harus ditonjolkan namun juga RUU ini perlu membuat mekanisme yang sangat jelas dan ketat untuk mengontrol jalannya uang dan dividen dalam hal *extractive industries*. Saat ini konsep yang masih muncul dalam pembuatan RUU MHA masih hanya dalam sisi HAM, namun kurang dalam hal pemberantasan korupsi dan transparansi *extractive industries*. Peran PPATK, sebagai suatu badan yang cukup kredibel di Indonesia dalam melihat transaksi keuangan, dapat disebutkan secara jelas. Peran PPATK selama ini “hanya” terdapat di dalam UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), dan cukup berhasil dalam mengatasi upaya pidana *money laundering*. Sayangnya UU TPPU tidak memasukkan ruang lingkungannya kepada *extractive industries*. Dengan dimasukkannya di dalam RUU MHA terdapat peran PPATK untuk mengawasi *money laundering* dalam kegiatan *extractive industries* yang dilakukan oleh setiap orang maka *once and for all* isu transparansi penggunaan uang *extractive industries* dapat diselesaikan. UU otonomi khusus Papua tidak menjangkau isu ini. Adanya pengaturan tindak pidana dalam hal *extractive industries* di dalam RUU MHA akan memperkuat dua hal sekaligus, yaitu memperkuat pemberantasan korupsi (yang memang oleh Bank Dunia dinyatakan korupsi terbesar kedua adalah pada *extractive industries* setelah yang pertama adalah dalam kegiatan *public works*) dan

juga dapat mematahkan naratif selama ini yang menyatakan terdapat penghisapan SDA Papua Barat oleh Pemerintah Pusat. RUU MHA ini akan memperkuat UU otonomi khusus yang telah secara jelas membagi besarnya pendapatan Pusat dan Daerah dalam hal migas.

2. Penguatan transparansi *extractive industries* melalui RUU MHA ini juga dapat dilakukan dengan mengadopsi keinginan Bank Indonesia dan PPATK yang menginginkan bahwa transaksi di atas Rp 100 juta harus dilakukan melalui tranfser bank. Ide ini muncul dalam RUU yang lain. Namun cukup logis dan akan mendapatkan dukungan politis apabila khusus untuk RUU MHA segala transaksi di atas Rp 100 juta wajib melalui bank. Dengan adanya kewajiban ini maka transparansi *extractive industries* akan signifikan meningkat dan menghapuskan anggapan internasional yang dibuat oleh kelompok separatis bahwa selama ini terdapat “*grand strategy*” pemerintah Pusat untuk menghisap dan mengambil keuntungan dari SDA Papua. Apabila terdapat individu di Papua, termasuk individu dari kelompok separatis, yang menggunakan uang dari *extractive industries* untuk tujuan separatisme maka dengan mudah juga untuk dipidanakan.

3. *Revenue* dari *extractive industries* perlu dilakukan secara konsekuen hanya atas apa yang disebutkan di dalam Pasal 33 UUD 1945. Hasil keuntungan *extractive industries* ini hanya diperbolehkan untuk tujuan pendidikan, kesehatan, budaya, kesejahteraan. Tidak boleh *revenue* dari *extractive industries* untuk tujuan politik, termasuk untuk tujuan membiayai seseorang menjadi bupati atau gubernur di Papua. Konsep ini perlu lebih dikembangkan dengan melibatkan hakim aktif atau mantan hakim agung Mahkamah Konsitusi yang telah mengangkat isu ini dalam berbagai kasus yang ditanganinya di MK seperti masalah UU Migas waktu lalu. Dalam pasal 33 UUD sebetulnya terdapat pembatasan yang tegas untuk maksud-maksud apa saja *revenue extractive industries* tersebut dapat digunakan. Jika hal ini di tahap awal diimplementasikan dalam kaitan RUU MHA maka akan lebih mudah mendapatkan dukungan banyak pihak.

4. Dengan adanya RUU yang memiliki pasal-pasal sebagaimana hal tersebut, akan mudah bagi diplomasi Indonesia di luar negeri membuktikan kepada

dunia internasional bahwa sepenuhnya kegiatan *extractive industries* di Papua untuk tujuan-tujuan kesejahteraan utamanya warga Papua sendiri. Standar ini “melebihi” dari standar yang ada di negara lain, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara demokratis yang secara demokratis dan transparan mengatasi masalah separatisme di Papua. Dalam pembuatan RUU MHA, pihak Kemlu yang telah memahami isu ini perlu dilibatkan, disamping pula melibatkan pihak PPAK, KPK, UKP4, Kantor Kemenkopohukum dan pihak TNI serta Polisi.

#### 4.4.7 Strategi Diplomasi Mencegah Pepera Model Baru

*New York Agreement* tanggal 15 Agustus 1962 merupakan kesepakatan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dengan Pemerintah Indonesia yang difasilitasi PBB dan telah menetapkan *transfer of authority* Irian Barat (Papua dan Papua Barat) menjadi bagian integral NKRI. Kesepakatan penyerahan wilayah Papua Barat dilakukan pada tanggal 1 Mei 1963 melalui mediasi UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*). Selanjutnya PBB menyelenggarakan proses *Act of Free Choice*/Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 guna lebih meyakinkan keberpihakan orang asli Papua memilih Indonesia. Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969, perwakilan pemilih memutuskan dengan suara bulat bahwa Irian Barat/Papua merupakan bagian dari NKRI. Berikut tabel perbandingan peserta Dewan Musyawarah Pepera (DMP) dan total penduduk Papua Tahun 1969:

No	Kabupaten	Jumlah Pemilih	Perwakilan Kelompok
1	Merauke	144.171	175
2	Jayawijaya	165.000	175
3	Paniai	156.000	175
4	Fak-fak	43.187	75
5	Sorong	75.474	110
6	Manokwari	49.974	75
7	Teluk Cendrawasih	91.870	131
8	Jayapura	83.750	110

	<b>Jumlah</b>	<b>809.326</b>	<b>1.026</b>
--	---------------	----------------	--------------

**Tabel 1 : Hasil Pemungutan Suara Pepera Tiap Kabupaten Th 1969**

Akhirnya Sidang Majelis Umum PBB tanggal 19 November 1969 menerima dan menyetujui Pepera tersebut dengan mengeluarkan Resolusi Majelis Umum 2504/1969. Resolusi tersebut menjadi legitimasi bagi Pemerintah Indonesia membangun Papua dalam segala bidang termasuk fondasi politik masyarakat Papua yang berintegrasi dengan NKRI.

Dalam perjalanannya menghadapi kendala dan tantangan terhadap proses integrasi dan sebagian masyarakat Papua ingin meninjau kembali *legal aspect* produk PBB tersebut. Aktivis pro “M” menuduh bahwa Pepera 1969 tidak sah karena tidak sesuai dengan praktek Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yaitu dengan cara “*One Man One Vote*”, Satu Orang Satu Suara. Melainkan dilaksanakan menurut kebiasaan masyarakat Indonesia dengan sistem musyawarah, dimana banyak orang diwakili oleh satu suara. Sebagian kecil masyarakat orang asli Papua yang masih memiliki sikap politik yang bertentangan dengan integrasi Papua ke NKRI membentuk Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) yang tidak mengakui Pepera, kemudian pada tanggal 1 Juli 1971 di Markas Besar Victoria, Distrik Waris Kab. Keerom Prov. Papua memproklamkan hari kemerdekaannya. Hal tersebut selanjutnya diperingati setiap tahun sebagai hari kemerdekaan TPN/OPM dalam berbagai bentuk kegiatan. Tuduhan Gerakan Separatis Papua tersebut semakin *diblow-up* khususnya pada era demokrasi saat ini sebagai upaya untuk mencari dukungan dan simpati baik dari masyarakat Papua maupun internasional untuk meninjau kembali legalitas Pepera. Namun demikian tuduhan tersebut tidak berdasar karena Pepera sebagai implementasi Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962, dilaksanakan dengan disaksikan utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda sehingga bila benar terjadi kecurangan, ketidakadilan dan cacat hukum tentulah PBB melalui sidang majelis umum tidak akan menerima dan

mengakuinya. Keabsahan Papua dalam NKRI hingga saat ini masih terus mendapat pertentangan terutama oleh Gerakan Separatis Papua dengan terus menciptakan opini dan mengklaim 1 Mei 1963 sebagai hari aneksasi Bangsa Papua melalui aksi kekerasan bersenjata dan kegiatan politik lainnya.

Mencegah internasionalisasi peninjauan kembali Pepera dilakukan secara sistematis untuk meniadakan efektifitas propaganda aktivis pro “M” yang cenderung masuk ke berbagai sistem kehidupan di Papua, maupun dunia internasional. Mencegah kehadiran kelompok kepentingan yang dapat menawarkan keberpihakan kepada orang asli Papua sebagai sarana yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak adat dan tanah ulayat, salah satunya berupa kelembagaan yang menjadi representasi. Kelembagaan kultural yang resmi dalam sistem politik di Papua dhi. Majelis Rakyat Papua (MRP) lebih dioptimalkan agar benar-benar mewakili semaksimal mungkin kepentingannya di Papua. Berfungsinya MRP yang memfasilitasi aspirasi, keinginan dan tuntutan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik di Papua. Penegakan sistem hak adat berupa nilai, adat istiadat, hak ekonomi masyarakat adat dari sumber daya alam, dan hak politik masyarakat adat, diwadahi kelembagaan dengan dibentuknya MRP. Sesuai UU 21/2001 tentang Otsus Papua, MRP sebagai representasi kultural orang asli Papua memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak berdasarkan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan serta pemantapan kerukunan hidup beragama. Demikian juga berhak untuk memberi pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kab/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan hak-hak orang asli Papua. MRP adalah sebuah lembaga di provinsi Papua yang beranggotakan orang asli Papua berada setara dengan DPRD.

Media massa dalam sistem sosial memiliki peran dalam penyampaian pesan dan penyebarluasan informasi yang dapat memperkuat isu dan kebijakan ataupun sebaliknya. Media massa memiliki fungsi kontrol terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial maupun politik agar sistem dapat

berjalan sesuai regulasi dan legitimasi. Dalam rangka pembangunan masyarakat Papua media massa seyogyanya dapat menjadi mitra kerja pemerintah dalam rangka menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat agar mendapat dukungan, serta dapat berfungsi mengumpulkan dan mempublikasikan informasi yang mempunyai peranan penting untuk membangun kepercayaan, kredibilitas bahkan legitimasi pemerintah menjalankan tugasnya. Selain itu dapat memberitakan fakta dan sikap mendukung sebagian besar orang asli Papua terhadap integrasi Papua ke NKRI. Aktivis pro “M” telah memutarbalikkan fakta sejarah proses integrasi Papua ke NKRI sebagai proses Aneksasi Bangsa Papua, yang terus digelembungkan dengan bentuk berbagai aksi gangguan keamanan dan kegiatan politik. Hal ini sangat merugikan masyarakat Papua, karena pada kenyataannya kondisi saat ini hanya sebagian kecil orang asli Papua yang masih dipengaruhi paham bahwa Papua masih belum merdeka dan Pepera 1969 tidak sah. Dilain pihak fungsi dan peran media massa yang tidak sesuai undang-undang dan tidak berprinsip kepada kebangsaan perlu diarahkan oleh pihak yang terkait. Langkah berani telah dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe pada saat HUT RI tanggal 17 Agustus 2013 yang menegur wartawan yang cenderung mempropagandakan agen, dampaknya kalangan media massa menurun minatnya untuk memuat pemberitaan terkait propaganda aktivis pro “M”. Akibatnya tuntutan untuk menyuarakan *right of self determination* disebarluaskan secara *verbal* maupun dalam bentuk tulisan/selebaran, spanduk, baner dan bendera yang bertema pelurusan sejarah.

Pengakuan kedaulatan oleh negara lain menjadi salah satu syarat berdirinya suatu negara, hal ini disadari oleh aktivis pro “M” sehingga mereka berupaya mendapat perhatian dan dukungan negara-negara di dunia, dengan lobby dan pendekatan kepada pejabat negara di Eksekutif, Legislatif, NGO, *lawyers* maupun birokrasi PBB dikawasan Pasifik. Untuk mengaktifkan lobby di negara lain aktivis pro “M” membentuk *International Parliamentarians for West Papua (IPWP)*, *International Lawyers for West Papua (ILWP)*, *West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)* serta faksi-faksi lainnya yang merupakan *underbow* GSP diluar

negeri. Berbagai aksi dan kegiatan dilakukan oleh aktivis pro “M” untuk menginternasionalisasi permasalahan Papua dan berupaya agar isu Papua dapat dibicarakan dalam prosedur birokrasi PBB sehingga keabsahan integrasi Papua ke NKRI dapat ditinjau kembali. Untuk itu aktivis pro “M” aktif melakukan aksi tidak hanya wilayah Papua tetapi juga dengan membangun perwakilan di luar negeri seperti di Oxford, Inggris dan di Den Haag, Belanda dengan dukungan beberapa pejabat eksekutif, legislatif dan kalangan *lawyers* negara lain/internasional. Sarana prosedur birokrasi PBB yang mewadahi negara-negara Melanesian berupaya dipengaruhi aktivis pro “M” agar membicarakan dan mengangkat isu Papua Merdeka, kesamaan ras orang asli Papua dengan ras masyarakat negara-negara yang tergabung dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG) telah dimanfaatkan aktivis pro “M” untuk mencari simpatik. MSG yang berkantor pusat di Port Vila Vanuatu, merupakan wadah birokrasi PBB di kawasan Melanesian yang menyampaikan resolusi dan keputusannya kepada *Pacific Islands Forum* (PIF), selanjutnya diteruskan kepada Sidang Umum PBB dan sesi-sesi dengar pendapat dan rapat-rapat Komisi serta Sub Komisi di Kantor PBB. Apabila isu *West Papua* berhasil didaftarkan sebagai anggota MSG, maka secara resmi dalam birokrasi dan prosedur administrasi PBB, isu tersebut dapat menjadi bagian dari isu-isu PBB pada tingkat kawasan, kemudian meningkat ke tingkat PIF, kemudian ke tingkat Komisi dan Sidang Umum. Prosedur dan birokrasi inilah yang menjadi sasaran GSP berupaya menjadi anggota MSG dengan melakukan *lobby* kepada negara-negara anggota MSG. Pernyataan pejabat pemerintah beberapa negara anggota MSG telah diartikan oleh GSP sebagai dukungan Papua lepas dari NKRI. Demikian juga dipakai sebagai isu untuk memobilisasi dukungan masyarakat Papua di berbagai kota melalui berbagai kegiatan seperti jumpa pers, aksi unjuk rasa, selebaran, ibadah syukur dan temu kader. Aktivis pro “M” berupaya agar intensitas dukungan masuknya WPNCL sebagai anggota penuh MSG, dukungan kemerdekaan Papua dan desakan agar Vanuatu mengakhiri *Development Cooperation Agreement* (DCA) dengan Indonesia serta adanya keinginan agar keanggotaan Indonesia sebagai observer dibahas kembali dalam forum MSG yang dimotori organisasi *underbow* OPM semakin meningkat. Hal tersebut apabila tidak

segera dicegah secara *intensif* dan *komprehensif* akan merugikan posisi Indonesia di fora internasional. Demikian juga akan sangat menentukan besar kecilnya dukungan masyarakat kepada GSP dan sangat mempengaruhi stabilitas keamanan di Papua.

Kegiatan aktivis pro “M” dan organisasi *underbow*-nya terus meningkatkan kampanye *Free West Papua* di luar negeri, apabila dukungan masyarakat Papua kepada aktivis pro “M” berpotensi mendorong WPNCL diterima di MSG, maka hal tersebut akan berpengaruh buruk bagi diplomasi Indonesia di fora internasional.

Kolaborasi aktifitas di dalam negeri dan kampanye di luar negeri apabila tidak diimbangi akan membuahkan pertanyaan negatif masyarakat internasional atas peran RI di Papua setelah integrasi. Aktivis pro “M” berupaya mengefektifkan tuntutan peninjauan kembali integrasi Papua ke NKRI dengan menggulirkan isu secara sistematis melalui desakan agar MRP mendukung Kantor *Free West Papua Campaign* di luar negeri, mengangkat isu Papua dalam forum *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan mendesak Pelapor Khusus PBB segera ke Papua untuk memantau langsung situasi Papua. Propaganda dilakukan dengan isu mendeklarasikan Papua Barat menjadi anggota MSG, orang asli Papua mendukung penuh negara-negara anggota Melanesian untuk menerima Papua Barat sebagai keluarga besar MSG, hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua sudah disetujui oleh Indonesia dan Belanda melalui perjanjian *New York Agreement*. Aktivis pro “M” berupaya menekan agar MRP tegas berpihak kepada orang asli Papua dan tidak mendengarkan Apkam, MRP membela orang asli Papua yang ditahan pihak Kepolisian Polres saat melaksanakan aksi unjuk rasa dan berkontribusi terhadap masyarakat Papua yang ingin merdeka. MRP didesak agar mendukung proses pendaftaran Papua Barat menjadi anggota resmi MSG dalam KTT MSG di Kota Noumea New Caledonia. Rakyat Papua dan Papua Barat mendukung didaftarkan kembali Papua Barat sebagai anggota resmi MSG dalam forum KTT MSG 2013. MSG yang beranggotakan negara Vanuatu, Papua New Guinea, New Caledonia, Solomon Island serta Fiji dalam penyelenggaraan KTT Juni 2013 di Noumea, New

Caledonia, beberapa negara yang tergabung dalam MSG semula mendukung keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI dalam perkembangan terdapat tokoh dan pejabat negara yang mengindikasikan berubah komitmennya ditandai dengan pernyataan dukungan masuknya *West Papua National Coalition for Liberation* (WPNCL) sebagai anggota penuh MSG. Hal tersebut kemudian dijadikan kampanye oleh Gerakan Kelompok Separatis Papua (GKSP) untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat Papua dalam upaya memisahkan diri dari NKRI.

Strategi diplomasi Pemerintah dengan melakukan berbagai lobby di fora internasional agar negara sahabat tidak mendukung dan mengakui keberadaan OPM. Salah satunya dikawasan Pasifik Selatan dimana terdapat forum MSG yang beranggotakan negara Vanuatu, Papua New Guinea, New Caledonia, Solomon Island serta Fiji. Mengoptimalkan peran Athan/Penmil RI dalam melakukan pemantauan terhadap aktivitas WPNA dan kelompok pro "M" luar negeri di negara akreditasi ataupun di forum PBB memberikan kontribusi yang positif dalam rangka mencegah internasionalisasi isu Papua yang lebih luas. Memperkuat politik luar negeri Indonesia akan mempengaruhi negara anggota MSG yang telah mendukung Papua merupakan bagian integral NKRI dapat tetap pada pendiriannya. Dilain pihak negara anggota MSG yang masih mendukung upaya aktivis pro "M" mengangkat isu *West Papua* menjadi anggota tetap MSG dapat merubah sikapnya. Status Indonesia sebagai peninjau/*observer* di MSG dapat diberdayakan melakukan *lobby* internasional. Kedutaan di negara sahabat dalam setiap kesempatan melakukan lobby dan diplomasi yang dapat mempropagandakan fakta keberhasilan Pemri dalam memajukan Papua dan serta fakta aktivis pro "M" hanyalah kepentingan kelompok kecil yang masih berseberangan sikap politik dengan NKRI.

Selain itu Pemda Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Kodam XVII/Cendrawasih, Polda Papua dapat bekerjasama dengan lembaga adat dan lembaga terkait lainnya melakukan upaya untuk mengeliminir pengaruh aktivis pro "M" dan penggalangan tokoh adat, agama dan masyarakat asli Papua lainnya untuk tetap mendukung integrasi Papua ke NKRI. Seluruh strategi ini untuk mencegah

peninjauan kembali proses Pepera oleh PBB yang artinya akan dilakukan *Act of Free Choice*/Pepera gaya baru dalam bentuk referendum.

#### **4.5 Strategi Nasional Smart Approach dalam Penyelesaian Papua**

Dalam beberapa kali kesempatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu menyatakan menjadi pihak yang paling bertekad menata Papua dengan hati nurani, tanpa kekerasan yang lebih dikenal dengan *smart approach* (Kompas, Selasa 13 September 2011). Untuk mewujudkan tekad ini Pemerintah perlu mengedepankan harapan masyarakat Indonesia di tanah Papua, terutama harapan orang asli Papua. Tanpa memahami harapan mereka, segala upaya Papua dengan hati, meskipun dilakukan melalui berbagai program besar dengan dana melimpah belum tentu menjawab kebutuhan penduduk lokal. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Freddy Numbery (mantan Gubernur Papua, Dubes RI di Roma, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan) bahwa kegagalan proses integrasi Papua ke dalam NKRI sejak 50 tahun yang lalu adalah “Pemerintah belum mampu meng Indonesiakan orang asli Papua, sejajar dengan masyarakat Indonesia lainnya”.

Untuk menjawab beberapa anggapan negatif yang selalu dilontarkan oleh aktivis pro “M” bersama *support groups* dan *solidarity groups* bahwa orang asli Papua telah dimarginalisasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya; anggapan kasus pelanggaran HAM dan kekerasan negara yang dinilai tidak diselesaikan secara adil; anggapan *incomplete transfer of authority* Papua dari Belanda kepada Indonesia; dan orang asli Papua menganggap kegagalan pembangunan berkaitan dengan implementasi UU Otsus Papua, maka adanya indikator usulan yang dapat mewujudkan harapan orang asli Papua bahwa tanah Papua menjadi Tanah Damai. Indikator perdamaian dalam 5 (lima) bidang; politik, ekonomi dan lingkungan hidup, hukum dan hak asasi manusia, keamanan serta sosial budaya. Indikator ini bukan hanya merupakan ukuran yang akan digunakan untuk menilai seberapa jauh Papua sudah atau belum menjadi Tanah Damai tetapi juga merupakan ungkapan harapan orang asli Papua.

1. Bidang politik : adanya rasa aman, tenteram dan hidup sejahtera di Tanah Papua serta memiliki hubungan baik dengan sesama, alam dan Tuhan. Mereka merasa tenteram apabila tidak lagi menerima stigma separatistis. Perlunya pelibatan dalam kesepakatan yang berkaitan dengan kepentingan dan masa depan orang asli Papua. Perbedaan pandangan politik tentang status Politik Papua dapat diselesaikan secara damai.

2. Bidang ekonomi dan lingkungan hidup : seyogyanya seluruh tanah ulayat dapat dipetakan dengan baik. Pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan dengan cara-cara yang memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup, menghargai kearifan lokal, serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk lokal. Perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan hidup dan merugikan pemilik tanah ulayat perlu diberikan sanksi hukum dan administratif. Perlu pemberdayaan orang asli Papua di berbagai sektor ekonomi melalui regulasi yang berpihak pada masyarakat lokal.

3. Bidang sosial dan budaya : perlunya peningkatan kualitas pendidikan dengan menerapkan kurikulum yang kontekstual serta pengelolaan dan pendidikan yang sesuai sasaran dan tujuan, serta menghapuskan diskriminasi terhadap pengidap HIV/AIDS. Pentingnya pengakuan dan penghargaan hak-hak dasar dan adat istiadat dan norma-normanya, serta penghentian kebijakan yang mengarah pada depopulasi orang asli Papua, seperti program Keluarga Berencana yang membatasi kelahiran.

4. Bidang keamanan : perlunya aparat keamanan TNI/Polri menjalankan tugasnya secara profesional dan menghormati HAM demi menjamin rasa aman bagi penduduk lokal. Pos militer hanya didirikan di daerah perbatasan antar negara, bukan di antara pemukiman penduduk. Orang Papua mengharapkan agar TNI/Polri dapat mengatasi masalah keamanan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat ataupun tokoh agama setempat, sehingga diharapkan tidak salah dalam mengambil tindakan.

5. Bidang Hukum dan HAM : orang asli Papua masih merasa perlu mendapat kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul. Kekerasan negara terhadap orang Papua, termasuk perempuan dan anak, perlu diakhiri. Selain pelaku kekerasan negara mesti diadili dan dihukum sesuai dengan rasa keadilan orang asli Papua dan korban, Pemerintah juga diharapkan mendidik pengadilan HAM di Papua.

#### **4.5.1 Format Dialog Jakarta - Papua yang Tepat**

Penataan Papua dengan hati merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemda Papua dan Papua Barat serta masyarakat Papua, oleh sebab itu, penataan Papua dapat diawali dengan dialog Jakarta-Papua yang melibatkan kedua pihak. Dialog antara Pemerintah Indonesia dan orang Papua atau dialog Jakarta-Papua perlu dilakukan karena konflik Papua masih belum dituntaskan. Indikator konflik adalah berbagai aksi kekerasan yang terus terjadi hingga kini yang menewaskan bukan hanya warga sipil, tetapi juga anggota TNI/Polri, adanya pengibaran bendera Bintang Kejora, adanya tuntutan referendum, adanya stigma separatis terhadap orang Papua dan penerapan “makar” dan subversif bagi orang Papua yang dituduhkan separatis. Di tengah konflik Papua yang masih membara, terbitlah secercah harapan akan penyelesaian konflik Papua secara damai. Adanya keinginan dari Pemerintah dan orang Papua untuk menyelesaikan konflik Papua tanpa kekerasan dan pertumpahan darah. Hal itu sudah diperlihatkan melalui pernyataan terbuka dari kedua belah pihak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengumumkan kesediaan Pemerintah untuk berdialog dengan semua komponen masyarakat di Tanah Papua dalam rangka penyelesaian konflik Papua, dengan mencari solusi dan opsi terhadap berbagai permasalahan di Tanah Papua. Rakyat Papua baik yang hidup di Tanah Papua maupun di luar negeri, juga telah menyatakan kesediaan mereka untuk berdialog dengan Pemerintah guna mencari solusi-solusi damai atas konflik Papua. Kesediaan kedua belah pihak tersebut perlu didukung semua pihak di Jakarta dan Papua. Seluruh Kementerian/Lembaga dengan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, TNI, Polri,

DPR, DPD, akademisi, pihak swasta dan berbagai kelompok masyarakat di seluruh Indonesia perlu mendukung inisiatif dialog damai ini. Semua Pihak di Tanah Papua seperti Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun Kabupaten, TNI, Polri, DPRD Papua dan Papua Barat, Majelis Rakyat Papua (MRP), pemimpin agama, pemimpin adat, pemimpin perempuan dan semua kelompok masyarakat sipil juga perlu mendukung inisiatif dialog ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pentingnya suatu dialog terbuka dengan rakyat Papua untuk mencari dan menyepakati solusi-solusi serta pilihan terbaik atas berbagai masalah di Tanah Papua (Kompas, Kamis 8 Desember 2011). Presiden SBY menekankan bahwa dialog itu dapat dilaksanakan atas dasar tiga pilar : Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi Khusus, dan percepatan pembangunan di Papua. Memandang dari Papua, Presiden SBY telah memberi harapan di tengah kebuntuan komunikasi politik antara Jakarta dan Papua. Ternyata masih ada peluang menyelesaikan konflik Papua secara damai. Tanpa tekanan dari luar, Presiden SBY bahkan telah mengambil inisiatif menetapkan langkah progresif. Presiden membentuk unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). UP4B diharapkan menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat di Jakarta dan rakyat serta pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, melalui program aplikatif pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Papua.

#### **4.5.2 Orang Asli Papua sebagai Objek Sekaligus Subjek Pembangunan**

Pemerintah menjadi subjek yang paling berkompeten untuk mencari solusi yang komprehensif dalam meniadakan faktor-faktor yang menciptakan kondisi orang asli Papua termarginalisasi. Mereka sebagai objek pembangunan sekaligus telah menempatkan diri sebagian menjadi subjek di daerah memerlukan dorongan dan pendampingan agar mampu berkompetisi dan keluar dari situasi yang terpisahkan dan terabaikan dari sistem politik, ekonomi dan sosial budaya Papua. Kemampuan dalam kompetisi akan menjadikan orang asli Papua sebagai pejabat pada level strategis penentu kebijakan berdampak mengikis isu pemanfaatannya diposisi strategis hanya untuk meredam gejolak konflik tuntutan merdeka dan isu

lainnya. Sosialisasi tentang keistimewaan yang diberikan bagi mereka berupa regulasi yang memproteksi pejabat Gubernur dan Wagub harus orang asli Papua merupakan wujud kehadiran negara dalam meniadakan proses marjinalisasi pada jabatan politik yang paling strategis di Pemda. Secara umum banyak daerah di wilayah Papua, jabatan strategis di eksekutif dan legislatif telah banyak yang ditempati oleh orang asli Papua. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia orang asli Papua perlu dibangun agar dapat bersaing dengan pelaku dari suku lain yang menjadi pendatang. Wilayah Papua sangat luas namun jumlah penduduk masih sedikit khususnya populasi orang asli Papua, dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, ketersediaan jabatan politik dalam struktur pemerintahan daerah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif serta tersedianya lembaga representasi kultural adat orang asli Papua diharapkan akan mewujudkan keinginan semua pihak bahwa orang asli Papua sebagai tuan rumah di tanah Papua, yakni sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan.

#### **4.5.3 Pembangunan Infrastruktur Dasar sebagai Sarana Penghubung**

Pembangunan infrastruktur sebagai sarana penghubung antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan maupun pegunungan merupakan salah satu kunci akselerasi pembangunan di Papua. Melalui pembangunan infrastruktur diyakini wilayah-wilayah yang terisolasi dapat terbuka, dan roda perekonomian akan berkembang pesat. Menyadari hal ini Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40/2013 tentang Pembangunan Jalan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang ditandatangani pada 17 Mei 2013 dan merupakan langkah terobosan yang baik untuk rakyat Papua. Perpres ini merupakan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan oleh UP4B dengan semua pihak di Papua dan Papua Barat maupun di Jakarta. "Perpres ini adalah bentuk keberpihakan dan perhatian penuh Pemerintah kepada rakyat Papua. Perpres ini merupakan bentuk dari langkah strategis untuk mengurai hambatan-hambatan dalam upaya percepatan pembangunan di Papua, khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dalam bentuk

pembangunan jalan penghubung antar kabupaten yang terisolir, sulit dan berat tantangan alamnya. Anggaran pembangunan infrastruktur jalan dibebankan ke dalam APBN, adapun sebagai penanggung jawab dan pelaksana UP4B, Pemerintah menggandeng TNI dalam pelaksanaannya, mengingat situasi di Papua yang masih belum kondusif. Terpenuhinya infrastruktur makro berupa jaringan jalan di seluruh kota-kota Papua dapat menyatukan visi pengembangan potensi Papua, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya relasi lintas suku yang menggerakkan sistem berbagai aspek kehidupan dari wilayah terpencil/pedesaan ke wilayah sentra/perkotaan sehingga dapat mendorong pertumbuhan aktivitas politik, ekonomi dan sosial budaya. Sasaran pembangunan untuk kepentingan orang asli Papua tidak seyogyanya mendapatkan hambatan dari lingkungan internal sendiri. Gangguan Keamanan dari GSBP menjadi tugas Apkam untuk melancarkan pembangunan infrastruktur makro Papua. Sosialisasi tujuan pembangunan infrastruktur makro maupun hasilnya dapat mengeliminir pengaruh eksploitasi GSPP yang menekan Pemri dengan tema isu pembangunan infrastruktur makro mengabaikan kepentingan adat Papua.

#### **4.5.4 Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah**

Prinsip-prinsip dalam tata kelola Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terdiri dari berbagai aspek yang penting, diantaranya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi sebagai suatu proses keterbukaan yang merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. Semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui oleh masyarakat Papua. Demikian pula informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses publik. Dalam hal ini, aparat pemerintah harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik. Upaya pembentukan masyarakat transparansi dapat dilakukan melalui forum

komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak maupun elektronik, sebagai contoh wujud nyata prinsip keterbukaan dan transparansi. Tidak adanya keterbukaan dan transparansi dalam urusan pemerintahan akan menyebabkan kesalahpahaman terhadap berbagai kebijakan publik yang dibuat. (Bappenas, Modul Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kepemerintahan Yang Baik, 2007).

Pada era reformasi salah satu hasilnya adalah desentralisasi. Proses desentralisasi telah memindahkan tanggung jawab pengelolaan pembangunan dan sumber daya kepada daerah dan kabupaten. Di wilayah yang tergolong miskin dan paling terpencil seperti Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, kapasitas struktur pemerintahan di tingkat daerah cukup terbatas, dan mempengaruhi ketersediaan dan kualitas pelayanan. Sehingga peningkatan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal merupakan isu utama dalam percepatan pembangunan. Tata Pemerintahan daerah harus memperhatikan kualitas pejabat Pemerintah Daerah yang saat ini telah didominasi oleh orang asli Papua, harus menunjukkan kualitas bagus dengan tingkat pendidikan memadai, berpihak pada kepentingan rakyat, tidak melakukan tindak korupsi serta mampu melakukan inovasi-inovasi kebijakan yang dapat memajukan daerah. Selain itu akses pada keadilan juga merupakan sebuah bidang dimana peningkatan bisa dilakukan, terutama terkait dengan perlindungan orang miskin dan populasi yang rentan dalam sistem peradilan dan sektor keadilan, dimana terdapat saling keterkaitan antara akses pada keadilan, termasuk HAM, tata pemerintahan daerah yang efektif, pemanfaatan lahan yang adil dan sumber daya lain dan peningkatan pelayanan sosial merupakan hal yang harus diperbaiki. Pemerintah Papua dan Papua Barat harus mengedepankan Integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Tujuan utama meliputi: penciptaan struktur pemerintah yang efisien di tingkat pusat dan daerah, yang lebih bersinergi antara keduanya; meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah; dan mempromosikan perencanaan yang lebih baik melalui peningkatan kualitas dan keandalan data (termasuk data demografis). (*United Nations*, Tata Kelola

Pemerintahan, lihat : <http://www.un.or.id/id/apa-yang-kami-lakukan/kemitraan-pembangunan/tata-kelola-pemerintahan>, diakses tanggal 4 Januari 2014 ).

Pembentukan daerah baru pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, hal ini melatarbelakangi adanya aspirasi pemekaran wilayah Papua dengan pertimbangan kondisi geografis Papua yang terlalu luas sehingga pelayanan publik kurang efektif dan efisien, belum adanya pemerataan pembangunan ekonomi dan kesempatan berpolitik dalam bingkai demokrasi NKRI terutama bagi orang asli Papua. Dukungan terhadap pemekaran wilayah Papua datang dari elemen masyarakat yang mendukung Pemri menjalankan pembangunan di Papua. Penolakan pemekaran wilayah Papua terindikasi datang dari kelompok pendukung Papua Merdeka dengan dalil bahwa pemekaran tidak menjamin masyarakat Papua lebih sejahtera, kepentingan kelompok tertentu dan merupakan cara Pemri memecah belah Papua. Regulasi yang ada lebih menekankan terbentuknya daerah baru berasal dari usulan daerah yang akan memekarkan diri, selanjutnya akan melalui proses ditingkat daerah dan ditingkat pusat. Legitimasi terbentuknya provinsi baru hasil pemekaran di Papua berada pada kebijakan Pemerintah Pusat dengan dikeluarkan Undang-Undang terkait daerah yang dimekarkan. Adanya moratorium pemekaran wilayah karena revisi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemda akan menunda terbentuknya Provinsi baru di wilayah Papua. Potensi permasalahan dan hambatan terkait pemekaran wilayah Papua adalah terbentuknya sikap Pro dan Kontra di masyarakat yang rawan terjadinya konflik sosial apabila memobilisasi massa pendukung, dengan latar belakang perbedaan pendapat tentang mendukung dan menolak pemekaran wilayah, perebutan Ibukota provinsi, perebutan potensi daerah dan penentuan batas wilayah, sarana dan prasarana Pemerintahan serta penentuan *Caretaker* Pejabat.

**1. Ada 23 Usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua** sebagai berikut :

- a. Kab. Gili menawa pemekaran dari Kab. Jayapura.

- b. Kab. Moyo pemekaran dari Kab. Boven Digul.
- c. Kota Merauke pemekaran dari Kab. Merauke.
- d. Kab. Balin Senter pemekaran dari Kab. Tolikara dan Kab. Lany Jaya.
- e. Kab. Boboga pemekaran dari Kab. Tolikara.
- f. Kab. Puncak Trikora pemekaran dari Kab. Lany Jaya.
- g. Kab. Muara Digul pemekaran dari Kab. Mapi.
- h. Kab. Admi Korbay pemekaran dari Kab. Mapi.
- i. Kab. Katengban pemekaran dari Kab. Pegunungan Bintang.
- j. Kota Lembah Balin pemekaran dari Kab. Jaya Wijaya.
- k. Kab. Okika pemekaran dari Kab. Jaya Wijaya.
- l. Kab. Yafen Barat Utara pemekaran dari Kab. Kepulauan Yapen.
- m. Kab. Yapen Timur pemekaran dari Kab. Kepulauan Yapen.
- n. Kab. Pulau Numfor pemekaran dari Kab. Biak Numfor.
- o. Kab. Yalimek pemekaran dari Kab. Yahukimo.
- p. Kab. Yahukimo Barat Pegunungan Ser pemekaran dari Kab. Yahukimo.
- q. Kab. Mambera Hulu pemekaran dari Kab. Yahukimo.
- r. Kab. Yahukimo Barat Daya pemekaran dari Kab. Yahukimo.
- s. Kab. Yahukimo Timur pemekaran dari Kab. Yahukimo.
- t. Kab. Yahukimo Utara pemekaran dari Kab. Yahukimo.

- u. Kab. Gondumisisare pemekaran dari Kab. Waropen.
- v. Prov. Papua Selatan pemekaran dari Prov. Papua.
- w. Prov. Papua Tengah pemekaran dari Prov. Papua.

**2. Ada 9 Usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua Barat**, sebagai berikut :

- a. Kab. Malamoy pemekaran dari Kab. Sorong.
- b. Kab. Maybratsau pemekaran dari Kab. Sorong.
- c. Kab. Raja Ampat Utara pemekaran dari Kab. Raja Ampat.
- d. Kab. Raja Ampat Selatan pemekaran dari Kab. Raja Ampat.
- e. Kab. Raja Maskona pemekaran dari Kab. Teluk Bintuni.
- f. Kab. Okas pemekaran dari Kab. Fak-Fak.
- g. Kab. Kota Manokwari pemekaran dari Kab. Manokwari.
- h. Kab. Manokwari Barat pemekaran dari Kab. Manokwari.
- i. Kab. Imeo pemekaran dari Kab. Sorong Selatan.

#### **4.5.5 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rakyat**

Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat wajib memenuhi kebutuhan dasar rakyat Papua terutama pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan dan budaya. Dalam bidang sosial yang harus diperhatikan Pemerintah diantaranya memelihara dan memberikan jaminan hidup yang layak; memberikan perhatian dan penanganan khusus pengembangan suku-suku asli yang masih terisolasi, terpencil dan terabaikan; berkewajiban menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dilaksanakan secara merata dan

menjangkau seluruh lapisan masyarakat di pelosok; Pemerintah juga berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi penyakit terutama HIV/AIDS yang sudah sangat mengkhawatirkan.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap proses dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Seluruh masyarakat Papua berhak atas pendidikan yang bermutu sampai dengan tingkat sekolah menengah, dengan biaya sekolah yang rendah. Pendidikan seyogyanya diselenggarakan dengan profesional dan bertanggung jawab sehingga diharapkan akan membuahkan lulusan yang memiliki derajat mutu yang sama dengan pendidikan dari provinsi lain di Indonesia. Hal ini untuk menghilangkan stigma bahwa sumber daya manusia Papua masih rendah, dengan demikian akan mengejar kemajuan pada bidang pendidikan. Dengan berlimpahnya dana APBN yang diberikan kepada Pemerintah Papua dan Papua Barat maka Pemerintah Daerah seharusnya mampu memberikan beasiswa penuh atau sebagian bagi pendidikan bagi putra putri asli orang Papua, pada semua atau sebagian jenjang pendidikan. Terkait dengan pengembangan penyelenggaraan bidang pendidikan, maka seyogyanya Pemerintah Daerah menggandeng pihak swasta, dunia usaha maupun NGO/LSM, guna membantu mengembangkan kualitas pendidikan di Papua.

Pemerintah Daerah juga wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan asli Papua, dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk improvisasi dan pengembangan budaya. Selain itu kemampuan Pemerintah Daerah membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang asli Papua. Namun demikian tetap mempertahankan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional bagi orang Papua

#### **4.5.6 Keberpihakan pada Pertumbuhan Ekonomi Orang Asli Papua**

Persoalan ekonomi yang tidak tertangani baik oleh pemerintah dalam bentuk regulasi yang berpihak kepada orang asli Papua, berpotensi memicu berbagai masalah ekonomi maupun masalah-masalah sosial yang lainnya. Orang asli Papua yang memiliki faktor kemampuan ekonomi yang lemah akan berakibat pada kemampuan membiayai pendidikan anak-anak Papua, pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan), dan tingkat gizi keluarga yang rendah serta masalah-masalah sosial lain dapat timbul akibat kurangnya kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Regulasi hendaknya memberi ruang serta kemudahan bagi untuk berkiprah dalam bidang ekonomi. Pembinaan kondisi sentra ekonomi yang dapat mendorong pelaku ekonomi memiliki tempat berdagang yang dapat membangun relasi dengan konsumen maupun pelaku ekonomi. Keadaan yang diharapkan ini menuntut pemerintah membuat regulasi kebijakan yang dapat memproteksi sekaligus mendorong ekonomi. Pembangunan pasar-pasar, ruko-ruko dan perizinan untuk membangun perhotelan dan pertokoan besar seyogyanya tersedia tempat bagi orang asli Papua untuk bekerja di bidang tersebut. Untuk itu diperlukan regulasi beserta implementasinya dengan kontrol yang baik agar tetap berpihak kepada orang asli Papua, sehingga tidak menciptakan ruang yang memisahkan dengan program pembangunan. Kondisi yang diharapkan di wilayah Papua regulasi dan implementasinya dapat berlaku memproteksi proses kemajuan perekonomian orang asli Papua, secara makro maupun mikro. Hal ini dimungkinkan sejak UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) dikeluarkan Pemri, maka pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang konkrit berupa kebijakan Pemerintah yang dapat memproteksi pengusaha orang asli Papua, sejalan dengan proses memajukan tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat. Tujuannya adalah agar rakyat orang asli Papua dapat diselamatkan dari garis kemiskinan. Kondisi ekonomi di Papua dapat meningkatkan taraf hidup apabila Kebijakan Pempus ditindaklanjuti oleh kebijakan Pemda yang konsisten searah dengan keberpihakan Pemerintah Pusat kepada rakyat dalam mengambil sebuah kebijakan yang dapat melindungi .

Kondisi nyata perekonomian masyarakat di wilayah Papua baik secara makro maupun mikro, tidak sesuai dengan harapan rakyat serta tujuan dari Otsus. Pada era Otsus, kebijakan yang diambil oleh pemerintah khusus bagi orang asli Papua secara signifikan belum dapat menata perekonomian rakyat. Apalagi diperhadapkan dengan dana Otsus yang dikeluarkan Pemerintah begitu besar termasuk sumber pendapatan lainnya. Banyak lapangan kerja yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta, pada kenyataannya hanya tersedia sedikit peluang bagi untuk dapat bekerja, apalagi persaingan ekonomi yang tinggi telah mendesak orang asli Papua yang tidak dilatih serta diberdayakan dalam dunia usaha. Pemerintah sebagai pelayan publik dapat memberikan pelayanan dengan mengambil langkah konkrit berupa kebijakan dalam rangka memberdayakan orang asli Papua agar dapat eksis dan selalu berkarya dalam dunia usaha yang berskala besar maupun kecil. Dalam mengentaskan kemiskinan serta upaya mewujudkan pemerataan pembangunan, Pemerintah Daerah seharusnya telah mampu mengimplementasikan amanat dari pada UU 21/2001, namun kemiskinan masih menjadi bagian mayoritas masyarakat. Salah satu pemicunya adalah kurangnya perhatian dari pemerintah untuk peningkatan ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan ekonomi bagi orang Papua dengan pendekatan sosial ekologi.

#### **4.5.7 Mencegah Pelanggaran HAM Berat**

Salah satu isu paling krusial di Papua yang dapat diangkat ke PBB adalah apabila Negara dalam hal ini aparat keamanan seperti TNI/Polri melakukan pelanggaran HAM Berat. Walaupun definisi pelanggaran HAM berat batasannya masih belum jelas, namun manakala pelanggaran ini dilakukan secara sistemik oleh negara dengan menggunakan kekerasan yang menimbulkan korban *massive* maka hal ini akan dengan sangat mudah diangkat oleh para pejuang HAM internasional ke dalam forum internasional seperti PBB.

Indonesia mengakui *Universal Declaration of Human Rights* yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, dengan meratifikasi melalui penetapan UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari dasar

inilah segala bentuk operasi dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh Kementerian/Lembaga termasuk TNI/Polri seharusnya menjunjung tinggi HAM. Mengingat HAM bersifat universal dan imparsial maka, prinsip-prinsip HAM yang adil tidak hanya berlaku bagi aparat keamanan TNI/Polri yang melakukan pelanggaran, namun harus juga diberlakukan bagi kelompok Gerakan Separatis Bersenjata Papua TPN/OPM. Pada tahun 2013, kecenderungan serangan lebih banyak dilakukan oleh TPN/OPM, sedangkan aksi dan tindakan yang dilakukan aparat keamanan hanya merupakan respon aksi brutal kelompok ini. Posisi Komnas HAM Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan UU 39/1999, seharusnya juga bersikap adil, bukan hanya memperuncing kesalahan yang dilakukan oleh TNI/Polri melalui operasinya, namun harus seimbang apabila yang menjadi korban adalah personil TNI/Polri.

Melalui resolusi MU PBB 63/172 tanggal 3 April 2009 tentang "*National Institution for the promotion and protection of human rights*", PBB menegaskan kembali pentingnya pertumbuhan yang efektif, *independent* dan *pluralistic* dari institusi nasional yang berkompeten pada promosi dan perlindungan HAM, sejalan dengan prinsip dan undang-undang nasional dalam mengembangkan HAM. Peran institusi nasional HAM harus bekerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan apresiasi pengembangan HAM pada tingkat nasional, termasuk dalam menindaklanjuti rekomendasi dari *international human rights mechanism*. Komnas HAM harus sesuai dengan *Vienna Declaration and Programme of Action*, agar sejalan dengan *international human rights standard*. Seluruh aktivitas HAM negara anggota PBB selalu dipantau oleh Dewan HAM PBB setiap tahun, dan hal ini terus dilaporkan dalam *Annual Report Human Rights Council*. Dewan HAM PBB bekerjasama dengan NGO/LSM yang peduli dengan isu HAM, dan apabila dipandang adanya laporan yang menonjol di Indonesia maka akan dikirim *special envoy* (utusan khusus) guna melakukan penyelidikan ada tidaknya pelanggaran HAM yang dilakukan negara. Untuk menghindari pelanggaran HAM berat, maka perlunya pembekalan pengetahuan HAM yang memadai kepada setiap prajurit TNI/Polri sebagai wakil negara yang bertugas di Papua, sehingga tidak mudah terpancing oleh aksi-aksi yang sengaja dilakukan oleh TPN/OPM.

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Strategi diplomasi Indonesia di forum multilateral PBB guna mencegah masuknya isu Papua ke dalam agenda badan-badan utama (*main body*) dan badan turunan (*subsidiary body*) PBB adalah menentukan isu prioritas dalam diplomasi internasional bahwa integritas NKRI khususnya terkait isu Papua, tekad Pemerintah di tingkat multilateral untuk menjaga batas dan luas wilayah RI saat ini sesuai hukum internasional; selanjutnya menentukan rencana strategis untuk apa saja yang harus dilaksanakan; sebagai aplikasi strategis dimaksud diplomasi Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam sidang/konferensi internasional untuk monitor sekaligus mencegah isu Papua dibahas; selain itu perlunya strategi penggalangan untuk mencegah konsep bahwa *right to self determination* itu sama dengan *independence*/merdeka; perlunya strategi *intermestik* mengurangi anggapan penghisapan ekonomi oleh Pemerintah Pusat terhadap sumber daya alam Papua yang kaya; sekaligus mencegah munculnya keinginan sgelintir pihak memunculkan Pepera model baru yaitu referendum. Untuk mewujudkan dukungan dari negara-negara pihak (*states party*) di PBB, maka diplomasi Indonesia juga memainkan kerjasama *capacity building* dan kerjasama multilateral di bidang politik, perdamaian dan perlucutan senjata, demokrasi, pemberantasan korupsi, *good governance*, *counter terrorism* serta pemajuan perlindungan HAM serta menindaklanjuti peluang kerjasama di bidang militer pertahanan, *peacekeeping operations*, *peace building* dan *civilian capacity* di fora internasional. Melalui peran aktif diplomasi Indonesia dalam setiap persidangan maupun konferensi yang diselenggarakan PBB, diharapkan mampu mencegah masuknya isu Papua ke dalam agenda PBB.

Strategi diplomasi Indonesia di forum multilateral ini tidaklah cukup tanpa dibarengi langkah konkrit Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang didukung seluruh Kementrian/Lembaga termasuk TNI/Polri, pihak swasta,

akademisi dan masyarakat untuk rakyat Papua. Kebutuhan mendasar yang langsung dirasakan orang Papua adalah ketersediaan sandang, pangan, papan yang murah, tersedianya lapangan pekerjaan, pendidikan murah, pelayanan kesehatan yang memadai, pelayanan publik yang berpihak pada rakyat, pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan, dan adanya rasa aman bagi seluruh masyarakat yang tinggal di tanah Papua. Pemenuhan kebutuhan dasar ini tidaklah berlebihan mengingat tanah Papua memiliki sumber daya alam berlimpah, dari hasil hutan, hasil tambang, hasil laut dan lain-lain, sehingga diyakini mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Strategi nasional *smart approach* seperti adanya format dialog Jakarta – Papua yang tepat; kebijakan orang asli Papua sebagai objek sekaligus subjek pembangunan; adanya pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan sebagai sara penghubung daerah dan perkotaan; peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat; adanya keberpihakan kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi bagi orang asli Papua; dibarengi tidak adanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat keamanan pada masa mendatang, maka diyakini tanah Papua akan tetap dalam bingkai NKRI untuk selamanya.

## **5.2 Saran**

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri harus membuat lompatan kebijakan pada tataran internasional, yaitu menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB sebagai capaian optimal diplomasi multilateral Indonesia di PBB. Sebagaimana diketahui saat ini PBB sedang membahas reformasi internal PBB, yang salah satunya reformasi DK PBB, sebagai muara seluruh permasalahan politik dan keamanan internasional dibahas dan diputuskan. Untuk menjadi Anggota Tetap DK PBB, Indonesia memiliki keunggulan diantaranya pengalaman diplomasi 3 (tiga) kali menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, sebagai anggota G-20, jumlah penduduk keempat terbesar di dunia sekaligus komunitas Muslim moderat terbesar didunia serta menjadi kontributor aktif dalam misi pasukan pemelihara perdamaian PBB sejak tahun 1957 hingga saat ini.

Pemerintah harus secara tegas menentukan salah satu Kementerian/Lembaga sebagai koordinator penanganan isu Papua secara komprehensif. Sehingga penanganan Papua tidak lagi secara parsial dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga seperti sekarang ini, yang mengakibatkan banyak program yang duplikasi atau tumpang tindih antar instansi, dan dilain pihak ada sektor yang tidak tersentuh sama sekali. Pemerintah dapat menunjuk Kemenkopolhukam atau Kemenkokesra sebagai koordinator penanganan isu Papua yang didukung seluruh pemangku kepentingan, sehingga dicapai solusi terbaik.

Lambannya pembangunan di Papua ditengarai akibat korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat pemerintahan di daerah yang semuanya adalah putra daerah. Adanya ancaman dari beberapa pihak yang terus mengintimidasi apabila lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk ke Papua, maka mereka sepakat untuk lepas dari NKRI. Hal inilah yang menyebabkan hingga saat ini KPK belum pernah melakukan penangkapan pejabat daerah Papua, tidak seperti di propinsi lainnya. Untuk itu sudah waktunya bagi KPK turun memberantas korupsi di Papua, terutama bagi para pejabat daerah yang menyalahgunakan dana Otonomi Khusus dan dana anggaran lainnya, yang seharusnya peruntukannya bagi kepentingan masyarakat Papua.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Resolusi PBB

Resolusi MU PBB nomor : A/RES/491 (V) tahun 1960 tentang Penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa Bangsa

Resolusi MU PBB 1752 (XVII) tentang New York Agreement.

Resolusi MU PBB 2504 (XXIV) tahun 1969 terkait Laporan Sekjen PBB mengenai hasil Pepera (Act of Free Choice)

Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III) tahun 1948 tentang Universal Declaration of Human Rights.

Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961 pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa fungsi-fungsi dari diplomasi

### 2. Peraturan Perundang-undangan

UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

UU 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara (Minerba)

Peraturan Pemerintah (PP) 1/2014 tentang Pelaksanaan UU Minerba

Perpres 66/2011 tentang Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40/2013 tentang Pembangunan Jalan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

### 3. Buku – buku

Bappenas, Modul Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, 2007.

- Dirjen Strahan Kemhan RI, *Analisa Tentang Potensi Konflik di Papua dan Pengaruhnya Terhadap Pertahanan Negara*, Kemhan, Jakarta, 2011.
- Douglas E. Noll, *Elusive Peace : How Modern Diplomatic Strategies Could Better Resolve World Conflicts*, Prometheus Books, New York – USA, 2011.
- Ernst-Otto Czempiel and James Rosenau, *Governance Without Government : Order and Change in The World Politics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
- G.R. Berridge, *Diplomacy : Theory and Practice*, Palgrave Macmilan Publisher Limited, New York – USA, 2010.
- John Saltford, *The United Nations and Indonesia Takeover of West Papua, 1962 – 1969 : The Anatomy Betrayal*, Routledge Press, New York – USA, 2006.
- Neles Keadabi Tebay, *Angkat Pena Demi Dialog Papua*, Aswajaya Pressindo, Jakarta, 2012.
- Paskalis Kossay, *Konflik Papua ; Akar Masalah dan Solusi*, PT. Gramedia, Jakarta – Indonesia, 2011.
- Ranny Emilia, *Praktek Diplomasi*, Badouse Media, Jakarta, 2013.
- Stevan Vukoti, *The Problem of Defining a State in International Law : A Comparasion of Unilateral Declarations of Independence of Kosovo, Abkhazia and South Ossetia*, VDM Verlag Dr. Muller Press, New York - USA, 2011.
- Timo Kivimaki, *Initiating Peace Process in Papua : Actors, Issues, Process, and the Role of International Community*, East West Center Washington Press, Washington – USA, 2006.
- Wawan Purwanto, *Papua Meradang – Siapa Bermain*, CMB Press, Jakarta 2013.

#### 4. Journal/Koran

Ian Hurd "Law and The Practice of Diplomacy", International Journal, Summer, 2011 : 591

Paul Collier, The Bottom Billion, Oxford University Press, ISBN: 9780195311457.

Kompas, Selasa 13 September 2011.

Kompas, Kamis 8 Desember 2011.

#### 5. Website

ABC Radio Australia, PM Vanuatu tuding PBB abaikan isu PBB, diakses tanggal 29 September 2013, lihat <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-09-29/pm-vanuatu-tuding-pbb-abaikan-isu-papua/1197408>

Adriana Elisabeth, Papua Road Map : Bagian Perjalanan Damai Papua, diakses tanggal 12 September 2013, lihat <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/kolom-papua/568-papua-road-map-bagian-perjalanan-damai-papua.html>

Kemenlu RI, Kerjasama Multilateral, diakses tanggal 18 Mei 2013, pukul 10.50, lihat <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFP.aspx?P=Multilateral&l=id>

Kemenlu RI, Landasan, Visi dan Misi Polugri, diakses tanggal 18 Mei 2013 pukul 10.35, lihat <http://www.deplu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=1&l=id>

Komnas HAM, diakses tanggal 16 Agustus 2013, lihat : <http://www.komnasham.go.id/informasi/images-portfolio-6/2013-03-18-05-44-20/nasional/356-keputusan-presiden-republik-indonesia-nomor-50-tahun-1993-tentang-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-presiden-republik-indonesia>

Mohamad Iqbal, Dana Otsus Papua Meningkatkan, Penduduk Miskin Masih Tinggi, diakses tanggal 23 Agustus 2013, lihat : <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/06/mpivmv-80-persen-dana-otsus-akan-langsung-ke-kabupatenkota>

Supreme Court of Canada, Lihat Quebec, "Reference re Succession of Quebec", Supreme Court of Canada (1998) "Reference re Succession of Quebec", 2 S.C.R. 217, 37 International Leg, Mat. 1342 at [http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1998/vol2/html/1998scr2\\_0217.html](http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1998/vol2/html/1998scr2_0217.html), paragraph 124

UN News Center, General Assembly adds French Polynesia to UN decolonization list, diakses tanggal 11 Agustus 2013, lihat : <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44944&Cr=decolonization#.UHFyFJJKqg>

United Nations, Media Center, <http://papersmart.unmeetings.org/media/1072675/EC.19201312E.pdf>

United Nations, Tata Kelola Pemerintahan, lihat : <http://www.un.or.id/id/apa-yang-kami-lakukan/kemitraan-pembangunan/tata-kelola-pemerintahan>

Wikipedia, Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diakses tanggal 12 Mei 2013, pukul 20.45, lihat pada [http://id.wikipedia.org/wiki/indonesia\\_dan\\_perserikatan\\_bangsa-bangsa](http://id.wikipedia.org/wiki/indonesia_dan_perserikatan_bangsa-bangsa)